



RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029

2025 - 2029

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu 4 (lima) tahun yang berpedoman pada RPD Kabupaten Lampung Barat.

Renstra berisikan program dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan identifikasi kebutuhan program/kegiatan sektor kesehatan dengan menetapkan indikator & target indikator berdasarkan target pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah yang diukur setiap tahunnya dengan terus melakukan penyesuaian yang mengakomodir perubahan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat Rahmat dan Ridho-Nya, Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 – 2029 ini dapat terselesaikan. Laporan ini berisikan uraian perubahan indikator pada tiap-tiap program dan kegiatan yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Lampung Barat.

Ucapan Terima Kasih disampaikan kepada Tim Evaluator KemenPAN-RB Republik Indonesia dan Kemendagri yang telah memberikan evaluasi, arahan dan bimbingan terhadap Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 – 2029.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Pencapaian seluruh indikator pada Program Kesehatan di masa mendatang.

Akhirnya kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Liwa, 2 juni 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lampung Barat



Dr. WIDYATMOKO KURNIAWAN, Sp.B
Pembina Utama Muda
NIP. 19700626 200501 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN	
II.1 Gambaran Pelayanan Dinas kesehatn	
II.1.1 Tugas, Fungsi & Struktur Organisasi Dinas Kesehatan	6
II.1.2 Sumber Daya Kesehatan	24
II.1.3 Kinerja Dinas Kesehatan	31
II.1.4 Tantangan Peluang Pengembangan pelayanan Kesehatan...	33
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	
II.2 Isu Strategis Dinas Kesehatan	
II.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan	34
II.2.2 Isu-isu Strategis	56
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 TUJUAN	
4.1 SASARAN	
BAB IV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	2
5.1 STRATEGI	60
5.2 ARAH KEBIJAKAN	62
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN & PENDANAAN INDIKATIF	63
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN	90
BAB VIII PENUTUP	92
LAMP 1 POHON KINERJA	93
LAMP 2 CASCADING	94
LAMP 3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	107

BAB I PENDAHULUAN

1.1 . Pendahuluan

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan masih banyak permasalahan yang menghadang. Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya kualitas kesehatan penduduk yang antara lain ditunjukkan dengan masih tingginya angka kematian bayi, anakbalita, dan ibu maternal, serta tingginya proporsi balita yang menderita gizi kurang; masih tingginya angka kematian akibat beberapa penyakit menular serta kecenderungan semakin meningkatnya penyakit tidak menular; kesenjangan kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antar wilayah/daerah, gender, dan antar kelompok status sosial ekonomi; belum memadainya jumlah, penyebaran, komposisi, dan mutu tenaga kesehatan; serta terbatasnya sumber pembiayaan kesehatan dan belum optimalnya alokasi pembiayaan.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Lampung Barat berpedoman pada kebutuhan, potensi dan kemampuan Kabupaten Lampung Barat selain juga melaksanakan program nasional yang diimplementasikan di daerah dengan memperhatikan secara spesifik kebutuhan daerah. Sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Bidang Kesehatan (RPJMN Kesehatan tahun 2026-2030 arah kebijakan pembangunan kesehatan adalah peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotive dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat merupakan acuan dan panduan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat untuk mendukung pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang memuat perencanaan kinerja yang disusun secara sistematis dan terukur. Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat juga menjadi panduan bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat yang disusun setiap tahun sehingga pelaksanaan kinerja tahunan menjadi lebih terarah dan terjaga kontinuitasnya. Dengan demikian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 ini disusun juga sebagai media informasi publik dan memberikan gambaran penjabaran perencanaan strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat tahun 2025-2029, yaitu penjabaran dalam rumusan tujuan, sasaran, strategi, arahankebijakan dan progam pembangunan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu 2025-2029, disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 – 2029. Renstra memuat arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat melalui program-program yang diusulkan diharapkan dapat dibiayai oleh APBD dan sumber-sumber dana yang lain dapat diperoleh misalnya dari APBN.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat akan digunakan sebagai pedoman, landasan, dan referensi dalam menetapkan skala prioritas Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD). Berdasarkan kepentingan dan nilai strategik dari dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat sangat berkepentingan untuk menyusun Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat 2023 - 2026.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan kesehatan jangka menengah di Kabupaten Lampung Barat akan dapat dilakukan secara lebih terarah dan terukur.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat 2025 -2029 berlandaskan pada :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri PPN No. 5 Tahun 2023 tentang tata cara penyusunan RPJMN tahun 2025-2029

12. Peraturan menteri PPN No. 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara penyusunan Renstra K/L tahun 2025-2029
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

1.1 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, disusun berdasarkan permasalahan pembangunan bidang Kesehatan dan isu strategis bidang Kesehatan pada Kabupaten Lampung Barat, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi yang ada. Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan yang ada dan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan Kabupaten Lampung Barat kurun waktu 2025 - 2029 yang tertuang dalam RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 dengan mengarahkan dan mengoptimalisasikan semua sumberdaya yang dimiliki, melibatkan lintas sektor terkait, dan dengan mengupayakan peran aktif masyarakat dan pihak swasta.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat ditujukan untuk menjabarkan tujuan, sasaran dan program Kepala Dinas Kesehatan ke dalam kegiatan (sub-program) dan sub kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang berdasarkan hirarkinya disusun dengan memperhatikan RPD Kabupaten Lampung Barat. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat setiap tahunnya sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

1.3 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat 2025 - 2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

I. Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan

- II.1 Tugas, Fungsi & Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
- II.1.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan
- II.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
- II.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

II. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

- II.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan
- II.2.2. Isu-isu Strategis

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Dinas Kesehatan
- 3.2 Sasaran Renstra Dinas Kesehatan
- 3.3 Strategi Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra 2025-2029
- 3.4 Arah Kebijakan Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Sub Kegiatan, Kinerja, Indikator, Target, dan pagu Indikatif
- 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas kesehatan
- 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Lamp I POHON KINERJA

Lamp II CASCADING

Lamp III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

II.1 GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

II.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan. Berikut adalah Tugas, Fungsi dan struktur organisasi Dinas Kesehatan

Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

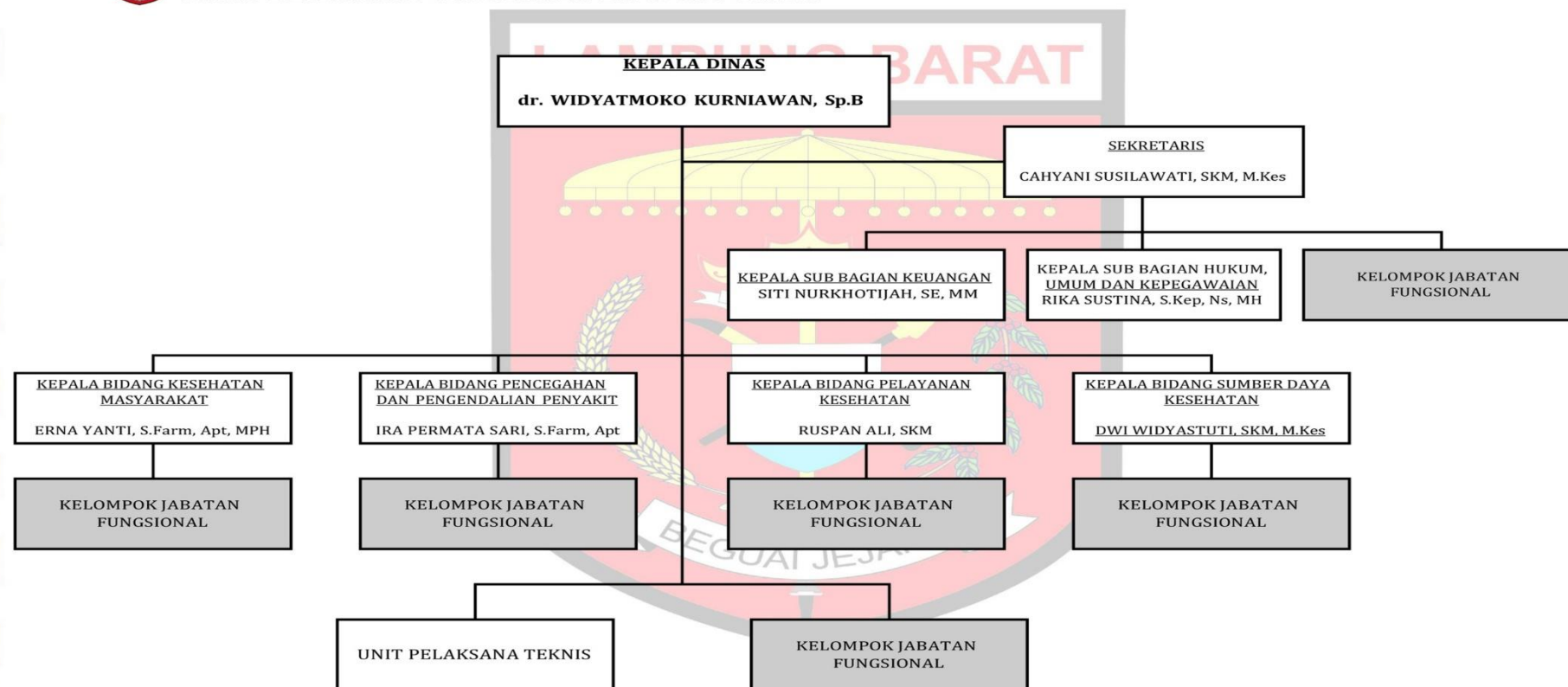
- a. Perumusan kebijaksanaan di bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2016, struktur Dinas Kesehatan terdiri dari

Kepala Dinas sebagai jabatan tertinggi, membawahi Sekretariat (esselon III a) dan 4 (empat) Bidang (jabatan Esselon III b) dan masing-masing Sekretariat dan Bidang membawahi 3 (tiga) sub bagian atau seksi.



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT**



Susunan Organisasi Dinas Kesehatan meliputi :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Hukum, Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Fungsional Perencanaan dan Informasi;
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja & Olahraga.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
 - 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - 3. Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
 - 1. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman;
 - 2. Seksi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan;
 - 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- h. UPT Dinas Kesehatan, terdiri dari:
 - 1. Instalasi Farmasi Kabupaten;
 - 2. RSUD Alimuddin Umar
 - 3. Puskesmas.

Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

Untuk menyelenggarakan fungsi Dinas Kesehatan, Kepala Dinas mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kesehatan;
- c. merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan & pelayanan umum di bidang kesehatan;
- d. melaksanakan rumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- f. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- h. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Dinas, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Fungsi Sekretaris

Sekretariat Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dan pengelolaan informasi, pengelolaan keuangan dan aset, dan pelaksanaan pelayanan administrasi yang meliputi urusan hukum, kepegawaian dan umum pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Dinas Kesehatan, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan Dinas;
- b. pengkoordinasian dalam penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;
- c. pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, urusan hukum, perlengkapan, keuangan, aset, arsip, dokumentasi dan kerumahtanggaan;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelayanan administrasi; dan
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sekretariat dan Dinas.

Untuk menyelenggarakan fungsi Sekretariat Dinas Kesehatan, Sekretaris mempunyai rincian tugas:

- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kesekretariatan terutama yang berkaitan dengan aspek hukum dalam penyelenggaraan urusan kesehatan;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
- c. menyusun rencana, program, dan anggaran Dinas untuk periode lima tahunan dan tahunan;
- d. merencanakan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada atasan;

- e. mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan bidang-bidang yang ada di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kesekretariatan dan administrasi umum;
- g. menyelenggarakan urusan kesekretariatan, rumah tangga (perlengkapan), administrasi kepegawaian dan keuangan;
- h. melaksanakan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari dana APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan penyerahan BPKB dan surat administrasi lainnya;
- i. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- j. melaksanakan monev & pelaporan terhadap pelaksanaan tugas & kegiatan yang telah dilakukan kepada pimpinan;
- k. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sekretariat, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran tugas berdasarkan standar norma & peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas melalui kegiatan kesehatan keluarga, perbaikan gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;

- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang kesehatan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan fungsinya, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai uraian tugas :

- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang kesehatan masyarakat yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kesehatan masyarakat;
- d. melaksanakan kegiatan-kegiatan melalui bimbingan, arahan, perintah dan penugasan lain kepada kepala seksi dan staf sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan kegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan masing-masing seksi dalam bidang kesehatan masyarakat;
- f. melaksanakan pembinaan kepada kepala seksi dan staf serta unit pelaksana teknis yaitu puskesmas dan jaringannya dalam rangka pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- g. melaksanakan perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana serta alat bantu penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada bidang kesehatan masyarakat dan unit pelaksana teknis yaitu puskesmas dan jaringannya;
- h. menyampaikan usulan kepada atasan tentang alokasi sarana dan prasarana serta alat bantu penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada bidang kesehatan dan unit pelaksana teknis yaitu puskesmas dan jaringannya;
- i. melaksanakan koordinasi dengan bidang lain di dalam Dinas Kesehatan agar kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
- j. melaksanakan koordinasi dengan dinas, badan, kantor atau bidang/bagian di luar Dinas atas perintah atasan dalam rangka mendapatkan dukungan program/kebijakan dari lintas sektor;

- k. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada pimpinan;
- m. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Kesehatan Masyarakat, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- n. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas & Fungsi Kepala Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit mempunyai tugas merencanakan melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas dinas dalam surveilans penyakit, pelayanan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, pelayanan kesehatan jiwa, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif dan pelayanan kesehatan haji.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan, penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasikan program/kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. Pemantauan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

Untuk menyelenggarakan fungsinya, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai uraian tugas :

- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. merencanakan kebutuhan program/kegiatan dan anggaran melalui rencana kinerja bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- e. menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan surveilans penyakit, pelayanan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, pelayanan kesehatan jiwa, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), dan pelayanan kesehatan haji serta penyebarluasan informasi program/kegiatan;
- f. melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit akibat merokok dan kawasan tanpa rokok;
- g. melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular melalui pos pembinaan terpadu (posbindu), deteksi dini penyakit kanker (payudara, leher rahim) dengan pemeriksaan inspeksi visual asam asetat (IVA);
- h. melaksanakan pembinaan pencegahan pengendalian penyakit dalam kegiatan surveilans penyakit, pelayanan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, pelayanan kesehatan jiwa, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA, dan pelayanan kesehatan haji;
- i. melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas dalam pencegahan dan pengendalian penyakit;
- j. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;

- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada pimpinan;
- l. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membina, mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam peningkatan pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan, serta pelayanan kesehatan lainnya, peningkatan mutu fasilitas kesehatan primer dan fasilitas kesehatan rujukan, peningkatan pelayanan kesehatan tradisional, serta pengelolaan jaminan/pembiayaan kesehatan Puskesmas.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pelayanan kesehatan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan.

Untuk menyelenggarakan fungsi, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai uraian tugas :

- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja bidang-bidang pelayanan kesehatan yang menjadi tugas dan kewenangannya;

- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang-bidang pelayanan kesehatan;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidangbidang pelayanan kesehatan;
- d. merencanakan kebutuhan kegiatan dan anggaran melalui rencana kinerja Pelayanan Kesehatan;
- e. melaksanakan peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu fasilitas kesehatan primer, fasilitas kesehatan rujukan serta pelayanan kesehatan lainnya, peningkatan pelayanan kesehatan tradisional serta pengelolaan jaminan kesehatan Puskesmas.
- f. melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu fasilitas kesehatan primer, fasilitas kesehatan rujukan serta pelayanan kesehatan lainnya, peningkatan pelayanan kesehatan tradisional, serta penyelenggaraan jaminan/pembiayaan kesehatan Puskesmas.
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan, anggaran, pengelolaan kegiatan dalam kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu fasilitas kesehatan primer, rujukan serta pelayanan kesehatan lainnya, peningkatan pelayanan kesehatan tradisional, serta pengelolaan jaminan/pembiayaan kesehatan Puskesmas.
- h. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada pimpinan;
- j. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Pelayanan Kesehatan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas membuat perumusan kebijakan operasional, merencanakan, melaksanakan dan menyelenggarakan, membina dan mengkoordinasikan sebagian tugas Dinas di bidang kefarmasian, makanan dan minuman, sarana prasarana dan alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang SDK;
- b. menyusun perencanaan kegiatan dan program di bidang SDK;
- c. melaksanakan & mengkoordinasikan kegiatan & program bidang SDK;
- d. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, supervisi, pemantauan di bidang SDK;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang SDK.

Untuk menyelenggaraan fungsi, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja bidang sumber daya kesehatan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang sumber daya kesehatan;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang sumber daya kesehatan;
- d. melaksanakan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan kefarmasian, makanan dan minuman
- e. melaksanakan pengadaan dan distribusi bahan dan alat sarana prasarana dan alat kesehatan;
- f. melaksanakan penempatan, pendayagunaan, dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- g. melaksanakan penerbitan perizinan kesehatan di lingkup kabupaten;

- h. melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang kefarmasian, makanan dan minuman, sarana prasarana dan alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- i. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan dan program di bidang kefarmasian, makanan dan minuman, sarana prasarana dan alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan program di bidang kefarmasian, makanan dan minuman, sarana prasarana dan alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- k. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada pimpinan;
- m. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Sumber Daya Kesehatan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- n. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1 Sumber Daya Dinas Kesehatan

Ketersediaan sumberdaya kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan merupakan salah satu faktor pendukung dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas yang diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Sarana Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas, merupakan unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab

menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Puskesmas memiliki fungsi sebagai : 1) Pusat pembangunan berwawasan kesehatan ; 2) Pusat pemberdayaan masyarakat ; 3) Pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer; dan 4) Pusat pelayanan kesehatan perorangan primer.

Wilayah kerja Puskesmas meliputi wilayah kerja administratif, yaitu satu wilayah kecamatan, beberapa desa / kelurahan di satu wilayah kecamatan dan di sestiap kecamatan harus ada minimal satu unit Puskesmas. Dasar pertimbangan untuk membangun dan menentukan wilayah kerja Puskesmas antara lain factor luas wilayah, kondisi geografis, dan kepadatan penduduk.

a. Puskesmas

Sampai dengan tahun 2025, jumlah puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Barat berjumlah 15 puskesmas keseluruhannya Sudah Menjadi Puskesmas rawat inap yang tersebar di 15 kecamatan. Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan pertama dan terdepan dalam system pelayanan kesehatan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan yang terlibat langsung dengan masyarakat yang menjadi penanggung jawab penyelenggara upaya kesehatan untuk jenjang tingkat pertama. Sarana pelayanan kesehatan dasar ini didukung oleh sarana pustu, dan puskesmas keliling serta jaringannya baik bidan desa, posyandu & poskesdes serta poskestren.

Tabel II-1. Sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta Di Kabupaten Lampung Barat tahun 2025

No	Puskesmas	Pustu	RB / Klinik	RS
1	Sumber Jaya	1. Suka Jaya		
2	Fajar Bulan	2. Pura Laksana 3. Sukananti 4. Tambak Jaya 5. Sumber Agung		
3	Gedung Surian	6. Tri Mulyo 7. Cipta Waras 8. Pura Mekar		

No	Puskesmas	Pustu	RB / Klinik	RS
4	Sekincau	9. Waspada 10. Pampangan 11. Betung		
5	Kenali	12. Hujung 13. Turgak		
6	Sri Mulyo	14. Tugu Ratu. 15. Sumber Agung 16. Rowo Rejo		
7	Batu Brak	17. Kembahang 18. Tebaliokh 19. Pekon Balak		
8	Liwa	20. Bahway 21. Penataran 22. Waymengaku 23. Pd. Cahya	. Klinik Mitra Sehat . Klinik Asyafa - Klinik Polres - Klinik Kodim	- RSUDAU - RSIA
9	Buay Nyerupa	24. Sulung. 25. Tanjung Raya		
10	Lombok	26. Suka Banjar		
11	Bandar Negeri Suoh	27. Hantatai 28. Bandar Agung 29. Sukajadi		
12	Batu Ketulis	30. Luas 31. Argo Mulyo		
13	Kebun Tebu	32. Pura jaya		
14	Pagar Dewa	33. Pahayu Jaya 34. Basungan 35. Pagar dewa 36. Mekar Sari		
15	Air Hitam	37. Sumber Alam		

b. Puskesmas Pembantu

Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.

Untuk mendukung Transformasi Digitalisasi di Bidang Kesehatan serta Puskesmas ILP, pelaksanaan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat, puskesmas pembantu merupakan bagian utama dalam jaringan pelayanan puskesmas, dalam jaringan pelayanan Puskesmas di setiap wilayah pekon. pustu merupakan bagian integral dari puskesmas, dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil dan derajat kecanggihan yang lebih rendah. Jumlah Puskesmas Pembantu (pustu) yang dimiliki oleh Puskesmas yang dirinci menurut kondisi fisik bangunannya.

Rincian kondisi fisik tersebut adalah:

- Baik; apabila bangunan (pustu) yang bersangkutan dalam kondisi baik atau tidak mengalami kerusakan.
- Rusak Ringan; apabila bangunan (pustu) yang bersangkutan terjadi kerusakan pada komponen pintu, jendela, kaca, penggantung, pengunci, cat dan sebagainya.
- Rusak Berat; apabila bangunan (pustu) yang bersangkutan terjadi kerusakan pada komponen pokok dari bangunan seperti pilar, pondasi, sloope, ring balk.
- Rusak Total; apabila bangunan tersebut tidak dapat digunakan lagi

c. Poskesdes dan Poskesdes

Di Kabupaten Lampung Barat, masalah keterbatasan penduduk miskin untuk menjangkau pelayanan kesehatan juga sangat terasa. Dengan berbagai hambatan, letak geografis dan sarana transportasi seharusnya pustu menjadi pilihan masyarakat untuk dimanfaatkan karena merupakan satu-satunya pelayanan kesehatan yang bisa di jangkau oleh masyarakat. Namun kenyataannya pemanfaatan pustu masih sangat rendah. Jumlah puskesmas pembantu yang ada di Kabupaten Lampung Barat sebanyak 37 unit. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/ menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. Poskesdes dapat dikatakan sebagai sarana kesehatan yang merupakan pertemuan antara upaya-upaya masyarakat dan dukungan pemerintah. Pelayanannya meliputi upaya-upaya promotif, preventif, dan kuratif yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (terutama bidan) dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya.

d. Puskesmas Keliling

Pengertian puskesmas Keliling yaitu Unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari puskesmas, dengan fungsi dan tugas yaitu memberi pelayanan kesehatan daerah terpencil, melakukan penyelidikan KLB, transportasi rujukan pasien dan penyuluhan kesehatan dengan audiovisual. Puskesmas keliling berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena letaknya jauh dan terpencil. Jumlah puskesmas keliling roda empat sebanyak 34 Mobil Puskesmas Keliling/ Ambulance untuk 15 Puskesmas.

Tabel II-2. Sarana Puskesmas Keliling dan Ambulan Roda 4

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah
1	Sumber Jaya	Sumber Jaya	2/1 Unit
2	Way Tenong	Fajar Bulan	2/1 Unit
3	Gedung Surian	Bungin	1/1 Unit
4	Sekincau	Sekincau	2/1 Unit
5	Belalau	Kenali	2/0 Unit
6	Suoh	Sri Mulyo	1/1 Unit
7	BNS	BNS	1/1 Unit
8	Pagar Dewa	Pagar Dewa	1/1 Unit
9	Batu Brak	Batu Brak	2/1 Unit
10	Balik Bukit	Liwa	2/1 Unit
11	Sukau	Buay Nyerupa	1/1 Unit
12	L. Seminung	Lombok	1/1 Unit
13	Kebun Tebu	Kebun Tebu	1/0 Unit
14	Batu Ketulis	Batu Ketulis	1/1 Unit
15	Air Hitam	Air Hitam	1/1 Unit

e. Rumah Sakit

Di Kabupaten Lampung Barat terdapat 1 Unit Rumah Sakit Umum Daerah dan 1Unit Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak milik swasta. Adapun Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki adalah RSUD Alimuddin Umar yang berlokasi di ibukota kabupaten yakni kecamatan Balik Bukit. RSUD ini adalah RSUD Type C dengan kapasitas 130 tempat tidur. RSUD Alimuddin Umar saat ini merupakan rumah sakit rujukan yang menerima rujukan tidak hanya dari Kabupaten Lampung Barat saja namun juga dari Kabupaten Pesisir Barat dan juga Kabupaten OKU Selatan Propinsi Sumatera Selatan.

Lokasi RSUD Alimuddin Umar yang secara geografis saat ini berada di ujung Kabupaten disebabkan karena dahulu wilayah kerja Kabupaten Lampung Barat meliputi Kecamatan Sumber Jaya hingga Kecamatan Bengkunt Belimbing dan Kecamatan Lemong yang berada di sepanjang pesisir barat. Adapun Liwa merupakan daerah dengan lokasi berada ditengah Kabupaten. Namun setelah pemekaran wilayah pesisir barat menjadi Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2012 maka menjadikan posisi Liwa sebagai ibukota kabupaten berada di ujung barat Kabupaten Lampung Barat. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat yang berada di wilayah kecamatan Sumber Jaya, Kebun Tebu, Air Hitam, Sekincau, Way Tenong dan sekitarnya lebih memilih pelayanan Kesehatan rujukan di Kabupaten Lampung Utara dan Way Kanan yang secara geografis lebih dekat.

Tabel II.3

BOR, LOS, TOI & AVLOS RSUD Alimuddin Umar Tahun 2022- 2025

No	Indikator	Capaian Tahun			
		2022	2023	2024	2025 (tw 1)
1	BOR (%)	29,5	39,3	46,2	39
2	AVLOS	4	4	3	3
3	BTO	35	33	35	14
4	TOI	7	6,6	4,8	6

2.2 Sumber Daya Manusia Kesehatan

Rasio jumlah tenaga kesehatan tersebut dibanding dengan jumlah penduduk masih relatif rendah. Jenis tenaga kesehatan yang bekerja di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah bidan berjumlah 559 orang, jumlah perawat sebanyak 430 orang dan perawat gigi sebanyak 24 orang.

Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan merupakan salah satu target utama pemerintah dari tingkat nasional hingga tingkat daerah kabupaten. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan bidang kesehatan, maka kualitas pelayanan kesehatan merupakan faktor utama yang harus selalu diprioritaskan. Sementara itu baik/buruknya kualitas pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di wilayah tersebut. Hingga Tahun 2025 Kabupaten Lampung Barat memiliki 15 Puskesmas Rawat Inap, dengan 3 (tiga) diantaranya adalah Puskesmas PONED dan 4 Klinik Swasta.

Tabel II-4.
Jumlah Sarana Kesehatan Primer Terakreditasi Tahun 2025

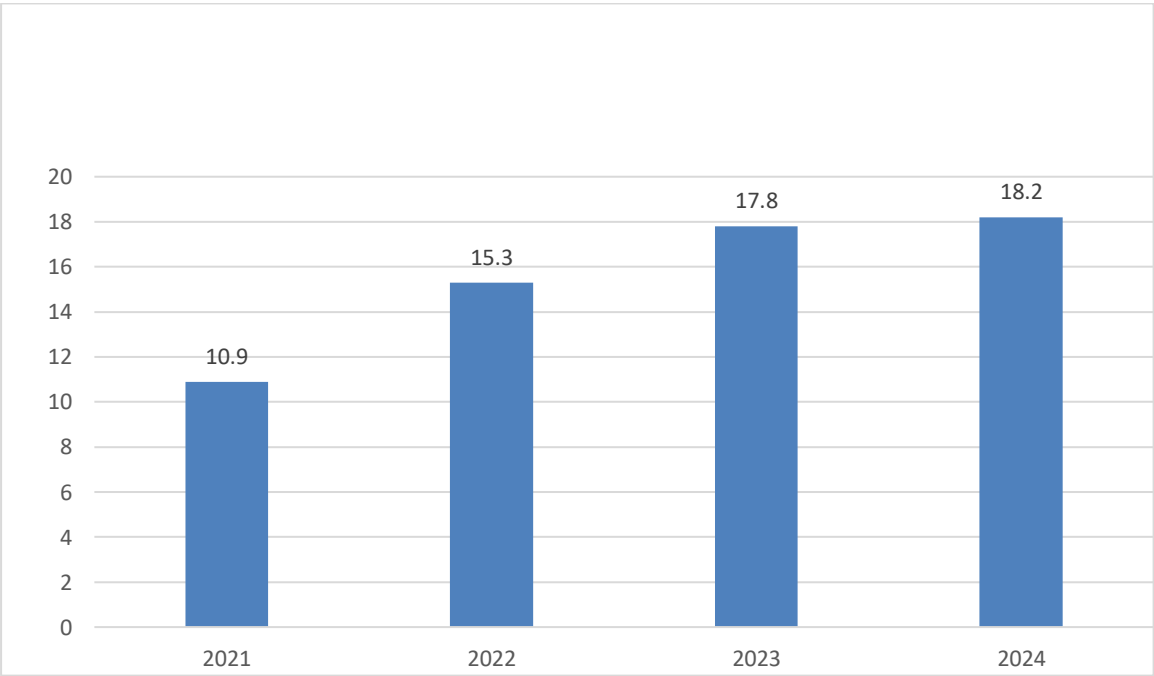
No	Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah	Status Akreditasi		
			Madya	Utama	Paripurna
1	Puskesmas Rawat Inap	15	-	2	13
2	Puskesmas PONED	3	-	-	-
3	Klinik Pemerintah	2	1	1	-
4	Klinik Swasta	7	2	2	-

a. Dokter

Untuk tenaga dokter umum, jumlah seluruhnya 56 orang. Dari jumlah tersebut 12 orang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar, 3 Orang bertugas di RSIA Bunda dan 38 orang bertugas di puskesmas serta 5 orang dokter klinik. Merujuk kepada standar WHO, rasio dokter yang ideal adalah 1:1.000 (satu orang dokter melayani 1000 orang penduduk), sehingga Indonesia masih kekurangan 160.265 dokter umum berdasarkan data Kemenkes per 5 Februari 2024. Rasio dokter umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 per 100.000 penduduk (313.756 jiwa) adalah sebesar 18,2 : 100.000 penduduk.

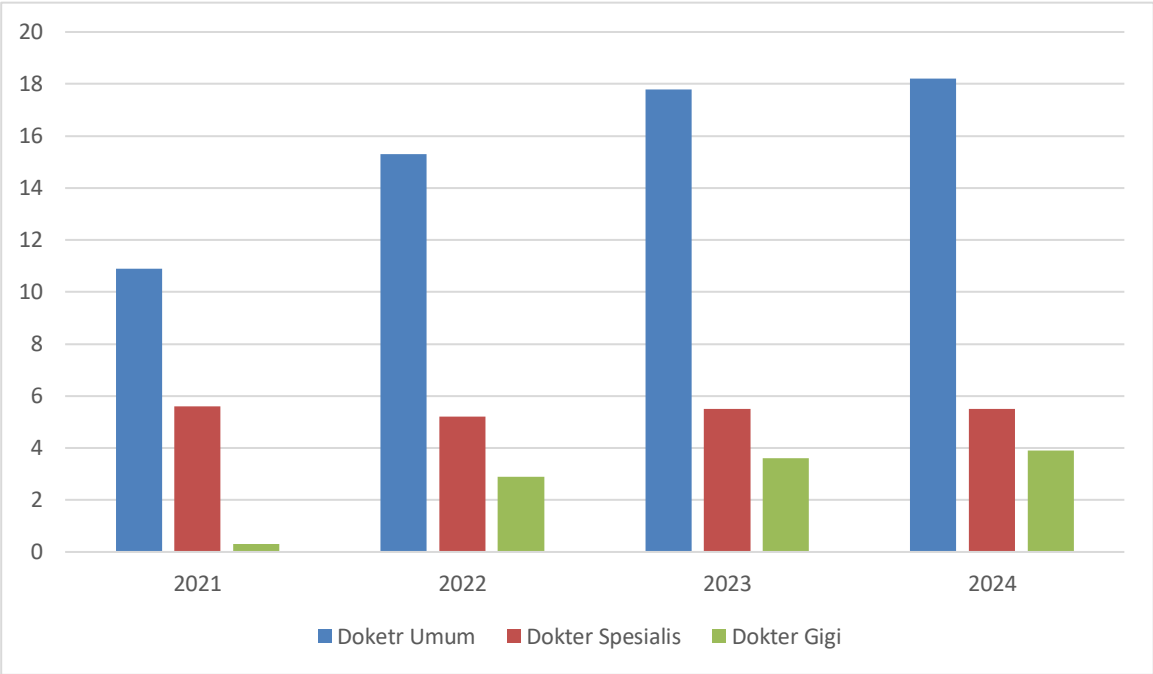
Rasio dokter per satuan penduduk adalah perbandingan antara jumlah dokter per seribu penduduk. Jumlah dokter di Kabupaten Lampung Barat mengalami perkembangan yang tidak konsisten sehingga rasio dokter per satuan penduduk berfluktuasi dalam kurun waktu 2018 hingga 2021. Pada Tahun 2018 rasionya tercatat 11,07 : 100.000 penduduk, Tahun 2019 naik menjadi 11,1 : 100.000 penduduk, Tahun 2020 juga pada 11,1 : 100 000 . Penduduk , dan Tahun 2021 rasio dokter umum per satuan penduduk adalah 15,3 : 100. 000 penduduk

Grafik II-1.
Perkembangan Rasio Dokter per Satuan penduduk
Tahun2021 - 2024



Rasio tenaga medis adalah jumlah perbandingan antara jumlah tenaga medis terhadap 1000 penduduk. Rasio ini mengukur tingkat ketersediaan tenaga kesehatan (dokter, bidan, dan perawat) yang melayani kelompok masyarakat.

Grafik II-2. Perkembangan Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Tahun 2021-2024 Kabupaten Lampung Barat



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa rasio tenaga medis persatuan penduduk Tahun 2018 sampai dengan 2021 terus mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena adanya berbagai program pemenuhan sumber daya manusia Kesehatan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat. Dari pemerintah pusat terdapat program Nusantara Sehat baik individu maupun tim. Sementara dari pemerintah daerah terdapat program tenaga kontrak/PTT baik melalui pembiayaan DAK Non Fisik, DAU maupun sumber dana lainnya. Di RSUD Alimuddin Umar juga terdapat penambahan tenaga Kesehatan melalui program PGDS yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan tenaga medis lain yang bersumber dana BLUD RSUD Alimuddin Umar dan APBD Kabupaten. Hal tersebut menyebabkan rasio tenaga medis terus mengalami peningkatan.

b. Bidan

Jumlah seluruh bidan di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 sebanyak 559 orang yang terbagi menjadi beberapa tempat bertugas dimana 481 bidan bertugas di Puskesmas dan bidan desa, klinik/sarana kesehatan lain 8 bidan, dan yang bertugas di Rumah Sakit sebanyak 128 Bidan. Target rasio bidan per 100.000 penduduk

yang yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 165 per 100.000 penduduk. Berdasarkan hal tersebut di Kabupaten Lampung Barat minimal memiliki jumlah bidan sebanyak 559 orang. Rasio bidan di Kabupaten Lampung Barat terhadap penduduk 181,4 : 100.000 Jiwa.

c. Perawat

Jumlah seluruh perawat di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 sebanyak 430 orang. Rasio perawat yang ideal di Indonesia adalah sekitar 2 perawat per 1000 penduduk. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kebutuhan tenaga perawat di Indonesia adalah 2 perawat per 1000 penduduk. WHO (World Health Organization) merekomendasikan rasio 50 perawat per 10.000 penduduk. Berdasarkan hal tersebut di Kabupaten Lampung Barat minimal memiliki jumlah perawat sebanyak 430 orang. Rasio perawat yang ada di Kabupaten Lampung Barat terhadap penduduk telah mencapai 139,5 : 100.000 Jiwa.

d. Tenaga Gizi

Jumlah ahli gizi di Kabupaten Lampung Barat seluruhnya 24 orang dari target yang seharusnya pada tahun 2024 sebanyak 88 orang. Rasio ideal tenaga gizi di Indonesia yang direkomendasikan oleh World Health Organization (WHO) adalah 1 tenaga gizi per 1.000 penduduk. Saat ini, rasio tenaga gizi di Indonesia masih belum mencapai target ideal tersebut, yaitu sekitar 56 per 100.000 penduduk. Rasio tenaga gizi di Kabupaten Lampung Barat per 100.000 penduduk baru tercapai 7,8.

e. Sanitarian

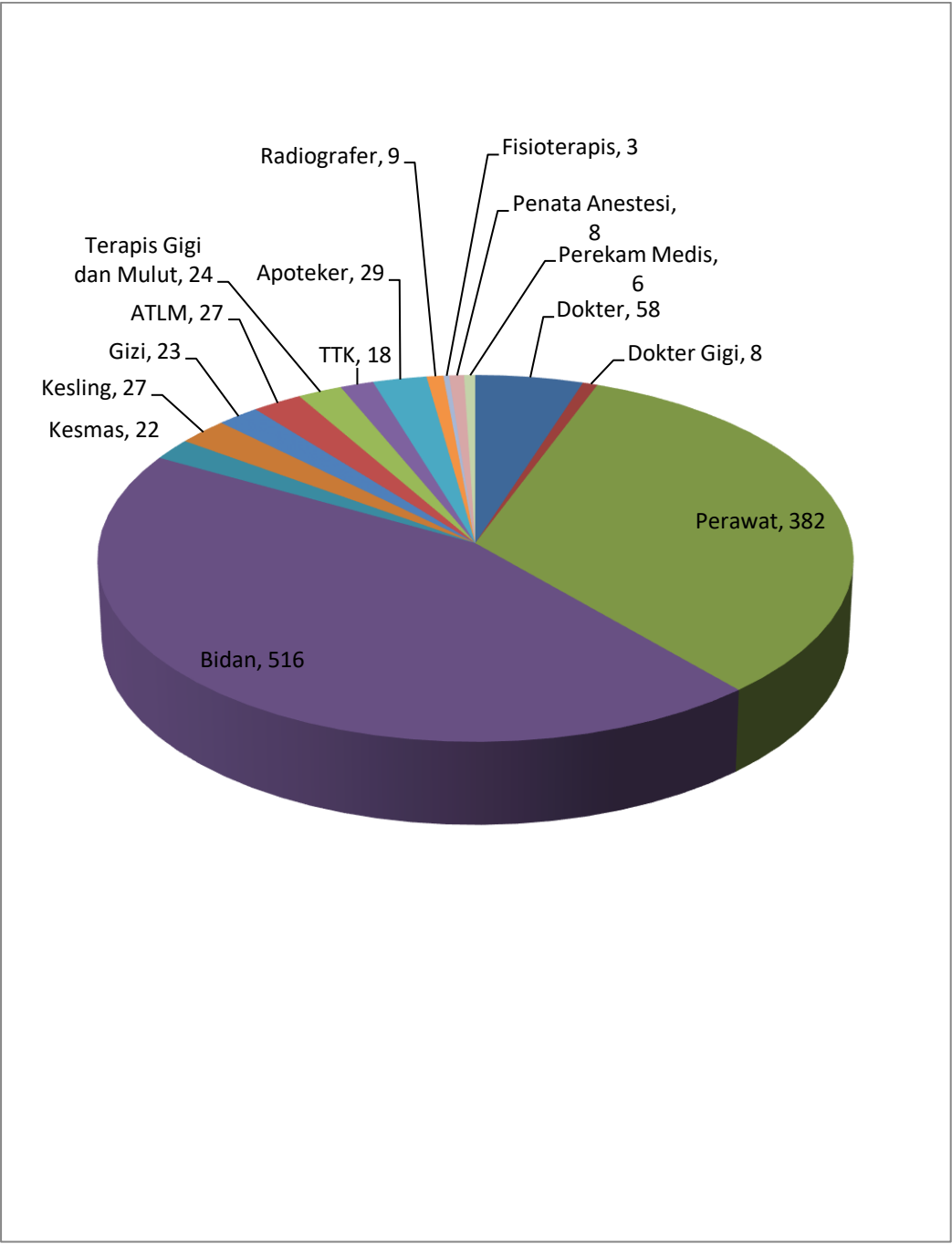
Tenaga sanitarian atau kesehatan lingkungan di Kabupaten Lampung Barat berjumlah 2 orang pada tahun 2024. Rasio ideal tenaga sanitasi lingkungan di Indonesia yang ideal adalah 35 per 100.000 penduduk. Rasio ini berarti, idealnya setiap 100.000 penduduk di Indonesia dilayani oleh 35 tenaga sanitarian. Namun, dalam kenyataannya, jumlah tenaga sanitarian di Indonesia saat ini sekitar 4,15 per 100.000 penduduk, jauh di bawah target 35 per 100.000 penduduk. Rasio sanitarian per 100.000 penduduk di Kabupaten

Lampung Barat baru tercapai 7,8.

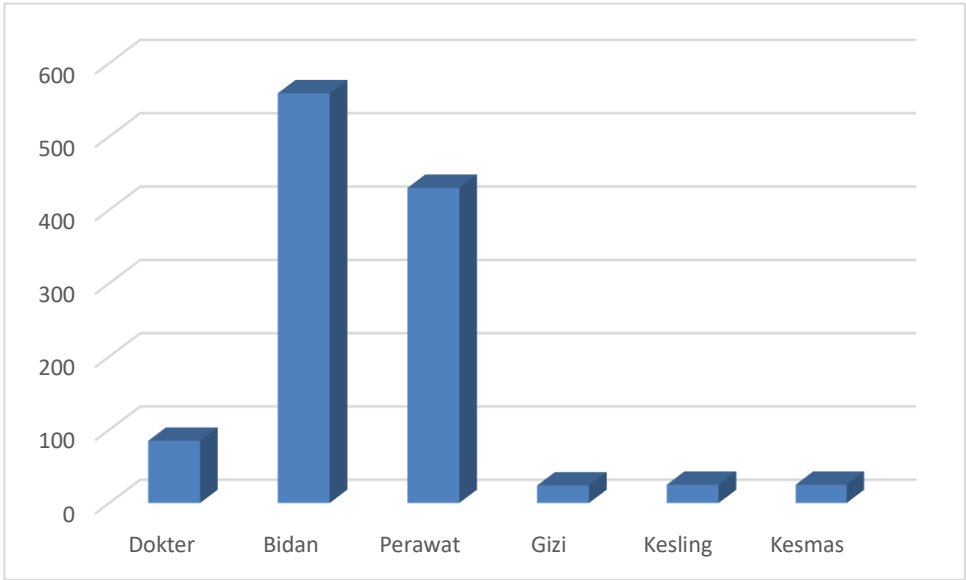
Tenaga ahli kesehatan masyarakat pada tahun 2024 adalah 25 orang (8,1: 100.000 Jiwa).

Jumlah tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga sanitasi, perawat dan bidan sudah termasuk yang bertugas di Rumah Sakit.

Grafik II.3. Proporsi Tenaga Kesehatan di Puskesmas & Rumah Sakit Tahun 2024



Grafik II-4. Rasio dr. Umum, dr Gigi, perawat, dan Bidan terhadap 100.000 Penduduk
Di Kabupaten Lampung Barat Tahun2024



Berdasarkan persebarannya di Puskesmas, jumlah tenaga kesehatan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II.5 Distribusi tenaga kesehatan berdasarkan Unit KerjaTahun 2024

NO	UNIT KERJA	Dokter Spesialis	Dokter	Dokter Gigi	Dokter Spesialis	Perawat	Bidan	Kesm as	Kesling
1	RSUD Alimuddin Umar	17	12	1	17	115	41	1	4
2	RSIA Bunda	1	3	0	1	13	29	0	1
5	Liwa		2	1		25	35	2	2
3	Buay Nyerupa		2	1		19	25	2	1
4	Lombok		2	1		14	23	1	0
6	Kenali		3	1		17	23	1	1
7	Sekincau		2	1		15	26	1	1
8	Srimulyo		2	0		17	28	3	1
9	Batu Brak		2	0		23	28	2	3
10	Pagar Dewa		2	0		17	18	1	0
11	Bandar Negeri Suoh		2	1		18	29	1	2
12	Sumber Jaya		3	1		24	33	3	0
13	Fajar Bulan		3	1		24	60	1	2
14	Gedung Surian		3	1		30	23	0	2
15	Batu Ketulis		3	1		16	26	3	2
16	Kebun Tebu		4	1		22	28	1	1
17	Air Hitam		3	0		18	31	1	2
18	Klinik Mitra Sehat		1	0		0	1	0	0
19	Klinik Kodim 0422		0	0		0		0	0
20	Klinik Bhayangkara Polres		0	0		3		0	0
21	Klinik Rawat Inap Pratama H. Amir		1	0		1		0	0
22	Klinik Asshafa		1	0		2	2	0	0
23	Klinik Ar Rahman		0	0		0	1	0	0
24	Klinik Bumi Andalas		1	0		2	2	0	0
25	Klinik Aceh Medika		1	0		2	1	0	0
26	Klinik Rawat Inap Pratama SMC		0	0		0	3	0	0
JUMLAH TOTAL SE-KABUPATEN		14	58	12	18	437	559	24	25

NO	UNIT KERJA	Gizi	ATLM	Radiog rafer	Fisiot erapi s	Terapis Gigi dan Mulut	Penata Anestes i	Perekam Medis	TT K	Apote ker
1	RSUD Alimuddin Umar	3	13	8	3	2	7	2	8	5
2	RSIA Bunda	0	0	0	0	0	1	1	1	1
5	Liwa	1	3	1		1		0	2	1
3	Buay Nyerupa	1	1	0		2		1	1	1
4	Lombok	1	0	0		1		0	0	1
6	Kenali	2	1	0		2		0	0	1
7	Sekincau	2	1	0		0		1	1	1

8	Srimulyo	1	1	0		1		0	0	1
9	Batu Brak	1	2	0		3		0	1	1
10	Pagar Dewa	1	1	0		0		0	0	1
11	Bandar Negeri Suoh	1	1	0		0		0	0	1
12	Sumber Jaya	2	2	0		1		0	0	2
13	Fajar Bulan	1	1	0		3		1	0	2
14	Gedung Surian	1	2	0		2		0	0	0
15	Batu Ketulis	3	2	0		2		0	1	1
16	Kebun Tebu	1	2	0		3		0	0	1
17	Air Hitam	1	2	0		1		0	0	1
18	Klinik Mitra Sehat	0	0						0	1
19	Klinik Kodim 0422	0	0						0	0
20	Klinik Bhayangkara Polres	0	0						0	0
21	Klinik Rawat Inap Pratama H. Amir	0	0						0	0
22	Klinik Asshafa	1	0						0	1
23	Klinik Ar Rahman	0	0						0	0
24	Klinik Bumi Andalas	1	0						0	1
25	Klinik Aceh Medika	0	0						1	1
26	Klinik Rawat Inap Pratama SMC	0	0						0	0
JUMLAH TOTAL SE-KABUPATEN		25	35	9	3	24	8	6	16	26

Tabel II.6 Trend Alokasi Anggaran Bidang Kesehatan

No	Tahun	Total APBD	Bidang Kesehatan	%
1	2022	1.112.536.131.046	198.288.992.350	17,8
2	2023	980.339.061.161	151.553.511.733	19,16
3	2024	1.096.792.411.919	154.793.123.887	18,27
4	2025	1.052.559.646.322	198.826.445.677	18,89
5	2026	Apbd Blm di tetapkan	Apbd belum di tetapkan	

Proporsi pembiayaan kesehatan dalam 5 (lima) tahun terakhir tampak bervariasi trendnya yakni terendah sebesar 17,8% pada tahun 2022 dan tertinggi pada tahun 2023 sebesar 19,16%. Besaran pembiayaan Kesehatan ini juga sangat dipengaruhi oleh alokasi Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan.

Tabel T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Lampung Barat

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke (milyar)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke (milyar)					Rasio antara Anggaran dan Realisasi (%)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 (TW I)	2021	2022	2023	2024	2025
APBD	110		151	154	198	93,7		145	116,7	25,4	85,6	17,8	19,16	18,27	18,89

Dari table diatas tampak bahwa rasio antara anggaran dan realisasi pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berfluktuasi setiap tahunnya. Namu dapat dicermati realisasi dibawah 93,7% terjadi pada tahun 2021 dan tahun 2025 dimana pada saat tersebut semua kegiatan sedang dalam proses. Khusus pada tahun 2021 rendahnya realisasi anggaran dipengaruhi paling besar oleh realisasi anggaran pada belanja insentif tenaga Kesehatan. Turunnya kasus covid 19 serta berubahnya petunjuk tekhnis tata cara pemberian insentif tenaga Kesehatan yang menangani Covid 19 menjadi factor utama tidak terserapnya anggaran.

e

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Tabel 2.3.1 Target dan Realisasi Indikator Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
			2025	2026	2027	2028	2029	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Terwujudnya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,23	74,37	74,50	74,64	74,77	67,65	67,84	67,84	68,00	68,25
		Angka Kematian Ibu/100.000 KH		95	94	93	92	141	36,1	38,4	114	

Tabel 2.3.2 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Strategis Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi				
			2025	2026	2027	2028	2029	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu/100.000 KH	149	95	94	93	92	141	36,1	38,4	114	
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	4,7	12,5	12	11,5	10,9	5,57	1,97	5,29	1,87	
		Angka Kematian Bayi	30	3,5	3,4	3,3	3,2	4,5	1,4	2,3	2,29	
		TSR TB (%)	90	90	90	90	78	-	-	-	-	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83	83	84	85	86				82,09	

Pada Renstra Dinas Kesehatan Periode Tahun 2025-2029 telah ditetapkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan. Tujuan Renstra Dinas Kesehatan periode tahun 2025-2029 adalah Terwujudnya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator Usia Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Ibu/100.000 Kelahiran Hidup,

Pada pencapaian Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025, capaian indikator tujuan bervariasi dimana beberapa indikator dapat mencapai target dan beberapa lainnya belum mencapai target. Namun dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 terdapat 2 indikator tujuan yang belum mencapai target yakni indikator AKI dan IKM. Tidak tercapainya indikator tersebut disebabkan antara lain adalah meningkatnya kasus kematian ibu dan menurunnya kualitas pelayanan baik di puskesmas maupun rumah sakit.

Untuk Sasaran Renstra Dinas Kesehatan periode tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dengan indikator Angka Kematian Ibu/100.000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Bayi/1.000 Kelahiran Hidup, Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek), Persentase TSR TBC Paru dan Indeks Kepuasan Masyarakat

Capaian indikator pada Sasaran Renstra Dinas Kesehatan periode tahun 2023-2026 ini juga mengalami trend yang bervariasi. Untuk Indikator Angka kematian Ibu dan Indeks Kepuasan Masyarakat, capaian pada awal tahun pelaksanaan renstra belum dapat diukur karena baru muncul setelah dilakukan review Renstra pada tahun 2026.

Pada indikator Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi yang semula tampak terjadi penurunan kasus yang cukup baik, tiba-tiba pada tahun 2020 terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil Audit Maternal Perinatal atas kasus yang terjadi adalah karena faktor 3 (tiga) terlambat, yakni terlambat mengambil keputusan, terlambat sampai ditempat rujukan dan terlambat mendapatkan penanganan karena keterbatasan sumber daya yang diperparah dengan pandemi Covid 19 dimana pada tahun 2021 terjadi lonjakan kasus covid 19. Lonjakan kasus covid 19 selain menghambat penanganan pasien karena keterbatasan tempat tidur rumah sakit (3 kasus ibu hamil tidak bisa mendapatkan pelayanan rujukan di RS karena keterbatasan tempat tidur di ruang isolasi RS) juga karena berkurangnya kegiatan-kegiatan luar Gedung sebagai upaya deteksi dini resiko tinggi pada ibu hamil dan bayi baru lahir

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan terdapat tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat antara lain :
Tantangan (Threat/T):

1. Kondisi geografis pada sebagian wilayah menjadi satu kendala yang berkaitan dengan akses pelayanan kesehatan.
2. Distribusi penduduk tidak merata.
3. Tingkat Sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah, dimana tingginya angka kemiskinan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.
4. Masih rendahnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.

Peluang (Opportunity/O):

1. Dukungan dari pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Adanya kerjasama dengan lintas sektor.
3. Adanya instansi yang mendukung program Dinas Kesehatan.
4. Adanya UKBM dan kader kesehatan di masyarakat.
5. Meningkatnya jumlah sarana kesehatan swasta di Kabupaten Lampung Barat.

II.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Serta Isu Strategis di Dinas Kesehatan

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan kesehatan di daerah.

Sementara faktor penghambat tidak tercapainya program telah diidentifikasi sebagai berikut :

- 1. Adanya keterbatasan sumber daya kesehatan, terutama tenaga pelaksana medis, tenaga penunjang medis
- 2. Keterbatasan rekrutmen tenaga untuk memenuhi kebutuhan
- 3. Keterbatasan anggaran pendukung pelaksanaan program sehingga rencana, penetapan prioritas dan pelaksanaan kegiatan harus efektif dan efisien.
- 4. Akses pelayanan terhadap masyarakat yang harus terus diperbaiki.
- 5. Dukungan sistem informasi komunikasi yang belum merata di seluruh wilayah kabupaten.

Tabel II.1.
Pemetaan untuk penentuan prioritas dan sasaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pelaksanaan upaya pelayanan Kesehatan	1. Rendahnya Fasyankes yang memenuhi standar ketenagaan 2. Belum tercapainya indikator standar pelayanan minimal	1. Kurang maksimalnya peran puskesmas dalam pembangunan kesehatan 2. Kurangnya ketersediaan tenaga, sarana prasana, obat dan perbekes penunjang pelayanan sesuai Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas 3. Kurangnya jumlah dan distribusi tenaga kesehatan

2	Kurangnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan	Masih kurangnya kelengkapan sarana, prasarana, obat dan perbekes penunjang pelayanan pada unit pelayanan	1. Penatalaksanaan program belum maksimal 2. Dukungan kegiatan penalaksanaan program belum maksimal 3. Kemampuan managerial dan distribusi personal pengelola program belummaksimal
3	Belum optimalnya kondisi kesehatan lingkungan dan PHBS	Belum tercapainya indikator keluarga ber PHBS	1. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan belum optimal dan berkesinambungan 2. Koodinasi dan dukungan dari sektor terkait
4	Belum seluruh penduduk tercover Program JKN	Cakupan kepesertaan JKN	1. Terbatasnya kemampuan pemerintah untuk mencover seluruh penduduk sebagai peserta JKN 2. Dinamisnya peraturan tentang 3. pelaksanaan program JKN pada tataran pelayanan kesehatan

II.2.1 Kegiatan Prioritas Utama (Prioritas 4) RPJMN 2025-2029

di bidang kesehatan antara lain:

- 1) Penurunan kematian ibu dan Anak;
- 2) Pencegahan dan Penurunan Stunting;
- 3) Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis;
- 4) Penuntasan TBC,
- 5) Pemberian Makanan Bergizi Untuk Siswa, Santri, dan Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita
- 6) Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi
- 7) Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis
- 8) Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
- 9) Pembangunan RS Lengkap berkualitas di Kabupaten Kota dan pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan daerah Sulit Akses
- 10)Produksi dan pendayagunaan SDM Kesehatan

II.2.2.Isu Strategis pada RPJMN Bidang Kesehatan Tahun 2025-2029 adalah :

- 1) Disparitas Sumber Daya Manusia
- 2) Masih tingginya angka prevalensi Stunting

Kondisi Umum Sektor Kesehatan

(1) Upaya Kesehatan Kesehatan Ibu dan Anak

Dalam 5 tahun terakhir (2021 - 2024) jumlah Angka kematian ibu mengalami fluktuasi, pada tahun 2021 terjadi 5 kasus kematian ibu atau Angka Kematian Ibu 88,7/100.000 KH, kemudian pada tahun 2019 51,8/100.000 KH dan tahun 2020 sebanyak 3 kasus atau 72,1/100.000 KH. Namun pada tahun 2021 kematian ibu melonjak menjadi 8 kasus atau 145/100.000 KH. Lonjakan kasus kematian ibu disebabkan karena kasus covid 19 (3 kasus). kematian ibu disebabkan karena penyakit jantung, eklamsi, inversio, perdarahan dan infeksi nifas. Hal-hal yang berpotensi timbul sebagai tantangan dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak antara lain kematian yang terjadi akibat dari 3 keterlambatan: terlambat mengambil keputusan, terlambat untuk mencapai fasilitas kesehatan, dan terlambat

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan kesehatan ibu yang berdampak pada meningkatnya kasus kematian ibu yaitu :

- a. Kematian yang terjadi akibat dari 3 keterlambatan: terlambat mengambil keputusan, terlambat untuk mencapai fasilitas kesehatan, dan terlambat untuk mendapatkan penanganan.
- b. Adat budaya yang masih melekat di masyarakat sehingga menghambat upaya promotif dan preventif yang berakibat masih kurangnya masyarakat memahami masalah kesehatan di lingkungannya.
- c. Masih terjadi disparitas akses pelayanan kesehatan ibu antara kabupaten dan provinsi terkait dengan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan yang ditempatkan di daerah.

- d. Keterbatasan kepemilikan jaminan kesehatan pada ibu hamil dengan alasan pendanaan.
- e. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu dan bayinya.

Faktor-faktor yang berkontribusi untuk menurunkan kasus kematian ibu :

- a. Adanya kegiatan kemitraan bidan dan dukun yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan.
- b. Adanya pendanaan APBD untuk masyarakat miskin di luar kuota.
- c. Perekrutan tenaga bidan melalui pengangkatan PNS ataupun melalui program Bidan PTT merupakan pendukung keberhasilan program, dengan adanya tenaga bidan yang terdistribusi sampai dengan di daerah sulit menjadikan pemberian pelayanan kesehatan dalam hal ini untuk ibu hamil/bersalin jadi lebih mudah terjangkau.
- d. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga bidan.
- e. Meningkatnya komitmen pemerintah baik daerah maupun pusat terhadap program kesehatan ibu dan anak, antara lain melalui program BOK dan adanya dana Jampersal yang khusus digunakan untuk pemberian akses bagi ibu hamil yang akan melakukan persalinan.
- f. Penyediaan Rumah Tinggal Kelahiran bagi Ibu Hamil yang rumah tinggalnya jauh dari faskes.
- g. Kabupaten Lampung Barat saat ini memiliki 1 rumah sakit khusus ibu dan anak (RSIA Bunda).

Kematian Bayi dan Balita

Jika dibandingkan terhadap target Angka Kematian Bayi yang ditetapkan sampai dengan tahun 2021 yaitu AKB 4,5/1000 Kelahiran Hidup. AKB Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 sebesar 25 kasus, pada tahun 2022 sebesar 8 kasus atau 1,4/1000 KH. Kasus kematian bayi mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dan terbanyak pada periode neonatal (0-28 hari). Angka kematian neonatal sebanyak 2,3/1000 KH di tahun 2023, mengalami kenaikan kasus kematian bayi sebanyak 12 kasus, kemudian pada tahun 2024 sebanyak 2,29/1000 KH

Penyebab kematian secara umum oleh 2 faktor utama yaitu asfiksia dan kelainan kongenital. Hal tersebut harus menjadi perhatian khusus karena umumnya kelainan kongenital pada periode kehamilan disebabkan karena kurang berkualitasnya pelayanan Antenatal Care

Gizi Masyarakat dan Stunting

Kasus gizi buruk mengalami penurunan jumlah kasus, pada tahun 2021 dan 2019 berturut - turut sebanyak 5 dan 7 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 2 kasus dan 1 kasus gizi terjadi pada tahun 2021. Penyebab utama adalah adanya penyakit penyerta seperti gangguan jantung, kelainan hati dan organ vital lainnya. Upaya rutin yang dilakukan selama ini adalah dengan dilaksanakannya kegiatan pelacakan kasus gizi buruk dan melakukan perawatan terhadap balita dengan gizi buruk. Prevalensi BB kurang juga menjadi indikator yang terus dipantau dengan target <15%, sampai dengan tahun 2021, persentase capaian adalah sebesar 5,12%. Pemantauan status gizi pada ibu hamil dilakukan dengan menghitung prevalensi bumil KEK dengan target <10% dan sampai dengan tahun 2021 prevalensi bumil KEK masih di bawah target maksimal yaitu 5.37%. Penimbangan balita (D/S) adalah salah satu indikator penting dalam deteksi dini kasus gizi kurang dan gizi buruk, capaian indikator D/S sebesar 46,50%, angkaini masih di bawah target yaitu 7%, peran serta masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam upaya peningkatan status D/S. Adapun kasus Stunting yang dicatat berdasarkan hasil SSGI adalah 22,3 % pada tahun 2019 dan 22,7% pada tahun 2021. Persentase kasus balita stunting tersebut diatas target nasional yakni maksimal 21,1 %. Namun berdasarkan hasil EPPGBM persentase balita stunting di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 hanya 10,94%.

Penyakit Menular

Untuk penyakit menular masih difokuskan pada penyakit tuberculosi (TB), demam berdarah, dan malaria. Pada periode 2018 - 2021, cakupan penemuan dan penanganan kasus TBC BTA (+) ditetapkan sebesar 71%. Sampai dengan tahun 2021 capaian CDR kabupaten sebesar 41,5%, capaian ini lebih rendah ini disebabkan estimasi

penemuan penderita sebesar 160/100.000 penduduk karena sampel untuk penetapan jumlah sasaran diambil di wilayah perkotaan.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sebesar 100%, capaian cakupan sepanjang tahun 2018-2021 adalah 100%, dengan semua kasus yang ditemukan berhasil ditangani.

Untuk kasus Malaria, pengukuran keberhasilan program dilakukan dengan perhitungan *Annual Parasite Incidence* (API) <1 per mil penduduk, pada tahun 2021 capaian di bawah target maksimal yaitu 0.096 per mil penduduk.

Penyakit Tidak Menular

Kecenderungan penyakit menular terus meningkat dan telah mengancam sejak usia muda. Indonesia sedang mengalami *double burden* penyakit, dimana selama dua dekade terakhir ini, telah terjadi transisi epidemiologis yang signifikan, penyakit tidak menular telah menjadi beban utama, meskipun beban penyakit menular masih berat juga. Penyakit tidak menular meliputi hipertensi, diabetes melitus, kanker dan Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK). Penyakit tidak menular sangat berkaitan dengan pola hidup masyarakat yang mengalami perubahan, banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki faktor resiko terhadap suatu penyakit tidak menular (PTM) bahkan ketika mereka sudah menderita penyakit tersebut. Pencegahan dan pengendalian harus dilakukan, upaya yang dibutuhkan antara lain dengan deteksi dini PTM, program yang berkaitan dengan upaya pengendalian dan pencegahan yaitu dengan menjalankan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM. Saat ini tercatat sebanyak 67 posbindu yang berada di Kabupaten Lampung Barat.

Penyehatan Lingkungan

Upaya penyehatan lingkungan menunjukkan peningkatan. Cakupan pekon yang dengan kategori ODF pada tahun 2021 di Kabupaten Lampung Barat sudah mencapai 100%. ODF merupakan pilar pertama dari program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat atau STBM yang menjadi indikator utama Penyehatan Lingkungan. Adapun pilar 2-5 saat ini masih dilaksanakan secara bertahap.

Tabel II.2
Capaian 2 Pilar Kesehatan Lingkungan Tahun 2024

No	Puskesmas	Nama Kelurahan	Jml KK	Baseline		Progres	
				CTPS	Tidak CTPS	CTPS	Tidak CTPS
1	Air Hitam	Gunung Terang	516	325	191	516	0
2	Air Hitam	Manggarai	229	150	79	229	0
3	Air Hitam	Rigis Jaya	202	179	23	202	0
4	Air Hitam	Semarang Jaya	684	449	235	684	0
5	Air Hitam	Sidodadi	165	102	63	165	0
6	Air Hitam	Sinar Jaya	337	150	187	337	0
7	Air Hitam	Sri Menanti	235	175	60	235	0
8	Air Hitam	Suka Damai	164	120	44	164	0
9	Air Hitam	Suka Jadi	288	238	50	288	0
10	Air Hitam	Sumber Alam	465	293	172	465	0
11	Batu Brak	Canggu	319	185	134	241	78
12	Batu Brak	Gunung Sugih	161	99	62	131	30
13	Batu Brak	Kegeringan	389	205	184	347	42
14	Batu Brak	Kembahang	577	363	214	497	80
15	Batu Brak	Kerang	158	78	80	135	23
16	Batu Brak	Kota Besi	731	496	235	603	128
17	Batu Brak	Negeri Ratu	395	175	220	327	68
18	Batu Brak	Pekon Balak	376	228	148	352	24
19	Batu Brak	Sukabumi	450	269	181	408	42
20	Batu Brak	Sukaraja	148	103	45	134	14
21	Batu Brak	Teba Liyokh	168	97	71	149	19
22	Batu Ketulis	Argomulyo	629	47	582	351	278
23	Batu Ketulis	Atar Bawang	336	72	264	257	79
24	Batu Ketulis	Atar Kuwau	369	193	176	185	184
25	Batu Ketulis	Bakhu	726	153	573	473	253
26	Batu Ketulis	Batu Kebayan	377	199	178	209	168
27	Batu Ketulis	Campang Tiga	428	20	408	339	89
28	Batu Ketulis	Kubu Liku Jaya	417	32	385	308	109
29	Batu Ketulis	Luas	699	151	548	578	121
30	Batu Ketulis	Sumber Rejo	243	29	214	158	85
31	Batu Ketulis	Way Ngison	306	50	256	264	42
32	Bandar Negeri Suoh	Bandar Agung	2.257	1037	1220	2.053	204
33	Bandar Negeri Suoh	Bumi Hantatai	803	332	471	698	105
34	Bandar Negeri Suoh	Gunung Ratu	528	196	332	422	106
35	Bandar Negeri Suoh	Negeri Jaya	412	171	241	379	33
36	Bandar Negeri Suoh	Ringin Jaya	378	167	211	302	76
37	Bandar Negeri Suoh	Srimulyo	551	208	343	512	39
38	Bandar Negeri Suoh	Suoh	1.271	452	819	1.159	112
39	Bandar Negeri Suoh	Tanjung Sari	376	175	201	307	69
40	Bandar Negeri Suoh	Tembelang	270	73	197	226	44
41	Bandar Negeri Suoh	Tri Mekar Jaya	752	333	419	691	61
42	Buay Nyerupa	Bandar Baru	388	0	388	0	388
43	Buay Nyerupa	Buay Nyerupa	809	0	809	0	809
44	Buay Nyerupa	Bumi Jaya	258	0	258	0	258
45	Buay Nyerupa	Hanakau	1008	0	1008	0	1008
46	Buay Nyerupa	Jaga Raga	348	0	348	0	39348

No	Puskesmas	Nama Kelurahan	Jml KK	Baseline		Progres	
				CTPS	Tidak CTPS	CTPS	Tidak CTPS
47	Buay Nyerupa	Pagar Dewa	893	0	893	0	893
48	Buay Nyerupa	Suka Mulya	350	0	350	0	350
49	Buay Nyerupa	Tanjung Raya	1418	0	1418	0	1418
50	Buay Nyerupa	Tapak Siring	521	0	521	0	521
51	Buay Nyerupa	Teba Pering Raya	320	0	320	0	320
52	Fajar Bulan	Fajar Bulan	2639	1001	1638	1820	819
53	Fajar Bulan	Karang Agung	735	159	576	497	238
54	Fajar Bulan	Mutar Alam	910	316	594	650	260
55	Fajar Bulan	Padang Tambak	1059	237	822	755	304
56	Fajar Bulan	Pura Laksana	1169	422	747	795	374
57	Fajar Bulan	Sukananti	1288	395	893	1026	262
58	Fajar Bulan	Sukaraja	956	286	670	621	335
59	Fajar Bulan	Tambak Jaya	850	205	645	608	242
60	Fajar Bulan	Tanjung Raya	604	186	418	481	123
61	Gedung Surian	Cipta Waras	684	222	462	340	344
62	Gedung Surian	Gedung Surian	835	297	538	567	268
63	Gedung Surian	Mekar Jaya	1014	306	708	579	435
64	Gedung Surian	Pura Mekar	1200	361	839	621	579
65	Gedung Surian	Tri Mulyo	989	437	552	684	305
66	Kebun Tebu	Cipta Mulya	582	0	582	419	163
67	Kebun Tebu	Muara Baru	279	0	279	198	81
68	Kebun Tebu	Muara Jaya I	466	0	466	267	199
69	Kebun Tebu	Muara Jaya li	510	0	510	361	149
70	Kebun Tebu	Pura Jaya	1330	0	1330	1034	296
71	Kebun Tebu	Pura Wiwitan	982	0	982	691	291
72	Kebun Tebu	Sinar Luas	400	0	400	314	86
73	Kebun Tebu	Tribudi Makmur	453	0	453	352	101
74	Kebun Tebu	Tribudi Syukur	669	0	669	485	184
75	Kebun Tebu	Tugu Mulya	598	0	598	383	215
76	Kenali	Bedudu	307	0	307	99	208
77	Kenali	Bumi Agung	215	0	215	80	135
78	Kenali	Hujung	983	0	983	146	837
79	Kenali	Kejadian	250	0	250	56	194
80	Kenali	Kenali	568	0	568	106	462
81	Kenali	Pajar Agung	110	0	110	35	75
82	Kenali	Serungkuk	217	0	217	28	189
83	Kenali	Suka Makmur	241	0	241	30	211
84	Kenali	Sukarami	269	0	269	40	229
85	Kenali	Turgak	303	0	303	103	200
86	Liwa	Bahway	1005	637	368	885	120
87	Liwa	Gunung Sugih	378	216	162	287	91
88	Liwa	Kubu Perahu	539	429	110	449	90
89	Liwa	Padang Cahya	1440	1124	316	1230	210
90	Liwa	Padang Dalom	414	336	78	375	39
91	Liwa	Pasar Liwa	1394	1130	264	1207	187
92	Liwa	Sebarus	806	619	187	714	92
93	Liwa	Sedampah Indah	392	133	259	265	127

No	Puskesmas	Nama Kelurahan	Jml KK	Baseline		Progres	
				CTPS	Tidak CTPS	CTPS	Tidak CTPS
94	Liwa	Sukarame	1017	899	118	941	76
95	Liwa	Watas	578	469	109	486	92
96	Liwa	Way Empulau Ulu	578	504	74	536	42
97	Liwa	Way Mengaku	1600	1508	92	1543	57
98	Lombok	Heni Arong	217	150	67	205	12
99	Lombok	Keagungan	183	115	68	167	16
100	Lombok	Lombok	434	340	94	415	19
101	Lombok	Lombok Selatan	120	98	22	115	5
102	Lombok	Lombok Timur	212	160	52	194	18
103	Lombok	Pancur Mas	129	105	24	123	6
104	Lombok	Suka Banjar	275	205	70	248	27
105	Lombok	Suka Banjar II Ujung Rembun	182	110	72	166	16
106	Lombok	Suka Maju	198	106	92	180	18
107	Lombok	Tawan Suka Mulya	186	112	74	166	20
108	Lombok	Ujung	130	104	26	117	13
109	Pagar Dewa	Basungan	558	129	429	456	102
110	Pagar Dewa	Batu Api	377	103	274	278	99
111	Pagar Dewa	Marga Jaya	511	98	413	425	86
112	Pagar Dewa	Mekar Sari	340	183	157	257	83
113	Pagar Dewa	Pagar Dewa	401	219	182	306	95
114	Pagar Dewa	Pahayu Jaya	637	236	401	534	103
115	Pagar Dewa	Sidodadi	444	207	237	328	116
116	Pagar Dewa	Sidomulyo	1510	736	774	1155	355
117	Pagar Dewa	Suka Jaya	341	182	159	250	91
118	Pagar Dewa	Suka Mulya	359	150	209	291	68
119	Sekincau	Giham Sukamaju	1270	948	322	1048	222
120	Sekincau	Pampangan	958	757	201	831	127
121	Sekincau	Sekincau	1543	1142	401	1380	163
122	Sekincau	Tiga Jaya	818	585	233	698	120
123	Sekincau	Waspada	508	386	122	413	95
124	Srimulyo	Banding Agung	821	386	435	714	107
125	Srimulyo	Ringin Sari	477	231	246	384	93
126	Srimulyo	Roworejo	954	468	486	778	176
127	Srimulyo	Sido Rejo	579	293	286	474	105
128	Srimulyo	Suka Marga	794	342	452	682	112
129	Srimulyo	Sumber Agung	739	422	317	649	90
130	Srimulyo	Tugu Ratu	1418	711	707	1139	279
131	Sumber Jaya	Simpang Sari	926	374	552	750	176
132	Sumber Jaya	Sindang Pagar	727	260	467	591	136
133	Sumber Jaya	Suka Jaya	819	352	467	742	77
134	Sumber Jaya	Sukapura	1212	617	595	1095	117
135	Sumber Jaya	Tugusari	2093	1078	1015	1903	190
136	Sumber Jaya	Way Petay	1570	731	839	1265	305
	JUMLAH		86.373	35.334	51.039	62.581	23.792

Tabel III.3
PILAR 3 PENGELOLAAN MAKANAN DAN MINUMAN RUMAH TANGGA

No	Puskesmas	Nama Kelurahan /Pekon	Jml KK	Baseline			Progres		
				Pangan Aman Sehat	Pangan Aman Sehat Bersyarat	Pangan Tidak Sehat	Pangan Aman Sehat	Pangan Aman Sehat Bersyarat	Pangan Tidak Sehat
1	Air Hitam	Gunung Terang	516	0	496	20	0	499	17
2	Air Hitam	Manggarai	229	0	229	0	0	229	0
3	Air Hitam	Rigis Jaya	202	0	202	0	0	202	0
4	Air Hitam	Semarang Jaya	684	0	597	87	0	621	63
5	Air Hitam	Sidodadi	165	0	165	0	0	165	0
6	Air Hitam	Sinar Jaya	337	0	299	38	0	302	35
7	Air Hitam	Sri Menanti	235	0	194	41	0	215	20
8	Air Hitam	Suka Damai	164	0	164	0	0	164	0
9	Air Hitam	Suka Jadi	288	0	288	0	0	288	0
10	Air Hitam	Sumber Alam	465	0	388	77	0	421	44
11	Batu Brak	Canggu	319	234	21	64	255	14	50
12	Batu Brak	Gunung Sugih	161	83	37	41	129	2	30
13	Batu Brak	Kegeringan	389	178	87	124	276	25	88
14	Batu Brak	Kembahang	577	420	146	11	552	18	7
15	Batu Brak	Kerang	158	100	10	48	130	4	24
16	Batu Brak	Kota Besi	731	544	41	146	650	8	73
17	Batu Brak	Negeri Ratu	395	184	90	121	269	29	97
18	Batu Brak	Pekon Balak	376	240	39	97	289	26	61
19	Batu Brak	Sukabumi	450	358	9	83	386	0	64
20	Batu Brak	Sukaraja	148	88	16	44	119	4	25
21	Batu Brak	Teba Liyokh	168	88	8	72	106	3	59
22	Batu Ketulis	Argomulyo	629	0	0	0	0	0	0
23	Batu Ketulis	Atar Bawang	336	0	0	0	0	0	0
24	Batu Ketulis	Atar Kuwau	369	0	0	0	0	0	0
25	Batu Ketulis	Bakhu	726	0	0	0	0	0	0
26	Batu Ketulis	Batu Kebayan	377	0	0	0	0	0	0
27	Batu Ketulis	Campang Tiga	428	0	0	0	0	0	0
28	Batu Ketulis	Kubu Liku Jaya	417	0	0	0	0	0	0
29	Batu Ketulis	Luas	699	0	0	0	0	0	0
30	Batu Ketulis	Sumber Rejo	243	0	0	0	0	0	0
31	Batu Ketulis	Way Ngison	306	0	0	0	0	0	0
32	Bandar Negeri Suoh	Bandar Agung	2.257	0	0	0	0	2.049	208
33	Bandar Negeri Suoh	Bumi Hantatai	803	0	0	0	0	761	42
34	Bandar Negeri Suoh	Gunung Ratu	528	0	0	0	0	483	45
35	Bandar Negeri Suoh	Negeri Jaya	412	0	0	0	0	372	40
36	Bandar Negeri Suoh	Ringin Jaya	378	0	0	0	0	311	67
37	Bandar Negeri Suoh	Srimulyo	551	0	0	0	0	485	66
38	Bandar Negeri Suoh	Suoh	1.271	0	0	0	0	1.148	123
39	Bandar Negeri Suoh	Tanjung Sari	376	0	0	0	0	348	28

No	Puskesmas	Nama Kelurahan /Pekon	Jml KK	Baseline			Progres		
				Pangan Aman Sehat	Pangan Aman Sehat Bersyarat	Pangan Tidak Sehat	Pangan Aman Sehat	Pangan Aman Sehat Bersyarat	Pangan Tidak Sehat
40	Bandar Negeri Suoh	Tembelang	270	0	0	0	0	231	39
41	Bandar Negeri Suoh	Tri Mekar Jaya	752	0	0	0	0	697	55
42	Buay Nyerupa	Bandar Baru	388	0	0	0	0	0	0
43	Buay Nyerupa	Buay Nyerupa	809	0	0	0	0	0	0
44	Buay Nyerupa	Bumi Jaya	258	0	0	0	0	0	0
45	Buay Nyerupa	Hanakau	1008	0	0	0	0	0	0
46	Buay Nyerupa	Jaga Raga	348	0	0	0	0	0	0
47	Buay Nyerupa	Pagar Dewa	893	0	0	0	0	0	0
48	Buay Nyerupa	Suka Mulya	350	0	0	0	0	0	0
49	Buay Nyerupa	Tanjung Raya	1418	0	0	0	0	0	0
50	Buay Nyerupa	Tapak Siring	521	0	0	0	0	0	0
51	Buay Nyerupa	Teba Pering Raya	320	0	0	0	0	0	0
52	Fajar Bulan	Fajar Bulan	2639	0	0	0	0	0	0
53	Fajar Bulan	Karang Agung	735	0	0	0	0	0	0
54	Fajar Bulan	Mutar Alam	910	0	0	0	0	0	0
55	Fajar Bulan	Padang Tambak	1059	0	0	0	0	0	0
56	Fajar Bulan	Pura Laksana	1169	0	0	0	0	0	0
57	Fajar Bulan	Sukananti	1288	0	0	0	0	0	0
58	Fajar Bulan	Sukaraja	956	0	0	0	0	0	0
59	Fajar Bulan	Tambak Jaya	850	0	0	0	0	0	0
60	Fajar Bulan	Tanjung Raya	604	0	0	0	0	0	0
61	Gedung Surian	Cipta Waras	684	53	228	403	233	308	143
62	Gedung Surian	Gedung Surian	835	66	177	592	111	500	224
63	Gedung Surian	Mekar Jaya	1014	71	249	694	131	579	309
64	Gedung Surian	Pura Mekar	1200	55	335	810	100	720	380
65	Gedung Surian	Tri Mulyo	989	42	181	766	97	656	236
66	Kebun Tebu	Cipta Mulya	582	0	0	0	562	4	16
67	Kebun Tebu	Muara Baru	279	0	0	0	262	3	14
68	Kebun Tebu	Muara Jaya I	466	0	0	0	446	5	15
69	Kebun Tebu	Muara Jaya li	510	0	0	0	489	4	17
70	Kebun Tebu	Pura Jaya	1330	0	0	0	1274	18	38
71	Kebun Tebu	Pura Wiwitan	982	0	0	0	944	7	31
72	Kebun Tebu	Sinar Luas	400	0	0	0	379	3	18
73	Kebun Tebu	Tribudi Makmur	453	0	0	0	434	8	11
74	Kebun Tebu	Tribudi Syukur	669	0	0	0	640	17	12
75	Kebun Tebu	Tugu Mulya	598	0	0	0	573	5	20
76	Kenali	Bedudu	307	0	0	0	0	208	99
77	Kenali	Bumi Agung	215	0	0	0	0	115	100
78	Kenali	Hujung	983	0	0	0	0	687	296
79	Kenali	Kejadian	250	0	0	0	0	150	100
80	Kenali	Kenali	568	0	0	0	0	368	200
81	Kenali	Pajar Agung	110	0	0	0	0	42	68
82	Kenali	Serungkuk	217	0	0	0	0	137	80
83	Kenali	Suka Makmur	241	0	0	0	0	69	172
84	Kenali	Sukarami	269	0	0	0	0	158	111

No	Puskesmas	Nama Kelurahan /Pekon	Jml KK	Baseline			Progres		
				Pangan Aman Sehat	Pangan Aman Sehat Bersyarat	Pangan Tidak Sehat	Pangan Aman Sehat	Pangan Aman Sehat Bersyarat	Pangan Tidak Sehat
85	Kenali	Turgak	303	0	0	0	0	241	62
86	Liwa	Bahway	1005	685	189	131	810	83	112
87	Liwa	Gunung Sugih	378	242	92	44	301	41	36
88	Liwa	Kubu Perahu	539	355	103	81	397	64	78
89	Liwa	Padang Cahya	1440	1219	129	92	1325	59	56
90	Liwa	Padang Dalom	414	249	67	98	328	38	48
91	Liwa	Pasar Liwa	1394	1175	83	136	1246	57	91
92	Liwa	Sebarus	806	700	52	54	734	33	39
93	Liwa	Sedampah Indah	392	238	71	83	294	48	50
94	Liwa	Sukarame	1017	745	69	203	864	37	116
95	Liwa	Watas	578	473	59	46	510	30	38
96	Liwa	Way Empulau Ulu	578	482	60	36	509	41	28
97	Liwa	Way Mengaku	1600	1430	99	71	1504	49	47
98	Lombok	Heni Arong	217	0	165	52	0	195	22
99	Lombok	Keagungan	183	0	132	51	0	160	23
100	Lombok	Lombok	434	0	365	69	0	405	29
101	Lombok	Lombok Selatan	120	0	89	31	0	102	18
102	Lombok	Lombok Timur	212	0	178	34	0	190	22
103	Lombok	Pancur Mas	129	0	92	37	0	115	14
104	Lombok	Suka Banjar	275	0	204	71	0	255	20
105	Lombok	Suka Banjar II Ujung Rembun	182	0	132	50	0	156	26
106	Lombok	Suka Maju	198	0	134	64	0	168	30
107	Lombok	Tawan Suka Mulya	186	0	129	57	0	166	20
108	Lombok	Ujung	130	0	88	42	0	110	20
109	Pagar Dewa	Basungan	558	502	56	0	457	101	0
110	Pagar Dewa	Batu Api	377	317	60	0	279	98	0
111	Pagar Dewa	Marga Jaya	511	438	73	0	413	98	0
112	Pagar Dewa	Mekar Sari	340	302	38	0	238	102	0
113	Pagar Dewa	Pagar Dewa	401	376	25	0	319	82	0
114	Pagar Dewa	Pahayu Jaya	637	550	87	0	517	120	0
115	Pagar Dewa	Sidodadi	444	401	43	0	365	79	0
116	Pagar Dewa	Sidomulyo	1510	1273	237	0	1108	402	0
117	Pagar Dewa	Suka Jaya	341	309	32	0	265	76	0
118	Pagar Dewa	Suka Mulya	359	257	102	0	223	136	0
119	Sekincau	Giham Sukamaju	1270	648	495	127	749	465	56
120	Sekincau	Pampangan	958	337	297	324	492	337	129
121	Sekincau	Sekincau	1543	598	684	261	698	598	247
122	Sekincau	Tiga Jaya	818	401	221	196	620	100	98
123	Sekincau	Waspada	508	261	113	134	333	90	85
124	Srimulyo	Banding Agung	821	309	203	309	386	400	35
125	Srimulyo	Ringin Sari	477	158	154	165	231	246	0
126	Srimulyo	Roworejo	954	374	206	374	468	405	81
127	Srimulyo	Sido Rejo	579	235	117	227	294	273	12
128	Srimulyo	Suka Marga	794	274	228	292	342	427	25
129	Srimulyo	Sumber Agung	739	381	190	168	476	236	27

No	Puskesmas	Nama Kelurahan /Pekon	Jml KK	Baseline			Progres		
				Pangan Aman Sehat	Pangan Aman Sehat Bersyarat	Pangan Tidak Sehat	Pangan Aman Sehat	Pangan Aman Sehat Bersyarat	Pangan Tidak Sehat
130	Srimulyo	Tugu Ratu	1418	569	285	564	713	236	469
131	Sumber Jaya	Simpang Sari	926	695	214	17	695	216	15
132	Sumber Jaya	Sindang Pagar	727	529	183	15	529	185	13
133	Sumber Jaya	Suka Jaya	819	640	162	17	640	164	15
134	Sumber Jaya	Sukapura	1212	972	220	20	972	226	14
135	Sumber Jaya	Tugusari	2093	1853	215	25	1853	225	15
136	Sumber Jaya	Way Petay	1570	1104	445	21	1104	451	15
Jumlah			86.373	25.860	12.862	9.268	34.437	24.312	6.576

TABEL III.3
PILAR 4 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

No	Puskesmas	Nama Kelurahan /Pekon	Jml KK	Baseline		Progres	
				PSRT	TIDAK PSRT	PSRT	TIDAK PSRT
1	Air Hitam	Gunung Terang	516	0	516	0	516
2	Air Hitam	Manggarai	229	0	229	0	229
3	Air Hitam	Rigis Jaya	202	0	202	0	202
4	Air Hitam	Semarang Jaya	684	0	684	0	684
5	Air Hitam	Sidodadi	165	0	165	0	165
6	Air Hitam	Sinar Jaya	337	0	337	0	337
7	Air Hitam	Sri Menanti	235	0	235	0	235
8	Air Hitam	Suka Damai	164	0	164	0	164
9	Air Hitam	Suka Jadi	288	0	288	0	288
10	Air Hitam	Sumber Alam	465	0	465	0	465
11	Batu Brak	Canggu	319	54	265	69	250
12	Batu Brak	Gunung Sugih	161	32	129	50	111
13	Batu Brak	Kegeringan	389	56	333	71	318
14	Batu Brak	Kembahang	577	83	494	97	480
15	Batu Brak	Kerang	158	25	133	30	128
16	Batu Brak	Kota Besi	731	61	670	92	639
17	Batu Brak	Negeri Ratu	395	18	377	39	356
18	Batu Brak	Pekon Balak	376	44	332	95	281
19	Batu Brak	Sukabumi	450	38	412	60	390
20	Batu Brak	Sukaraja	148	23	125	49	99
21	Batu Brak	Teba Liyokh	168	26	142	53	115
22	Batu Ketulis	Argomulyo	629	0	0	0	0
23	Batu Ketulis	Atar Bawang	336	0	0	0	0
24	Batu Ketulis	Atar Kuwau	369	0	0	0	0
25	Batu Ketulis	Bakhu	726	0	0	0	0
26	Batu Ketulis	Batu Kebayan	377	0	0	0	0
27	Batu Ketulis	Campang Tiga	428	0	0	0	0
28	Batu Ketulis	Kubu Liku Jaya	417	0	0	0	0
29	Batu Ketulis	Luas	699	0	0	0	0
30	Batu Ketulis	Sumber Rejo	243	0	0	0	0
31	Batu Ketulis	Way Ngison	306	0	0	0	0

No	Puskesmas	Nama Kelurahan /Pekon	Jml KK	Baseline		Progres	
				PSRT	TIDAK PSRT	PSRT	TIDAK PSRT
32	Bandar Negeri Suoh	Bandar Agung	2.257	495	1.762	1011	1.246
33	Bandar Negeri Suoh	Bumi Hantatai	803	197	606	401	402
34	Bandar Negeri Suoh	Gunung Ratu	528	213	315	411	117
35	Bandar Negeri Suoh	Negeri Jaya	412	101	311	227	185
36	Bandar Negeri Suoh	Ringin Jaya	378	99	279	197	181
37	Bandar Negeri Suoh	Srimulyo	551	173	378	314	237
38	Bandar Negeri Suoh	Suoh	1.271	259	1.012	599	672
39	Bandar Negeri Suoh	Tanjung Sari	376	49	327	108	268
40	Bandar Negeri Suoh	Tembelang	270	39	231	151	119
41	Bandar Negeri Suoh	Tri Mekar Jaya	752	102	650	365	387
42	Buay Nyerupa	Bandar Baru	388	0	0	0	0
43	Buay Nyerupa	Buay Nyerupa	809	0	0	0	0
44	Buay Nyerupa	Bumi Jaya	258	0	0	0	0
45	Buay Nyerupa	Hanakau	1008	0	0	0	0
46	Buay Nyerupa	Jaga Raga	348	0	0	0	0
47	Buay Nyerupa	Pagar Dewa	893	0	0	0	0
48	Buay Nyerupa	Suka Mulya	350	0	0	0	0
49	Buay Nyerupa	Tanjung Raya	1418	0	0	0	0
50	Buay Nyerupa	Tapak Siring	521	0	0	0	0
51	Buay Nyerupa	Teba Pering Raya	320	0	0	0	0
52	Fajar Bulan	Fajar Bulan	2639	623	2016	627	2012
53	Fajar Bulan	Karang Agung	735	83	652	232	503
54	Fajar Bulan	Mutar Alam	910	185	725	257	653
55	Fajar Bulan	Padang Tambak	1059	52	1007	207	852
56	Fajar Bulan	Pura Laksana	1169	245	924	349	820
57	Fajar Bulan	Sukananti	1288	269	1019	421	867
58	Fajar Bulan	Sukaraja	956	135	821	191	765
59	Fajar Bulan	Tambak Jaya	850	55	795	160	690
60	Fajar Bulan	Tanjung Raya	604	131	473	135	469
61	Gedung Surian	Cipta Waras	684	288	396	328	356
62	Gedung Surian	Gedung Surian	835	352	483	392	443
63	Gedung Surian	Mekar Jaya	1014	301	713	341	673
64	Gedung Surian	Pura Mekar	1200	508	692	548	652
65	Gedung Surian	Tri Mulyo	989	416	573	456	533
66	Kebun Tebu	Cipta Mulya	582	0	0	13	569
67	Kebun Tebu	Muara Baru	279	0	0	11	268
68	Kebun Tebu	Muara Jaya I	466	0	0	17	449
69	Kebun Tebu	Muara Jaya II	510	0	0	12	498
70	Kebun Tebu	Pura Jaya	1330	0	0	1295	35
71	Kebun Tebu	Pura Wiwitan	982	0	0	25	957
72	Kebun Tebu	Sinar Luas	400	0	0	19	381
73	Kebun Tebu	Tribudi Makmur	453	0	0	15	438
74	Kebun Tebu	Tribudi Syukur	669	0	0	22	647
75	Kebun Tebu	Tugu Mulya	598	0	0	20	578
76	Kenali	Bedudu	307	0	0	25	282
77	Kenali	Bumi Agung	215	0	0	25	190
78	Kenali	Hujung	983	0	0	55	928
79	Kenali	Kejadian	250	0	0	28	222

No	Puskesmas	Nama Kelurahan /Pekon	Jml KK	Baseline		Progres	
				PSRT	TIDAK PSRT	PSRT	TIDAK PSRT
80	Kenali	Kenali	568	0	0	46	522
81	Kenali	Pajar Agung	110	0	0	20	90
82	Kenali	Serungkuk	217	0	0	15	202
83	Kenali	Suka Makmur	241	0	0	14	227
84	Kenali	Sukarami	269	0	0	25	244
85	Kenali	Turgak	303	0	0	75	228
86	Liwa	Bahway	1005	661	344	714	291
87	Liwa	Gunung Sugih	378	271	107	292	86
88	Liwa	Kubu Perahu	539	391	148	408	131
89	Liwa	Padang Cahya	1440	1068	372	1131	309
90	Liwa	Padang Dalam	414	367	47	382	32
91	Liwa	Pasar Liwa	1394	1165	229	1207	187
92	Liwa	Sebarus	806	639	167	708	98
93	Liwa	Sedampah Indah	392	200	192	271	121
94	Liwa	Sukarame	1017	880	137	925	92
95	Liwa	Watas	578	477	101	491	87
96	Liwa	Way Empulau Ulu	578	505	73	516	62
97	Liwa	Way Mengaku	1600	1482	118	1506	94
98	Lombok	Heni Arong	217	162	55	174	43
99	Lombok	Keagungan	183	90	93	101	82
100	Lombok	Lombok	434	241	193	248	186
101	Lombok	Lombok Selatan	120	60	60	65	55
102	Lombok	Lombok Timur	212	115	97	125	87
103	Lombok	Pancur Mas	129	77	52	89	40
104	Lombok	Suka Banjar	275	155	120	165	110
105	Lombok	Suka Banjar Ii Ujung Rembun	182	104	78	124	58
106	Lombok	Suka Maju	198	104	94	115	83
107	Lombok	Tawan Suka Mulya	186	105	81	112	74
108	Lombok	Ujung	130	75	55	90	40
109	Pagar Dewa	Basungan	558	0	558	11	547
110	Pagar Dewa	Batu Api	377	0	377	7	370
111	Pagar Dewa	Marga Jaya	511	0	511	9	502
112	Pagar Dewa	Mekar Sari	340	0	340	16	324
113	Pagar Dewa	Pagar Dewa	401	0	401	9	392
114	Pagar Dewa	Pahayu Jaya	637	0	637	12	625
115	Pagar Dewa	Sidodadi	444	0	444	23	421
116	Pagar Dewa	Sidomulyo	1510	0	1510	36	1474
117	Pagar Dewa	Suka Jaya	341	0	341	6	335
118	Pagar Dewa	Suka Mulya	359	0	359	9	350
119	Sekincau	Giham Sukamaju	1270	378	892	446	824
120	Sekincau	Pampangan	958	297	661	365	593
121	Sekincau	Sekincau	1543	253	1290	440	1103
122	Sekincau	Tiga Jaya	818	486	332	486	332
123	Sekincau	Waspada	508	332	176	332	176
124	Srimulyo	Banding Agung	821	309	512	544	277
125	Srimulyo	Ringin Sari	477	185	292	258	219
126	Srimulyo	Roworejo	954	374	580	481	473

No	Puskesmas	Nama Kelurahan /Pekon	Jml KK	Baseline		Progres	
				PSRT	TIDAK PSRT	PSRT	TIDAK PSRT
127	Srimulyo	Sido Rejo	579	234	345	313	266
128	Srimulyo	Suka Marga	794	273	521	335	459
129	Srimulyo	Sumber Agung	739	380	359	393	346
130	Srimulyo	Tugu Ratu	1418	569	849	854	564
131	Sumber Jaya	Simpang Sari	926	530	396	560	366
132	Sumber Jaya	Sindang Pagar	727	429	298	459	268
133	Sumber Jaya	Suka Jaya	819	432	387	462	357
134	Sumber Jaya	Sukapura	1212	608	604	638	574
135	Sumber Jaya	Tugusari	2093	1172	921	1217	876
136	Sumber Jaya	Way Petay	1570	1014	556	1044	526
Jumlah			86.373	23.479	42.319	30.634	4.896

TABEL III.4
PILAR 5

NO	PUSKESMAS	NAMA KELURAHAN /PEKON	JML KK	BASELINE		PROGRES	
				PLRT	TIDAK PLRT	PLRT	TIDAK PLRT
1	Air Hitam	Gunung Terang	516	0	516	0	516
2	Air Hitam	Manggarai	229	0	229	0	229
3	Air Hitam	Rigis Jaya	202	0	202	0	202
4	Air Hitam	Semarang Jaya	684	0	684	0	684
5	Air Hitam	Sidodadi	165	0	165	0	165
6	Air Hitam	Sinar Jaya	337	0	337	0	337
7	Air Hitam	Sri Menanti	235	0	235	0	235
8	Air Hitam	Suka Damai	164	0	164	0	164
9	Air Hitam	Suka Jadi	288	0	288	0	288
10	Air Hitam	Sumber Alam	465	0	465	0	465
11	Batu Brak	Canggu	319	108	211	152	167
12	Batu Brak	Gunung Sugih	161	74	87	112	49
13	Batu Brak	Kegeringan	389	191	198	268	121
14	Batu Brak	Kembahang	577	320	257	453	124
15	Batu Brak	Kerang	158	81	77	115	43
16	Batu Brak	Kota Besi	731	411	320	520	211
17	Batu Brak	Negeri Ratu	395	185	210	278	117
18	Batu Brak	Pekon Balak	376	178	198	289	87
19	Batu Brak	Sukabumi	450	219	231	340	110
20	Batu Brak	Sukaraja	148	57	91	92	56
21	Batu Brak	Teba Liyokh	168	59	109	94	74
22	Batu Ketulis	Argomulyo	629	0	0	0	0
23	Batu Ketulis	Atar Bawang	336	0	0	0	0
24	Batu Ketulis	Atar Kuwau	369	0	0	0	0
25	Batu Ketulis	Bakhu	726	0	0	0	0
26	Batu Ketulis	Batu Kebayan	377	0	0	0	0
27	Batu Ketulis	Campang Tiga	428	0	0	0	0
28	Batu Ketulis	Kubu Liku Jaya	417	0	0	0	0
29	Batu Ketulis	Luas	699	0	0	0	0
30	Batu Ketulis	Sumber Rejo	243	0	0	0	0

NO	PUSKESMAS	NAMA KELURAHAN /PEKON	JML KK	BASELINE		PROGRES	
				PLRT	TIDAK PLRT	PLRT	TIDAK PLRT
31	Batu Ketulis	Way Ngison	306	0	0	0	0
32	Bandar Negeri Suoh	Bandar Agung	2257	495	1762	1011	1246
33	Bandar Negeri Suoh	Bumi Hantatai	803	197	606	401	402
34	Bandar Negeri Suoh	Gunung Ratu	528	213	315	411	117
35	Bandar Negeri Suoh	Negeri Jaya	412	101	311	227	185
36	Bandar Negeri Suoh	Ringin Jaya	378	99	279	197	181
37	Bandar Negeri Suoh	Srimulyo	551	173	378	314	237
38	Bandar Negeri Suoh	Suoh	1271	259	1012	599	672
39	Bandar Negeri Suoh	Tanjung Sari	376	49	327	108	268
40	Bandar Negeri Suoh	Tembelang	270	39	231	151	119
41	Bandar Negeri Suoh	Tri Mekar Jaya	752	102	650	365	387
42	Buay Nyerupa	Bandar Baru	388	0	0	0	0
43	Buay Nyerupa	Buay Nyerupa	809	0	0	0	0
44	Buay Nyerupa	Bumi Jaya	258	0	0	0	0
45	Buay Nyerupa	Hanakau	1008	0	0	0	0
46	Buay Nyerupa	Jaga Raga	348	0	0	0	0
47	Buay Nyerupa	Pagar Dewa	893	0	0	0	0
48	Buay Nyerupa	Suka Mulya	350	0	0	0	0
49	Buay Nyerupa	Tanjung Raya	1418	0	0	0	0
50	Buay Nyerupa	Tapak Siring	521	0	0	0	0
51	Buay Nyerupa	Teba Pering Raya	320	0	0	0	0
52	Fajar Bulan	Fajar Bulan	2639	1841	798	2162	477
53	Fajar Bulan	Karang Agung	735	548	187	583	152
54	Fajar Bulan	Mutar Alam	910	709	201	738	172
55	Fajar Bulan	Padang Tambak	1059	661	398	688	371
56	Fajar Bulan	Pura Laksana	1169	839	330	868	301
57	Fajar Bulan	Sukananti	1288	1063	225	1118	170
58	Fajar Bulan	Sukaraja	956	637	319	651	305
59	Fajar Bulan	Tambak Jaya	850	597	253	619	231
60	Fajar Bulan	Tanjung Raya	604	519	85	544	60
61	Gedung Surian	Cipta Waras	684	278	406	294	390
62	Gedung Surian	Gedung Surian	835	350	485	435	400
63	Gedung Surian	Mekar Jaya	1014	299	715	344	670
64	Gedung Surian	Pura Mekar	1200	505	695	550	650
65	Gedung Surian	Tri Mulyo	989	410	579	460	529
66	Kebun Tebu	Cipta Mulya	582	0	0	31	551
67	Kebun Tebu	Muara Baru	279	0	0	22	257
68	Kebun Tebu	Muara Jaya I	466	0	0	36	430
69	Kebun Tebu	Muara Jaya II	510	0	0	29	481
70	Kebun Tebu	Pura Jaya	1330	0	0	97	1233
71	Kebun Tebu	Pura Wiwitan	982	0	0	65	917
72	Kebun Tebu	Sinar Luas	400	0	0	19	381
73	Kebun Tebu	Tribudi Makmur	453	0		16	437
74	Kebun Tebu	Tribudi Syukur	669	0	0	24	645
75	Kebun Tebu	Tugu Mulya	598	0	0	29	569
76	Kenali	Bedudu	307	0	0	115	192
77	Kenali	Bumi Agung	215	0	0	73	142
78	Kenali	Hujung	983	0	0	420	563

NO	PUSKESMAS	NAMA KELURAHAN /PEKON	JML KK	BASELINE		PROGRES	
				PLRT	TIDAK PLRT	PLRT	TIDAK PLRT
79	Kenali	Kejadian	250	0	0	115	135
80	Kenali	Kenali	568	0	0	260	308
81	Kenali	Pajar Agung	110	0	0	58	52
82	Kenali	Serungkuk	217	0	0	85	132
83	Kenali	Suka Makmur	241	0	0	68	173
84	Kenali	Sukarami	269	0	0	69	200
85	Kenali	Turgak	303	0	0	150	153
86	Liwa	Bahway	1005	646	359	676	329
87	Liwa	Gunung Sugih	378	203	175	235	143
88	Liwa	Kubu Perahu	539	389	150	410	129
89	Liwa	Padang Cahya	1440	1162	278	1241	199
90	Liwa	Padang Dalam	414	300	114	328	86
91	Liwa	Pasar Liwa	1394	1207	187	1285	109
92	Liwa	Sebarus	806	630	176	696	110
93	Liwa	Sedampah Indah	392	207	185	289	103
94	Liwa	Sukarame	1017	878	139	903	114
95	Liwa	Watas	578	399	179	460	118
96	Liwa	Way Empulau Ulu	578	480	98	500	78
97	Liwa	Way Mengaku	1600	1485	115	1537	63
98	Lombok	Heni Arong	217	150	67	156	61
99	Lombok	Keagungan	183	95	88	110	73
100	Lombok	Lombok	434	255	179	265	169
101	Lombok	Lombok Selatan	120	50	70	84	36
102	Lombok	Lombok Timur	212	124	88	135	77
103	Lombok	Pancur Mas	129	55	74	90	39
104	Lombok	Suka Banjar	275	170	105	180	95
105	Lombok	Suka Banjar li Ujung Rembun	182	95	87	127	55
106	Lombok	Suka Maju	198	100	98	135	63
107	Lombok	Tawan Suka Mulya	186	85	101	125	61
108	Lombok	Ujung	130	85	45	90	40
109	Pagar Dewa	Basungan	558	13	545	471	87
110	Pagar Dewa	Batu Api	377	8	369	307	70
111	Pagar Dewa	Marga Jaya	511	10	501	408	103
112	Pagar Dewa	Mekar Sari	340	3	337	317	23
113	Pagar Dewa	Pagar Dewa	401	102	339	225	176
114	Pagar Dewa	Pahayu Jaya	637	7	630	521	116
115	Pagar Dewa	Sidodadi	444	2	442	307	137
116	Pagar Dewa	Sidomulyo	1510	84	1426	1050	460
117	Pagar Dewa	Suka Jaya	341	5	336	188	153
118	Pagar Dewa	Suka Mulya	359	6	353	232	127
119	Sekincau	Giham Sukamaju	1270	741	529	0	0
120	Sekincau	Pampangan	958	496	457	0	0
121	Sekincau	Sekincau	1543	884	679	0	0
122	Sekincau	Tiga Jaya	818	654	184	0	0
123	Sekincau	Waspada	508	196	345	0	0
124	Srimulyo	Banding Agung	821	309	512	557	264
125	Srimulyo	Ringin Sari	477	185	292	366	111

NO	PUSKESMAS	NAMA KELURAHAN /PEKON	JML KK	BASELINE		PROGRES	
				PLRT	TIDAK PLRT	PLRT	TIDAK PLRT
126	Srimulyo	Roworejo	954	374	580	592	362
127	Srimulyo	Sido Rejo	579	234	345	292	287
128	Srimulyo	Suka Marga	794	283	511	612	182
129	Srimulyo	Sumber Agung	739	380	359	468	271
130	Srimulyo	Tugu Ratu	1418	569	849	884	534
131	Sumber Jaya	Simpang Sari	926	530	396	560	366
132	Sumber Jaya	Sindang Pagar	727	429	298	459	268
133	Sumber Jaya	Suka Jaya	819	432	387	462	357
134	Sumber Jaya	Sukapura	1212	608	604	638	574
135	Sumber Jaya	Tugusari	2093	1172	921	1217	876
136	Sumber Jaya	Way Petay	1570	1012	558	1045	525
Jumlah			86.373	31.844	34.062	40.567	29.866

(2) Aksesibilitas Serta Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Ketersediaan obat di Kabupaten Lampung Barat saat ini didukung oleh sumber dana DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Farmasi dan Pengadaan obat yang bersumber APBD Lampung Barat serta penyediaan obat dari Dinas Kesehatan Provinsi. Pada tahun 2021, ketersediaan obat sebesar Rp 8.737,- per kapita, tahun 2022 sebesarRp. 11.166,- per kapita, tahun 2023 sebesar Rp. 10.992,- per kapita, tahun 2024 sebesar Rp. 12.312,- per kapita dan tahun 2025 sebesar 10.019,- per kapita .

Adapun pada tahun 2025, ketersediaan obat sebesar Rp 8.737,- per kapita. Sementara target kebijakan obat publik adalah Rp. 13.500,- per kapita. Sementara itu untuk pemenuhan sarana prasarana seperti pembangunan puskesmas, penyediaan sarana penunjang dan alat kesehatan diadakan melalui DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar dan DAK Affirmasi Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar serta DAK Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk Rumah Sakit.

Berdasarkan RPD akan dilaksanakan empat tahun ke depan, pembangunan sektor kesehatan berada pada tujuan dan sasaran kedua yaitu bertujuan Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan sasaran Meningkatnya sumberdaya manusia yang berdaya saing dengan indicator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dari RPD tersebut Renstra Dinas Kesehatan menetapkan tujuan yaitu Mewujudkan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indicator Usia Harapan Hidup dan Angka Kematian Ibu / 100.000 KH dan sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indicator Angka Kematian Ibu (AKI)/100.000 KH, Angka Kematian Bayi (AKB)/1.000 KH, dan Prevalensi Stunting (Balita pendek dan sangat pendek), Persentase TSR TB dan Indeks Kepuasan Masyarakat

Adapun program unggulan di sektor kesehatan yang termasuk dalam Tujuh Program Bupati / Wakil Bupati yang sedang dilaksanakan yaitu **Pelayanan Masyarakat Sehat**, yang terdiri dari 3 program yaitu:

- (1) Peningkatan sarana dan prasarana puskesmas dan rumah sakit daerah melalui Program Ambulans Hebat
- (2) Penambahan tenaga medis & paramedis
- (3) Perluasan jaminan kesehatan yang tidak masuk PBI – JKN (penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional) / KIS

Dengan demikian, melihat program unggulan yang menjadi prioritas dalam pembangunan lima tahun sebelumnya yakni dengan menitikberatkan pada upaya pembenahan daya dukung untuk peningkatan pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat untuk mencapai masyarakat Lampung Barat yang Sehat.

Penguatan fasilitas pelayanan kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit sebagai pelaksana pemberi pelayanan kesehatan pada masyarakat merupakan salah satu langkah yang memang harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Ketersediaan sumberdaya kesehatan adalah faktor yang selama ini menjadi salah satu kendala yang terus menerus berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan.

Upaya pemenuhan ketersediaan sarana prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan berbagai sumber dana baik bersumber dari daerah maupun anggaran pusat. Ketersediaan SDM yang tidak didukung dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal penerimaan PNS dalam beberapa tahun belakangan ini dapat disiasati dengan melaksanakan rekrutmen tenaga kontrak untuk ditempatkan pada posisi yang selama ini belum terpenuhi kebutuhan minimalnya.

Perluasan jaminan kesehatan juga langkah yang dapat diambil untuk memperluas kemampuan akses atas pelayanan bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2029 diharapkan seluruh masyarakat sudah memiliki jaminan kesehatan baik PBI maupun Non PBI/peserta mandiri sehingga dapat tercapai *total coverage*.

Sementara itu dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2025-2029 visi dan misi merujuk pada visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 misi pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
 2. Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
 3. Pembangunan yang merata dan berkualitas.
 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
 6. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan
- Bidang kesehatan memiliki peran menjadi focus pada agenda ke 4 pada misi pembangunan ini.

Dengan adanya visi, misi dan Nawacita dalam pelaksanaan pembangunan nasional serta diterjemahkan dalam RPD Kabupaten Lampung Barat maka Dinas Kesehatan menetapkan rencana strategis pembangunan kesehatan untuk periode 2023 – 2026 senantiasa mengacu pada hal tersebut. Semua faktor ini adalah faktor pendukung terhadap keberhasilan dan terselenggaranya rencana strategis di bidang kesehatan.

Identifikasi faktor-faktor pendukung keberhasilan program kesehatan sebagai berikut :

a. Kebijakan Bupati Lampung Barat untuk mengembangkan dan menyediakan fasilitas kesehatan tingkat pertama berupa puskesmas di setiap kecamatan yang dilengkapi dengan pemenuhan sarana, prasarana & alat kesehatan yang mengacu pada Permenkes 75 tahun 2014.

b. Kabupaten Lampung Barat dengan karakteristik sebagai kabupaten penghasil tanaman perkebunan dan penghasil komoditas pertanian sehingga sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani. Hal ini menuntut inovasi dan pengembangan program berupa program kesehatan kerja. Beberapa kegiatan utama kesehatan kerja yang dilaksanakan dengan sasaran pada pekerja formal dan informal, penekanan kegiatan berfokus pada upaya pencegahan terjadinya Penyakit Akibat Kerja (PAK), sosialisasi dan pengenalan bahaya bahan pestisida sehingga petani meningkat pengetahuan dan ketrampilan dalam perlindungan diri dengan peningkatan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).

c. Pelayanan Kesehatan pada wilayah terpencil dan perbatasan Kondisi demografi dan persebaran penduduk yang beragam menuntut peningkatan pelayanan kesehatan pada wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan, sehingga peningkatan kunjungan dalam pemberian pelayanan kesehatan menjadi keniscayaan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada wilayah tersebut antara lain berupa pelayanan penyuluhan kesehatan, pengobatan, pemeriksaan deteksi dini penyakit tidak menular (PTM), SADARI dan IVA dan kegiatan rutin pendukung lain yang pada sekolah-sekolah yang ada di wilayah tersebut.

d. Dukungan RTK untuk wilayah jauh dan sulit

Upaya penurunan AKI & AKB tetap menjadi target kegiatan utama dan menjadi indikator pembangunan kesehatan. Penyediaan RTK di setiap kecamatan untuk menjamin dan memberikan rasa nyaman bagi calon ibu melahirkan yang berasal dari wilayah jauh untuk mendapatkan

pelayanan persalinan sesuai dengan standar dan kelayakan pelayanan.

e. Program Penyediaan Anggaran DAK Fisik dan Non Fisik Kementerian Kesehatan melalui penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik memberikan peluang bagi penyediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan bagi Puskesmas dan Puskesmas Pembantu untuk peningkatan kualitas pelayanan. Juga dalam hal mendukung operasional pelaksanaan kegiatan dalam upaya pencapaian SPM dan penurunan AKI AKB serta percepatan perbaikan gizi masyarakat dan penanggulangan stunting. Tidak tertinggal upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta dukungan manajemen puskesmas. Aksi Germas dan pelaksanaan PIS-PK juga merupakan kegiatan-kegiatan yang mendapatkan support dari dana DAK.

f. Jaminan JKN PBI Luar Kuota

Penyediaan anggaran pendukung untuk peningkatan jumlah peserta JKN PBI terutama yang di luar kuota selaras dengan target universal coverage pada tahun 2019. Pada tahun 2021 total peserta JKN Kabupaten Lampung Barat menjadi 187.976 jiwa (61,17%) dengan komposisi peserta JKN yang terdiri dari peserta PBI sebanyak 122.975 jiwa (40,02%) dan sisanya sebanyak 65.001 jiwa (21,15%) adalah peserta JKN Mandiri, PNS, TNI Polri, pekerja dan tenaga lainnya. Adapun jumlah peserta JKN PBI diluar kuota nasional dan propinsi (ditanggung oleh pemerintah kabupaten Lampung Barat) adalah 14.677 jiwa atau 4,78%

g. Pengembangan SDM

Peningkatan kualitas dan ketersediaan SDM Kesehatan perhatian Kabupaten Lampung Barat, adanya program Beasiswa Kedokteran menjadi peluang bagi siswa berprestasi untuk bersaing dan membaktikan diri di Kabupaten Lampung Barat. Pada tahun 2021 telah terealisasi pemberian bagi 9 orang mahasiswa di Fakultas Kedokteran pada universitas negeri yang ada yaitu Unila, Unsri, UIN Syarif Hidayatullah dan UPN Veteran Jakarta.

(1) Kematian ibu & bayi

Perlu dilakukannya semua upaya pendukung yang dapat meningkatkan pelayanan kesehatan ibu & anak sehingga akan berdampak pada terus berkurangnya kematian ibu & bayi yang diakibatkan oleh kurang optimalnya upaya pelayanan kesehatan pada ibu & anak.

(2) Kasus gizi buruk dan stunting

Penanganan kasus gizi buruk dan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan namun juga harus mendapat perhatian dari semua sektor terkait, karena persoalan gizi buruk merupakan persoalan kompleks yang berkaitan dengan banyak faktor antara lain status ekonomi, sosial budaya, ketahanan pangan, dan angka kemiskinan di Lampung Barat.

(3) Sistem Pelayanan Kesehatan

Perbaikan system pelayanan Kesehatan merupakan poin penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan. Perbaikan system

pelayanan dimulai dari lini terbawah yakni Puskesmas sebagai pengemban pemberi layanan Kesehatan dasar dan Jaringannya sampai dengan pelayanan tingkat lanjut yakni Rumah Sakit. Perbaikan system ditujukan agar masyarakat dapat memperoleh layanan dengan cepat , tepat dan optimal secara komprehensif baik promotive, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Adanya dukungan tehknologi informasi dan berbagai program nasional seperti Sistem Informasi Kesehatan, Telekonsultasi/Telemedicine menjadi salah satu factor prndukung keberhasilan perbaikan system pelayanan kesehatan

(4) Pembiayaan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Target Total Coverage pada tahun 2019 yang masih belum tercapai, dimana seluruh penduduk Kabupaten Lampung Barat terdaftar sebagai peserta JKN, merupakan pekerjaan rumah yang harus dapat diselesaikan. Sehingga segenap masyarakat di Lampung Barat dapat mengakses pelayanan kesehatan baik pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun pihak swasta yang sudah bekerjasama dengan BPJS.

(5) Ketersediaan SDM dan sarana prasarana pelayanan kesehatan. Pemenuhan SDM kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan harus terus dilakukan dengan mengerahkan berbagai upaya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

(6) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Menjadi salah satu sasaran strategis yang berfokus padapeningkatan peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor dalam pembangunan sektor Kesehatan. Adanya target alokasi bidang Kesehatan pada anggaran dana desa menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan. Selain itu adanya Gerakan pemberdayaan Masyarakat melalui beberapa program seperti Germas, STBM dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan lintas sektor serta menetapkan sektor lain sebagai leading dalam mengatasi permasalahan bidang Kesehatan seperti Stunting.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Tujuan

Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai yaitu :

(1) Terwujudnya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator dari tujuan jangka menengah ini adalah Usia Harapan Hidup (UHH) dan Angka Kematian Ibu/100.000 KH

4.2 Sasaran

Sasaran strategis untuk pencapaian jangka menengah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung adalah :

(1) Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Indikator dari Sasaran Strategis jangka menengah ini :

- Angka Kematian Ibu (AKI)/100.000 Kelahiran Hidup
- Angka Kematian Bayi (AKB)/1.000 Kelahiran Hidup
- Prevalensi Balita Stunting (Pendek dan sangat pendek)
- Persentase TSR TB
- Indeks Kepuasan Masyarakat



Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan tergambar pada tabel berikut :Tabel

III.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan

N O	TUJUAN	Indikator	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -					SASARAN	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -				
			2026	2027	2028	2029	2030			2026	2027	2028	2029	2030
1	Terwujudnya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,23	74,37	74,50	74,64	74,77	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu(AKI) / 100.000 KH	100	95	90	80	75
									Angka Kematian Bayi(AKB)/1000 KH	3,6	3,4	3,2	3	2,6
									Prevaalensi Balita Stunting (pendek dan sangat pendek)	12,5	12	11,5	10,9	10,3
		Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	3	3	2	2	1		Persentase TSR TB	90	90	90	90	90
									Indeks Kepuasan Masyarakat	83	84	85	86	86

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan didasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan berbagai upaya kesehatan yang efektif dan efisien maka yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit besardi dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus dan fokus kegiatan, kesehatan, pembangunan kesehatan.

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan mengacu pada tiga hal penting yakni:

1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (*Primary HealthCare*)

Puskesmas mempunyai fungsi sebagai pembina kesehatan wilayah melalui 4 jenis upaya yaitu:

- a. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat
- b. Melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat
- c. Melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan
- d. Memantau & mendorong pembangunan berwawasan kesehatan

Untuk penguatan fungsi puskesmas maka perlu dilakukan Revitalisasi Puskesmas, dengan fokus pada 5 hal, yaitu:

- 1) peningkatan SDM;
- 2) peningkatan kemampuan teknis dan manajemen Puskesmas;
- 3) peningkatan pembiayaan;
- 4) peningkatan Sistem Informasi Puskesmas (SIP);
- 5) pelaksanaan akreditasi Puskesmas.

Peningkatan sumber daya manusia di Puskesmas diutamakan untuk ketersediaan 5 jenis tenaga kesehatan yaitu: tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga kefarmasian dan analis kesehatan. Upaya untuk mendorong tercapainya target pembangunan kesehatan nasional, terutama melalui penguatan layanan kesehatan primer, Kementerian Kesehatan mengembangkan program Nusantara Sehat. Program ini menempatkan tenaga kesehatan di tingkat layanan kesehatan primer dengan metode *team-based*.

Kemampuan manajemen Puskesmas diarahkan untuk meningkatkan mutu sistem informasi kesehatan, mutuperencanaan di Puskesmas dan kemampuan teknis untuk pelaksanaan deteksi dini masalah kesehatan, pemberdayaan masyarakat & pemantauan kualitas kesehatan lingkungan. Pembiayaan Puskesmas diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan promotif dan preventif secara efektif dan efisien dengan memaksimalkan sumber pembiayaan Puskesmas.

Pengembangan Sistem Informasi Puskesmas diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi masalah kesehatan dan capaian pembangunan kesehatan yang dilakukan secara tepat waktu dan akurat. Pelaksanaan akreditasi Puskesmas dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan difokuskan pada daerah yang menjadi prioritas pembangunan kesehatan.

2. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (*Continuum Of Care*)

Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut.

3. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan

Program-program khusus untuk menangani permasalahan kesehatan pada bayi, balita dan lansia, ibu hamil, dan keluarga miskin, kelompok-kelompok berisiko, serta masyarakat di daerah terpencil, perbatasan dan daerah bermasalah kesehatan.

Untuk melaksanakan pembangunan sektor kesehatan pada tingkat SKPD yang merupakan kelanjutan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat berikut adalah strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan .

Tabel III.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN RPD : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat				
SASARAN RPD : Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Berdaya saing				
NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1 Meningkatkan Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2 Meningkatkan Jumlah, Jenis, Kualitas Dan Pemerataan Tenaga Kesehatan 3 Meningkatkan Sinergitas Antar Lembaga Pemerintah	1 Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (<i>Primary Health Care</i>) 2 Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan 3 Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (<i>Continuum Of Care</i>)

BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAB KESEHATAN

Pada bagian ini menguraikan hubungan antara urusan pemerintah Daerah dengan Dinas Kesehatan yang menjadi pelaksana urusan wajib pemerintah di bidang kesehatan yang disajikan dalam matrik berupa tabel berikut.

Tabel IV.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah (Tabel T-C.27)
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 - 2029**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2020 s.d 2024)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2024	Praktik Capaian Tahun 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Terwujudnya Peningkatan Derajat Kesehatan masyarakat	meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat		KESEHATAN	Angka Kematian Ibu				95	197.797.910.991,00	94	202.652.062.137,00	93	210.761.313.965,65	92	214.207.035.588,55	91	214.253.035.588,55		1.039.671.358.271	
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)				12,5		12		11,5		10,9		10,3				
				Angka Kematian Bayi				3,5		3,4		3,3		3,2		3,1				
				TSR TB (%)				90		90		90		90		90				
				Indeks Kepuasan Masyarakat				83		84		85		86		86				
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai SAKIP	81,5 poin	79,6 poin	78	78,00	103.263.005.339	78,5	103.103.759.529	79	107.072.990.445,45	80	107.117.379.688,65	81	107.147.379.689	82 poin	527.704.514.691	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat	1.02.01.2.01	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	1 dokumen	136.049.700	5 dokumen	136.563.200	6 Dokumen	147.041.360	6 Dokumen	151.557.400	9 dokumen	151.557.400	9 dokumen	722.769.060	Dinas Kesehatan

	kat Daerah		Daerah																	
	Tersusunnya Dokumen Penagnggaran Perangkat Daerah			Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	5 Dokumen	11 Dokumen	5 Dokumen	1 dokumen		5 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		9 dokumen		9 dokumen		
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	5 Dokumen	1 dokumen		5 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		9 dokumen		9 dokumen		
		1.02.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		11 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	33.484.000	1 Dokumen	33.484.000	1 Dokumen	35.158.200,00	1 Dokumen	36.832.400,00	1 Dokumen	36.832.400,00		175.791.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (RSUD)				2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	11.000.000	2 dokumen	11.000.000	2 dokumen	11.000.000	10 dokumen	53.000.000	
		1.02.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	9.250.000	1 Dokumen	9.250.000	1 Dokumen	9.712.500,00	1 Dokumen	10.175.000,00	1 Dokumen	10.175.000,00		48.562.500	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (RSUD)				1 dokumen	7.499.500	1 dokumen	8.000.000	1 dokumen	9.000.000	1 dokumen	9.000.000	1 dokumen	9.000.000	5 dokumen	42.499.500	

		1.02.01.2. 01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokum en	1 Doku men	1 dokum en	11.025.00 0	1 Doku men	11.025.00 0	1 Doku men	11.576.25 0,00	1 Doku men	12.350.00 0,00	1 Doku men	12.350.00 0,00		58.326.25 0	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD				1 dokum en	4.500.000	1 dokum en	4.500.000	1 dokum en	5.000.000	1 dokum en	5.000.000	1 dokum en	5.000.000	5 doku men	24.000.00 0	
		1.02.01.2. 01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokum en	1 Doku men	1 dokum en	9.250.000	1 Doku men	9.250.000	1 Doku men	9.712.500, 00	1 Doku men	10.500.00 0,00	1 Doku men	10.500.00 0,00		49.212.50 0	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA -SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD				1 dokum en	4.999.800	1 dokum en	5.000.000	1 dokum en	5.500.000	1 dokum en	5.500.000	1 dokum en	5.500.000	5 doku men	26.499.80 0	
		1.02.01.2. 01.005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokum en	1 Doku men	1 dokum en	9.250.000	1 Doku men	9.250.000	1 Doku men	9.712.500, 00	1 Doku men	10.500.00 0,00	1 Doku men	10.500.00 0,00		49.212.50 0	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	jumlah dokumen DPA -SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD (RSUD)				1 dokum en	5.987.200	1 dokum en	6.000.000	1 dokum en	6.500.000	1 dokum en	6.500.000	1 dokum en	6.500.000	5 doku men	31.487.20 0	

		1.02.01.2. 01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokum en	1 Doku men	1 dokum en	6.500.000	1 Doku men	6.500.000	1 Doku men	6.825.000, 00	1 Doku men	7.000.000, 00	1 Doku men	7.000.000, 00		33.825.00 0	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (RSUD)				12 lapora n	4.500.000	12 lapora n	4.500.000	12 lapora n	6.000.000	12 lapora n	6.000.000	12 lapora n	6.000.000	60 lapora n	27.000.00 0	
		1.02.01.2. 01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokum en	1 Doku men	1 dokum en	10.804.20 0	1 Doku men	10.804.20 0	1 Doku men	11.344.41 0,00	1 Doku men	11.200.00 0,00	1 Doku men	11.200.00 0,00		55.352.81 0	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah				6 lapora n	9.000.000	6 lapora n	9.000.000	6 lapora n	10.000.00 0	6 lapora n	10.000.00 0	6 lapora n	10.000.00 0	30 lapora n	48.000.00 0	
		1.02.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						59.562.54 6.016		59.563.63 1.016		62.543.11 2.567		62.507.63 4.300		62.507.63 4.300			
		1.02.01.2. 02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	719 org	643 org/bln	260 oran g	260 Orang /bulan	59.512.64 6.016,00	260 Orang /bulan	59.512.64 6.016,00	260 Orang /bulan	62.488.27 8.316,80	260 Orang /bulan	62.450.80 0.000,00	260 Orang /bulan	62.450.80 0.000,00		306.415.1 70.349	
		1.02.01.2. 02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Doku men	1 Dokum en	1 Doku men	1 Doku men	4.272.000	1 Doku men	4.272.000	1 Doku men	4.485.600, 00	1 Doku men	4.850.000, 00	1 Doku men	4.850.000, 00		22.729.60 0	
		1.02.01.2. 02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokum en	1 dokum en	1 doku men	1 dokum en	12.494.00 0	1 dokum en	12.494.00 0	1 dokum en	13.118.70 0,00	1 dokum en	13.743.40 0,00	1 dokum en	13.743.40 0,00		65.593.50 0	

		1.02.01.2. 02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.757.000	1 Laporan	3.757.000	1 Laporan	3.944.850,00	1 Laporan	4.132.700,00	1 Laporan	4.132.700,00		19.724.250	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (RSUD)	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD				1 laporan	4.365.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.500.000	1 laporan	5.500.000	1 laporan	5.500.000	5 laporan	25.865.000	
		1.02.01.2. 02.006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.872.000	1 Dokumen	2.872.000	1 Dokumen	3.015.600,00	1 Dokumen	3.159.200,00	1 Dokumen	3.159.200,00		15.078.000	
		1.02.01.2. 02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	18 laporan	1 laporan	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.500.000,00	1 laporan	11.000.000,00	1 laporan	11.000.000,00		52.500.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD (RSUD)				2 laporan	4.800.000	2 laporan	5.000.000	2 laporan	5.500.000	2 laporan	5.500.000	2 laporan	5.500.000	10 laporan	26.300.000	

		1.02.01.2.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.590.000	1 Dokumen	3.590.000	1 Dokumen	3.769.500,00	1 Dokumen	3.949.000,00	1 Dokumen	3.949.000,00		18.847.500	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi anggaran (RSUD)				1 dokumen	3.750.000	1 dokumen	4.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	5 dokumen	22.750.000	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						28.252.000		28.252.000		29.664.600		31.077.200		31.077.200			
		1.02.01.2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	21 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	28.252.000	1 Laporan	28.252.000	1 Laporan	29.664.600,00	1 Laporan	31.077.200,00	1 Laporan	31.077.200,00		148.323.000	
		1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						98.745.600		99.095.600		107.350.380		109.605.160		109.605.160			
		1.02.01.2.05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.299.200,00	1 Dokumen	20.299.200,00	1 Dokumen	21.314.160,00	1 Dokumen	22.329.120,00	1 Dokumen	22.329.120,00		106.570.800	
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 dokumen	8.650.000	1 dokumen	9.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	5 dokumen	47.650.000	
		1.02.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	10.000.000	2 orang	10.000.000	2 orang	10.500.000,00	2 orang	11.000.000,00	2 orang	11.000.000,00		52.500.000	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (RSUD)				10 orang	45.000.000	10 orang	45.000.000	10 orang	50.000.000	10 orang	50.000.000	10 orang	50.000.000	50 orang	240.000.000	

		1.02.01.2.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 orang	37 orang	25 orang	25 orang	14.796.400,00	25 orang	14.796.400,00	25 orang	15.536.220,00	25 orang	16.276.040,00	25 orang	16.276.040,00		77.681.100	
		1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.009.006.940		971.006.800		1.006.435.080		1.029.307.480		1.038.307.480			
		1.02.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9 Paket	1 Paket	1 Paket	13.550.000	1 Paket	13.550.000	1 Paket	14.227.500,00	1 Paket	14.905.000,00	1 Paket	14.905.000,00		71.137.500	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				16 paket	61.319.840	16 paket	62.000.000	16 paket	63.000.000	16 paket	64.000.000	16 paket	65.000.000	80 paket	315.319.840	
		1.02.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	31.210.800	1 Paket	31.210.800	1 Paket	34.331.880,00	1 Paket	34.331.880,00	1 Paket	34.331.880,00		165.417.240	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				14 paket	100.070.400	14 paket	110.000.000	14 paket	110.000.000	14 paket	112.000.000	14 paket	115.000.000	70 paket	547.070.400	
		1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan				1 paket	199.997.750	1 paket	125.000.000	1 paket	125.000.000	1 paket	125.000.000	1 paket	125.000.000	5 paket	699.997.750	
		1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				7 paket	100.002.150	7 paket	105.000.000	7 paket	105.000.000	7 paket	105.000.000	7 paket	105.000.000	35 paket	520.002.150	
		1.02.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9 Paket	1 Paket	1 Paket	75.754.000	1 Paket	75.754.000	1 Paket	83.329.400,00	1 Paket	83.329.400,00	1 Paket	83.329.400,00		401.496.200	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				1 paket	127.472.000	1 paket	130.000.000	1 paket	130.000.000	1 paket	135.000.000	1 paket	135.000.000	5 paket	657.472.000	

		1.02.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokum en	6 dokum en	1 doku men	1 dokum en	6.840.000	1 dokum en	6.840.000	1 dokum en	7.524.000,00	1 dokum en	7.524.000,00	1 dokum en	7.524.000,00		36.252.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan			4 dokum en		5.040.000	4 dokum en	6.000.000	4 dokum en	6.000.000	4 dokum en	6.000.000	4 dokum en	6.000.000	20 doku men	29.040.000	
		1.02.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lapo ran	12 Lapo ran	1 Lapo ran	1 Lapo ran	11.754.000	1 Lapo ran	11.754.000	1 Lapo ran	12.929.400,00	1 Lapo ran	12.929.400,00	1 Lapo ran	12.929.400,00		62.296.200	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu			12 lapo ran		7.683.000	12 lapo ran	10.000.000	12 lapo ran	10.000.000	12 lapo ran	12.000.000	12 lapo ran	12.000.000	60 lapo ran	51.683.000	
		1.02.01.2.06.009	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lapo ran	40 Lapo ran	1 Lapo ran	1 Lapo ran	183.898.000	1 Lapo ran	183.898.000	1 Lapo ran	193.092.900,00	1 Lapo ran	202.287.800,00	1 Lapo ran	202.287.800,00		965.464.500	
			Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			12 lapo ran		84.415.000	12 lapo ran	100.000.000	12 lapo ran	112.000.000	12 lapo ran	115.000.000	12 lapo ran	120.000.000	60 lapo ran	531.415.000	
		1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						144.246.600		148.000.000		152.000.000		157.000.000		161.000.000			
		1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan			1 unit		36.225.000	1 unit	38.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	43.000.000	1 unit	45.000.000	5 unit	202.225.000	
		1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan			2 unit		108.021.600	2 unit	110.000.000	2 unit	112.000.000	2 unit	114.000.000	2 unit	116.000.000	10 unit	560.021.600	

		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						856.224.800		882.609.800		904.515.290		927.920.780		932.920.780			
		1.02.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.750.000	1 Laporan	3.750.000	1 Laporan	3.937.500,00	1 Laporan	4.125.000,00	1 Laporan	4.125.000,00		19.687.500	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				12 laporan	4.200.000	12 laporan	4.500.000	12 laporan	4.500.000	12 laporan	5.000.000	12 laporan	5.000.000	60 laporan	23.200.000	
		1.02.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	78.800.000	1 Laporan	78.800.000	1 Laporan	82.740.000,00	1 Laporan	86.680.000,00	1 Laporan	86.680.000,00		413.700.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan				3 laporan	524.995.000	3 laporan	550.000.000	3 laporan	555.000.000	3 laporan	560.000.000	3 laporan	565.000.000	15 laporan	2.754.995.000	
		1.02.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	215.559.800,00	1 Laporan	215.559.800,00	1 Laporan	226.337.790,00	1 Laporan	237.115.780,00	1 Laporan	237.115.780,00		1.131.688.950	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				12 laporan	28.920.000	12 laporan	30.000.000	12 laporan	32.000.000	12 laporan	35.000.000	12 laporan	35.000.000	60 laporan	160.920.000	
		1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						954.638.400		968.124.000		998.530.200		1.023.936.400		1.039.936.400			
		1.02.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 unit	28 unit	20 unit	20 Unit	223.450.000	20 Unit	223.450.000	20 Unit	234.622.500,00	20 Unit	245.795.000,00	20 Unit	245.795.000,00		1.173.112.500	

		1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			16 unit	201.389.400	16 unit	205.000.000	16 unit	210.000.000	16 unit	215.000.000	16 unit	220.000.000	16 unit	1.051.389.400	
		1.02.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya			14 unit	83.170.000	14 unit	85.000.000	14 unit	86.000.000	14 unit	87.000.000	14 unit	88.000.000	14 unit	429.170.000	
		1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan mebel	jumlah mebel yang dipelihara			20 unit/set	75.000.000	20 unit/set	75.000.000	20 unit/set	75.000.000	20 unit/set	75.000.000	20 unit/set	75.000.000	100 unit/set	375.000.000	
		1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			4 unit	100.000.000	4 unit	105.000.000	4 unit	110.000.000	4 unit	110.000.000	4 unit	115.000.000	4 unit	540.000.000	
		1.02.01.2.09.009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	47Unit	4 Unit	54.814.000	4 Unit	54.814.000	4 Unit	57.554.700,00	4 Unit	60.295.400,00	4 Unit	60.295.400,00		287.773.500	
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			4 unit	206.955.000	4 unit	210.000.000	4 unit	215.000.000	4 unit	220.000.000	4 unit	225.000.000	20 unit	1.076.955.000	
		1.02.01.2.09.010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	15 Unit	4 Unit	9.860.000	4 Unit	9.860.000	4 Unit	10.353.000,00	4 Unit	10.846.000,00	4 Unit	10.846.000,00		51.765.000	
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhab			4 unit	409.860.000	4 unit	415.000.000	4 unit	415.000.000	4 unit	420.000.000	4 unit	420.000.000	20 unit	2.079.860.000	

			Bangunan Lainnya	ilitasi (RSUD)															
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					40.473.295.283		40.454.477.113		41.336.340.969		41.336.340.969		41.336.340.969			
		1.02.01.2.10.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit kerja	16 Unit kerja	1 Unit kerja	40.000.000	1 Unit kerja	40.000.000	1 Unit kerja	44.000.000,00	1 Unit kerja	44.000.000,00	1 Unit kerja	44.000.000,00			
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah BLUD RSUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan			1 unit kerja	22.857.200.000	1 unit kerja	22.857.200.000	1 unit kerja	22.857.200.000	1 unit kerja	22.857.200.000	1 unit kerja	22.857.200.000	1 unit	114.286.000.000	
												-		-		-			
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					86.403.461.652		91.416.858.608		95.290.931.095		98.453.796.290		98.469.796.290		470.034.843.935	
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					46.375.165.108		51.398.688.864		53.327.118.254		55.275.547.644		55.287.547.644		261.664.067.514	
		1.02.02.2.01.003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun		1 unit	10 unit	8.748.112.000,00	10 unit	8.748.112.000,00	10 unit	9.185.517.600,00	10 unit	9.622.923.200,00	10 unit	9.622.923.200,00		45.927.588.000	
			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya di RSUD yang Dibangun			unit	-	unit		unit		unit		unit				
		1.02.02.2.01.004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah dinas tenaga kesehatan yang di bangun		7 unit	5 Unit	1.066.500.000,00	5 Unit	1.066.500.000,00	5 Unit	1.119.825.000,00	5 Unit	1.173.150.000,00	5 Unit	1.173.150.000,00		5.599.125.000	

		1.02.02.2.01.0005	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit			unit	-	1 unit	5.000.000.000	1 unit	5.000.000.000	1 unit	5.000.000.000	1 unit	5.000.000.000	1 unit	20.000.000.000	
		1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit		35 unit	35 unit	388.200.000	35 unit	400.000.000	35 unit	420.000.000	35 unit	430.000.000	35 unit	440.000.000	35 unit	2.078.200.000	
		1.02.02.2.01.009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana dan prasarana dan alat kesehatan yang telah di lakukan pemeliharaan oleh puskesmas		4 unit	8 unit	1.295.960.000,00	8 unit	1.295.960.000,00	8 unit	1.360.758.000,00	8 unit	1.425.556.000,00	8 unit	1.425.556.000,00		6.803.790.000	
		1.02.02.2.01.010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah di lakukan pemeliharaan/ rehabilitasi oleh fasilitas kesehatan lainnya		18 unit	23 Unit	15.020.579.000,00	23 Unit	15.020.579.000,00	23 Unit	15.771.607.950,00	23 Unit	16.522.636.900,00	23 Unit	16.522.636.900,00		78.858.039.750	

		1.02.02.2. 01.011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah sarana dan prasaran rumah dinas tenaga kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan		8 unit	8 Unit	8 Unit	801.520.00,00	8 Unit	801.520.00,00	8 Unit	841.596.00,00	8 Unit	881.672.00,00	8 Unit	881.672.00,00		4.207.980.000	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan di RSUD		2 Unit		2 unit	112.320.000	2 unit	114.000.000	2 unit	116.000.000	2 unit	118.000.000	2 unit	120.000.000	10 unit	580.320.000	
		1.02.02.2. 01.014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang di sediakan		18 unit	9 Unit	9 Unit	3.995.139.000,00	9 Unit	3.995.139.000,00	9 Unit	4.194.895.950,00	9 Unit	4.394.652.900,00	9 Unit	4.394.652.900,00		20.974.479.750	
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan di RSUD		17 Unit		17 unit	7.646.101.064	17 unit	7.646.101.064	17 unit	7.646.101.064	17 unit	7.646.101.064	17 unit	7.646.101.064	85 unit	38.230.505.320	
		1.02.02.2. 01.0016	Pengadaan Obat, Vaksih	Jumlah Obat dan Vaksin yang disediakan di RSUD				2 paket	-	2 paket	-	2 paket	-	2 paket	-	2 paket	-		-	
		1.02.02.2. 01.0017	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan di RSUD				1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-		-	
		1.02.02.2. 01.020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		738 unit	266 Unit	266 Unit	172.410.000,00	266 Unit	172.410.000,00	266 Unit	181.030.500,00	266 Unit	189.651.000,00	266 Unit	189.651.000,00		905.152.500	

		1.02.02.2. 01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar di RSUD			35 unit	99.956.244	40 unit	110.000.000	40 unit	110.000.000	45 unit	140.000.000	45 unit	140.000.000	205 unit	599.956.244	
		1.02.02.2. 01.023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		2 paket	1 Paket	6.873.116.000,00	1 Paket	6.873.116.000,00	1 Paket	7.216.771.800,00	1 Paket	7.560.427.600,00	1 Paket	7.560.427.600,00		36.083.859.000	
		1.02.02.2. 01.024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		525 keliarga	1200 Kk	52.199.800,00	1200 Kk	52.199.800,00	1200 Kk	54.809.790,00	1200 Kk	57.419.780,00	1200 Kk	57.419.780,00		274.048.950	
		1.02.02.2. 01.026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan		15 paket	1 Paket	103.052.000,00	1 Paket	103.052.000,00	1 Paket	108.204.600,00	1 Paket	113.357.200,00	1 Paket	113.357.200,00		541.023.000	
		1.02.02.2. 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					39.845.389.394,00		39.859.852.594,00		41.799.432.723,70		43.007.805.560,90		43.011.805.560,90			
		1.02.02.2. 02.001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		300 org	300 org	69.450.000,00	300 org	69.450.000,00	300 org	72.922.500,00	300 org	76.395.000,00	300 org	76.395.000,00		364.612.500	

				Sesuai Standar																
		1.02.02.2. 02.002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		330 org	350 org	350 org	42.000.00 0,00	350 org	42.000.00 0,00	350 org	44.100.00 0,00	350 org	46.200.00 0,00	350 org	46.200.00 0,00		220.500.0 00	
		1.02.02.2. 02.004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		300 org	200 org	200 org	32.000.00 0,00	200 org	32.000.00 0,00	200 org	33.600.00 0,00	200 org	35.200.00 0,00	200 org	35.200.00 0,00		168.000.0 00	
		1.02.02.2. 02.006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		50500 org	5050 0 org	50500 org	117.000.0 00,00	50500 org	117.000.0 00,00	50500 org	122.850.0 00,00	50500 org	128.700.0 00,00	50500 org	128.700.0 00,00		614.250.0 00	
		1.02.02.2. 02.007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		300 org	150 orgv	150 orgv	188.723.6 00,00	150 orgv	188.723.6 00,00	150 orgv	198.159.7 80,00	150 orgv	207.595.9 60,00	150 orgv	207.595.9 60,00		990.798.9 00	
		1.02.02.2. 02.008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		18000 org	1800 0 org	18000 org	76.000.00 0,00	18000 org	76.000.00 0,00	18000 org	79.800.00 0,00	18000 org	83.600.00 0,00	18000 org	83.600.00 0,00		399.000.0 00	
		1.02.02.2. 02.009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		3000 org	3000 org	3000 org	27.500.00 0,00	3000 org	27.500.00 0,00	3000 org	28.875.00 0,00	3000 org	30.250.00 0,00	3000 org	30.250.00 0,00		144.375.0 00	
		1.02.02.2. 02.010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		517 org	531 org	531 org	105.000.0 00,00	531 org	105.000.0 00,00	531 org	110.250.0 00,00	531 org	115.500.0 00,00	531 org	115.500.0 00,00		551.250.0 00	
		1.02.02.2. 02.011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan		4000 org	45 org	45 org	35.591.00 0,00	45 org	35.591.00 0,00	45 org	37.370.55 0,00	45 org	39.150.10 0,00	45 org	39.150.10 0,00		186.852.7 50	

				Pelayanan Sesuai Standar																
		1.02.02.2.02.012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		45 orang	35 org	35 org	85.980.000,00	35 org	85.980.000,00	35 org	90.279.000,00	35 org	94.578.000,00	35 org	94.578.000,00		451.395.000	
		1.02.02.2.02.013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	135.873.000,00	1 Dokumen	135.873.000,00	1 Dokumen	142.666.650,00	1 Dokumen	149.460.300,00	1 Dokumen	149.460.300,00		713.333.250	
		1.02.02.2.02.016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	28.139.000,00	1 Dokumen	28.139.000,00	1 Dokumen	29.545.950,00	1 Dokumen	30.952.900,00	1 Dokumen	30.952.900,00		147.729.750	
		1.02.02.2.02.017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.840.000,00	1 Dokumen	50.840.000,00	1 Dokumen	53.382.000,00	1 Dokumen	55.924.000,00	1 Dokumen	55.924.000,00		266.910.000	
		1.02.02.2.02.018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	529.600.000,00	1 Dokumen	529.600.000,00	1 Dokumen	556.080.000,00	1 Dokumen	582.560.000,00	1 Dokumen	582.560.000,00		2.780.400.000	
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Di RSUD		12 Dokumen	12 Dokumen	3 dokumen	97.116.000	3 dokumen	100.000.000	3 dokumen	100.000.000	3 dokumen	100.000.000	3 dokumen	100.000.000	15 dokumen	497.116.000	
		1.02.02.2.02.020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	80.290.000,00	1 Dokumen	80.290.000,00	1 Dokumen	84.304.500,00	1 Dokumen	88.319.000,00	1 Dokumen	88.319.000,00		421.522.500	

			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di RSUD				dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-			
		1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan pelayanan keaehatan jiwa dan NAPZA	Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD		0		46 orang	45.712.000	46 orang	45.712.000	46 orang	45.712.000	46 orang	45.712.000	46 orang	45.712.000	230 orang	228.560.000	
		1.02.02.2.02.024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	227.573.000,00	1 Dokumen	227.573.000,00	1 Dokumen	238.951.650,00	1 Dokumen	250.330.300,00	1 Dokumen	250.330.300,00		1.194.758.250	
		1.02.02.2.02.025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	324.154.400,00	1 Dokumen	324.154.400,00	1 Dokumen	340.467.120,00	1 Dokumen	356.679.840,00	1 Dokumen	356.679.840,00		1.702.135.600	
		1.02.02.2.02.026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	18.105.433.744,00	1 Dokumen	18.105.433.744,00	1 Dokumen	19.010.705.431,20	1 Dokumen	19.915.977.118,40	1 Dokumen	19.915.977.118,40		95.053.527.156	
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat RSUD		12 Dokumen		12 dokumen	238.138.000	12 dokumen	238.138.000	12 dokumen	238.138.000	12 dokumen	238.138.000	12 dokumen	238.138.000	60 dokumen	1.190.690.000	
		1.02.02.2.02.028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		20 Paket	1 Paket	1 Paket	24.520.000,00	1 Paket	24.520.000,00	1 Paket	25.746.000,00	1 Paket	26.972.000,00	1 Paket	26.972.000,00		128.730.000	
		1.02.02.2.02.029	Penyelenggaraan Kabupaten/Ko	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	32.500.000,00	1 Dokumen	32.500.000,00	1 Dokumen	34.125.000,00	1 Dokumen	35.750.000,00	1 Dokumen	35.750.000,00		170.625.000	

			ta Sehat	Kabupaten/Kota Sehat																
		1.02.02.2.02.034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		4 Dokum en	1 Doku men	1 Doku men	609.565.000,00	1 Doku men	609.565.000,00	1 Doku men	612.743.250,00	1 Doku men	641.921.500,00	1 Doku men	641.921.500,00		3.115.716.250	
		1.02.02.2.02.035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		15 unit	15 Unit	15 Unit	111.544.000,00	15 Unit	111.544.000,00	15 Unit	117.121.200,00	15 Unit	122.698.400,00	15 Unit	122.698.400,00		585.606.000	
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		Paripurna	Paripurna	1 unit	160.500.000	1 unit	160.500.000	1 unit	160.500.000	1 unit	160.500.000	1 unit	160.500.000	1 unit	802.500.000	
		1.02.02.2.02.038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		15 unit	15 Unit	15 Unit	2.585.736.000,00	15 Unit	2.585.736.000,00	15 Unit	2.715.022.800,00	15 Unit	2.844.309.600,00	15 Unit	2.844.309.600,00		13.575.114.000	
		1.02.02.2.02.040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		400 org	200 org	200 org	62.000.000,00	200 org	62.000.000,00	200 org	65.100.000,00	200 org	68.200.000,00	200 org	68.200.000,00		325.500.000	
		1.02.02.2.02.041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		10 org	35 org	35 org	47.550.000,00	35 org	47.550.000,00	35 org	49.927.500,00	35 org	52.305.000,00	35 org	52.305.000,00		249.637.500	
		1.02.02.2.02.042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		200 org	25 org	25 org	46.751.000,00	25 org	46.751.000,00	25 org	49.088.550,00	25 org	51.426.100,00	25 org	51.426.100,00		245.442.750	

		1.02.02.2.02.045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	16.230.000,00	1 Dokumen	16.230.000,00	1 Dokumen	17.041.500,00	1 Dokumen	17.853.000,00	1 Dokumen	17.853.000,00		85.207.500	
		1.02.02.2.02.046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	395.813.000,00	1 Dokumen	395.813.000,00	1 Dokumen	415.603.650,00	1 Dokumen	435.394.300,00	1 Dokumen	435.394.300,00		2.078.018.250	
			Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	67.901.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		89.000.000,00		406.901.000	
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						130.617.150,00		130.617.150,00		135.295.117,50		139.973.085,00		139.973.085,00			
		1.02.02.2.03.002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen (Profil) Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	93.559.350,00	2 Dokumen	93.559.350,00	2 Dokumen	98.237.317,50	2 Dokumen	102.915.285,00	2 Dokumen	102.915.285,00		491.186.588	
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan RSUD		1 dokumen		1 dokumen	37.057.800	1 dokumen	37.057.800	1 dokumen	37.057.800	1 dokumen	37.057.800	1 dokumen	37.057.800		185.289.000	
													-		-		-			
		1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						52.290.000,00		27.700.000,00		29.085.000,00		30.470.000,00		30.470.000,00			

		1.02.02.2.04.001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang di kendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya		1 Unit	2 Unit	2 Unit	27.700.000,00	2 Unit	27.700.000,00	2 Unit	29.085.000,00	2 Unit	30.470.000,00	2 Unit	30.470.000,00		145.425.000	
		1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan/RSUD yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		1 unit		1 unit	24.590.000	1 unit	24.590.000	1 unit	27.500.000	1 unit	27.500.000	1 unit	30.000.000	1 unit	134.180.000	
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						7.378.431.200,00		7.378.431.200,00		7.600.341.010,00		7.813.893.320,00		7.813.893.320,00		37.984.990.050	
		1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota						49.425.000,00		49.425.000,00		54.367.500,00		54.367.500,00		54.367.500,00		261.952.500	
		1.02.03.2.01.001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan		3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.250.000,00	1 Dokumen	5.500.000,00	1 Dokumen	5.500.000,00		26.250.000	
		1.02.03.2.01.002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	44.425.000,00	1 Dokumen	44.425.000,00	1 Dokumen	46.646.250,00	1 Dokumen	48.867.500,00	1 Dokumen	48.867.500,00		233.231.250	
		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan						6.484.906.		6.484.906.		6.658.832.		6.832.759.		6.832.759.		33.294.16	

			dan Pendayagun aan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/K ota						200,00		200,00		760,00		320,00		320,00		3.800	
		1.02.03.2. 02001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan		1 Dokum en	1 Doku men	1 Doku men	57.000.00 0,00	1 Doku men	57.000.00 0,00	1 Doku men	59.850.00 0,00	1 Doku men	62.700.00 0,00	1 Doku men	62.700.00 0,00		299.250.0 00	
		1.02.03.2. 02002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)		275 org	100 org	100 org	3.421.531. 200,00	100 org	3.421.531. 200,00	100 org	3.592.607. 760,00	100 org	3.763.684. 320,00	100 org	3.763.684. 320,00		17.963.03 8.800	
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di RSUD				168 orang	3.006.375. 000	168 orang	3.006.375. 000	168 orang	3.006.375. 000	168 orang	3.006.375. 000	168 orang	3.006.375. 000	840 oran g	15.031.87 5.000	
		1.02.03.2. 03	Pengembang an Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/K ota						844.100.0 00,00		844.100.0 00,00		887.140.7 50,00		926.766.5 00,00		926.766.5 00,00		4.428.873 .750	
		1.02.03.2. 03.001	Pengembang an Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah sumberdaya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan		165 org	100 org	100 org	792.515.0 00,00	100 org	792.515.0 00,00	100 org	832.140.7 50,00	100 org	871.766.5 00,00	100 org	871.766.5 00,00		4.160.703 .750	

			Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	kompetensinya																
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan RSUD tingkat daerah kab/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya				60 orang	51.585.000	60 orang	51.585.000	60 orang	55.000.000	60 orang	55.000.000	60 orang	55.000.000	300 orang	268.170.000	
		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						422.081.000		422.081.000		447.383.325		464.289.100		464.289.100		2.220.123.525	
		1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						83.965.500		83.965.500		92.362.050,00		92.362.050,00		92.362.050,00		445.017.150	
		1.02.04.2.01.001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	83.965.500	1 Dokumen	83.965.500	1 Dokumen	92.362.050,00	1 Dokumen	92.362.050,00	1 Dokumen	92.362.050,00		445.017.150	

		1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						125.742.000		125.742.000			132.029.100		138.316.200		138.316.200		660.145.500	
		1.02.04.2.03.001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan no. P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	125.742.000	1 Dokumen	125.742.000	1 Dokumen	132.029.100,00	1 Dokumen	138.316.200,00	1 Dokumen	138.316.200,00		660.145.500		
		1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri						212.373.500		212.373.500		222.992.175		233.610.850		233.610.850		1.114.960.875		

			Rumah Tangga																	
		1.02.04.2. 06.001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah produk dan sarana produksi makanan - minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindaklanjut pengawasan		34 Unit	5 unit	5 unit	212.373.5 00	5 unit	212.373.5 00	5 unit	222.992.1 75,00	5 unit	233.610.8 50,00	5 unit	233.610.8 50,00		1.114.960 .875	
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAK AT BIDANG KESEHATAN						330.931.8 00		330.931.8 00		349.668.0 90		357.677.1 90		357.677.1 90		1.726.886 .070	
		1.02.05.2. 01	Advokasi, Pemberdaya an, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/K ota						43.794.00 0		43.794.00 0		48.173.40 0,00		48.173.40 0,00		48.173.40 0,00		232.108.2 00	
		1.02.05.2. 01.001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaa n Masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat		1 Dokum en	1 Doku men	1 Doku men	43.794.00 0	1 Doku men	43.794.00 0	1 Doku men	45.983.70 0,00	1 Doku men	48.173.40 0,00	1 Doku men	48.173.40 0,00		229.918.5 00	
		1.02.05.2. 02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/K ota						17.259.00 0		17.259.00 0		18.121.95 0		18.984.90 0		18.984.90 0		90.609.75 0	

		1.02.05.2.02.001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	17.259.000	1 Dokumen	17.259.000	1 Dokumen	18.121.950,00	1 Dokumen	18.984.900,00	1 Dokumen	18.984.900,00		90.609.750	
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						142.923.000		142.923.000		150.069.150		157.215.300		157.215.300		750.345.750	
		1.02.05.2.03.001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	142.923.000	1 Dokumen	142.923.000	1 Dokumen	150.069.150,00	1 Dokumen	157.215.300,00	1 Dokumen	157.215.300,00		750.345.750	
						blud			17.576.095.283		17.557.277.113		18.435.140.969		18.435.140.969		18.435.140.969		90.438.795.302	
						prog 2			15.042.665.650		15.042.145.850		15.794.253.143		15.794.253.143		15.794.253.143		77.467.570.928	
						prog 5			126.955.800		126.955.800		133.303.590		133.303.590		133.303.590		653.822.370	
			PUSKESMAS						32.745.716.733		32.726.378.763	-	34.362.697.701	-	34.362.697.701	-	34.362.697.701		168.560.188.599	
			PUSKESMAS AIR HITAM						1.638.016.074		1.638.016.074		1.719.916.878		1.719.916.878		1.719.916.878		8.435.782.781	
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN															-		

			/KOTA																
		1.02.01.2. 10	Peningkatan Pelayanan BLUD															-	
		1.02.01.2. 10.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	564.022.4 24		564.022.4 24		592.223.5 45		592.223.5 45		592.223.5 45		2.904.715 .484
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAK AT																
		1.02.02.2. 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/K ota						1.067.043. 650		1.067.043. 650		1.120.395. 833		1.120.395. 833		1.120.395. 833		5.495.274 .798
		1.02.02.2. 02.001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			268 org	273 org	192.600.0 00		192.600.0 00		202.230.0 00		202.230.0 00		202.230.0 00		991.890.0 00
		1.02.02.2. 02.005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2587 org	2632 org	33.000.00 0		33.000.00 0		34.650.00 0		34.650.00 0		34.650.00 0		169.950.0 00
		1.02.02.2. 02.010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0	0	0	21 org	13.200.00 0		13.200.00 0		13.860.00 0		13.860.00 0		13.860.00 0		67.980.00 0

		1.02.02.2. 02.011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			212 org	212 org	16.200.000		16.200.000		17.010.000		17.010.000		17.010.000		83.430.000	
		1.02.02.2. 02.015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 Dokumen	1 Dokumen	282.075.000		282.075.000		296.178.750		296.178.750		296.178.750		1.452.686.250	
		1.02.02.2. 02.016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000		7.000.000		7.350.000		7.350.000		7.350.000		36.050.000	
		1.02.02.2. 02.017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Dokumen	1 Dokumen	14.000.000		14.000.000		14.700.000		14.700.000		14.700.000		72.100.000	
		1.02.02.2. 02.020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen	1 Dokumen	23.150.000		23.150.000		24.307.500		24.307.500		24.307.500		119.222.500	
		1.02.02.2. 02.021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0	0	0	10 org	5.400.000		5.400.000		5.670.000		5.670.000		5.670.000		27.810.000	
		1.02.02.2. 02.025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen	1 Dokumen	124.536.000		124.536.000		130.762.800		130.762.800		130.762.800		641.360.400	
		1.02.02.2. 02.033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	1 Dokumen	345.382.650		345.382.650		362.651.783		362.651.783		362.651.783		1.778.720.648	
		1.02.02.2. 02.044	Pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 Dokumen	1 Dokumen	8.576.000		8.576.000		9.004.800		9.004.800		9.004.800		44.166.400	

		1.02.02.2. 02.046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 Doku men	1 Doku men	724.000		724.000		760.200		760.200		760.200		3.728.600	
		1.02.02.2. 02.047	Pengelolaan pelayanan kesehatan Kelanjut usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	0	0	0	1 Doku men	1.200.000		1.200.000		1.260.000		1.260.000		1.260.000		6.180.000	
																			-	
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAK AT BIDANG KESEHATAN																-	
		1.02.05.2. 03	Pengembang an dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/K ota						6.950.000		6.950.000		7.297.500		7.297.500		7.297.500		35.792.50 0	
		1.02.05.2. 03.001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembang an dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Doku men	1 Dokum en	1 Doku men	1 Doku men	6.950.000		6.950.000		7.297.500		7.297.500		7.297.500		35.792.50 0	
																			-	
			PUSKESMAS BATU BRAK						2.221.054. 707		2.221.054. 707		2.332.107. 442		2.332.107. 442		2.332.107. 442		11.438.43 1.741	
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN																-	

			/KOTA																
		1.02.01.2. 10	Peningkatan Pelayanan BLUD															-	
		1.02.01.2. 10.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit kerja	1 Unit kerja	1 Unit kerja	1 Unit kerja	1 Unit kerja	1.195.301. 057	1 Unit kerja	1.195.301. 057	1 Unit kerja	1.255.066. 110	1 Unit kerja	1.255.066. 110	1 Unit kerja	1.255.066. 110	1 Unit kerja	6.155.800 .444
																		-	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAK AT															-	
		1.02.02.2. 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/K ota					1.016.635. 650		1.016.635. 650		1.067.467. 433		1.067.467. 433		1.067.467. 433		5.235.673 .598	
		1.02.02.2. 02.001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			331 org	336 org	186.600.0 00		186.600.0 00		195.930.0 00		195.930.0 00		195.930.0 00		960.990.0 00
		1.02.02.2. 02.005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			3194 org	3241 org	22.500.00 0		22.500.00 0		23.625.00 0		23.625.00 0		23.625.00 0		115.875.0 00
		1.02.02.2. 02.010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangghuan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0	0	0	26 org	13.500.00 0		13.500.00 0		14.175.00 0		14.175.00 0		14.175.00 0		69.525.00 0

		1.02.02.2. 02.011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			101 org	260 org	10.700.000		10.700.000		11.235.000		11.235.000		11.235.000		55.105.000	
		1.02.02.2. 02.015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 Dokumen	1 Dokumen	251.245.000		251.245.000		263.807.250		263.807.250		263.807.250		1.293.911.750	
		1.02.02.2. 02.016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000		6.500.000		6.825.000		6.825.000		6.825.000		33.475.000	
		1.02.02.2. 02.017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Dokumen	1 Dokumen	10.500.000		10.500.000		11.025.000		11.025.000		11.025.000		54.075.000	
		1.02.02.2. 02.020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen	1 Dokumen	20.900.000		20.900.000		21.945.000		21.945.000		21.945.000		107.635.000	
		1.02.02.2. 02.021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0	0	0	13 org	5.400.000		5.400.000		5.670.000		5.670.000		5.670.000		27.810.000	
		1.02.02.2. 02.025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen	1 Dokumen	135.786.000		135.786.000		142.575.300		142.575.300		142.575.300		699.297.900	
		1.02.02.2. 02.033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	1 Dokumen	331.004.650		331.004.650		347.554.883		347.554.883		347.554.883		1.704.673.948	
		1.02.02.2. 02.044	Pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 Dokumen	1 Dokumen	19.296.000		19.296.000		20.260.800		20.260.800		20.260.800		99.374.400	

		1.02.02.2. 02.046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 Doku men	1 Doku men	904.000		904.000		949.200		949.200		949.200		4.655.600	
		1.02.02.2. 02.047	Pengelolaan pelayanan kesehatan Kelanjut usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	0	0	0	1 Doku men	1.800.000		1.800.000		1.890.000		1.890.000		1.890.000		9.270.000	
																			-	
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAK AT BIDANG KESEHATAN																-	
		1.02.05.2. 03	Pengembang an dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/K ota						9.118.000		9.118.000		9.573.900		9.573.900		9.573.900		46.957.70 0	
		1.02.05.2. 03.001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembang an dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Doku men	1 Dokum en	1 Doku men	1 Doku men	9.118.000		9.118.000		9.573.900		9.573.900		9.573.900		46.957.70 0	
																			-	
			PUSKESMAS BATU KETULIS						1.971.042. 270		2.002.224. 300		2.102.335. 515		2.102.335. 515		2.102.335. 515		10.280.27 3.115	
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN																-	

			/KOTA																	
		1.02.01.2. 10	Peningkatan Pelayanan BLUD																-	
		1.02.01.2. 10.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	965.907.2 20,00		997.089.0 50		1.046.943. 503		1.046.943. 503		1.046.943. 503		5.103.826 .778	
																			-	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAK AT																-	
		1.02.02.2. 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/K ota						997.089.0 50		997.089.2 50		1.046.943. 713		1.046.943. 713		1.046.943. 713		5.135.009 .438	
		1.02.02.2. 02.001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			294 org	301 org	208.908.0 00		208.908.0 00		219.353.4 00		219.353.4 00		219.353.4 00		1.075.876 .200	
		1.02.02.2. 02.005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2838 org	2905 org	28.000.00 0		28.000.00 0		29.400.00 0		29.400.00 0		29.400.00 0		144.200.0 00	
		1.02.02.2. 02.010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangghuan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0	0	0	24 org	6.600.000		6.600.000		6.930.000		6.930.000		6.930.000		33.990.00 0	

		1.02.02.2. 02.011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			300 org	233 org	34.300.000		34.300.000		36.015.000		36.015.000		36.015.000		176.645.000	
		1.02.02.2. 02.015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 Dokumen	1 Dokumen	234.430.400		234.430.400		246.151.920		246.151.920		246.151.920		1.207.316.560	
		1.02.02.2. 02.016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1 Dokumen	1 Dokumen	7.750.000		7.750.000		8.137.500		8.137.500		8.137.500		39.912.500	
		1.02.02.2. 02.017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Dokumen	1 Dokumen	14.800.000		14.800.000		15.540.000		15.540.000		15.540.000		76.220.000	
		1.02.02.2. 02.020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen	1 Dokumen	13.200.000		13.200.000		13.860.000		13.860.000		13.860.000		67.980.000	
		1.02.02.2. 02.021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0	0	0	25 org	3.600.000		3.600.000		3.780.000		3.780.000		3.780.000		18.540.000	
		1.02.02.2. 02.025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen	1 Dokumen	101.542.000		101.542.000		106.619.100		106.619.100		106.619.100		522.941.300	
		1.02.02.2. 02.033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	1 Dokumen	335.816.650		335.816.650		352.607.483		352.607.483		352.607.483		1.729.455.748	
		1.02.02.2. 02.044	Pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 Dokumen	1 Dokumen	6.632.000		6.632.200		6.963.810		6.963.810		6.963.810		34.155.630	

		1.02.02.2. 02.046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 Doku men	1 Doku men	310.000		310.000		325.500		325.500		325.500		1.596.500	
		1.02.02.2. 02.047	Pengelolaan pelayanan kesehatan Kelanjut usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	0	0	0	1 Doku men	1.200.000		1.200.000		1.260.000		1.260.000		1.260.000		6.180.000	
													-		-		-		-	
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAK AT BIDANG KESEHATAN										-		-		-		-	
		1.02.05.2. 03	Pengembang an dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/K ota						8.046.000		8.046.000		8.448.300		8.448.300		8.448.300		41.436.90 0	
		1.02.05.2. 03.001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembang an dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Doku men	1 Dokum en	1 Doku men	1 Doku men	8.046.000		8.046.000		8.448.300		8.448.300		8.448.300		41.436.90 0	
																			-	
			PUSKESMAS BANDAR NEGERI SUOH						2.349.101. 150		2.349.101. 150		2.466.556. 208		2.466.556. 208		2.466.556. 208		12.097.87 0.923	
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH																-	

			KABUPATEN /KOTA																	
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																-	
		1.02.01.2.10.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1.300.000.000		1.300.000.000		1.365.000.000		1.365.000.000		1.365.000.000		6.695.000.000	
																			-	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																-	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.042.797.150		1.042.797.150		1.094.937.008		1.094.937.008		1.094.937.008		5.370.405.323	
		1.02.02.2.02.001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			554 org	564 org	203.196.000		203.196.000		213.355.800		213.355.800		213.355.800		1.046.459.400	
		1.02.02.2.02.005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			5345 org	5443 org	8.600.000		8.600.000		9.030.000		9.030.000		9.030.000		44.290.000	
		1.02.02.2.02.010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangghuan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	0	0	0	44 org	18.000.000		18.000.000		18.900.000		18.900.000		18.900.000		92.700.000	

				Standar																
		1.02.02.2. 02.011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			438 org	437 org	7.800.000		7.800.000		8.190.000		8.190.000		8.190.000		40.170.000	
		1.02.02.2. 02.015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 dokumen	1 dokumen	227.067.500		227.067.500		238.420.875		238.420.875		238.420.875		1.169.397.625	
		1.02.02.2. 02.016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1 dokumen	1 Dokumen	13.500.000		13.500.000		14.175.000		14.175.000		14.175.000		69.525.000	
		1.02.02.2. 02.017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 dokumen	1 Dokumen	10.400.000		10.400.000		10.920.000		10.920.000		10.920.000		53.560.000	
		1.02.02.2. 02.020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 dokumen	1 Dokumen	17.487.500		17.487.500		18.361.875		18.361.875		18.361.875		90.060.625	
		1.02.02.2. 02.021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0	0	0	22 org	4.200.000		4.200.000		4.410.000		4.410.000		4.410.000		21.630.000	
		1.02.02.2. 02.025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 dokumen	1 Dokumen	146.878.500		146.878.500		154.222.425		154.222.425		154.222.425		756.424.275	
		1.02.02.2. 02.033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 dokumen	1 Dokumen	376.763.650		376.763.650		395.601.833		395.601.833		395.601.833		1.940.332.798	
		1.02.02.2. 02.044	Pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan			1 dokumen	1 Dokumen	6.632.000		6.632.000		6.963.600		6.963.600		6.963.600		34.154.800	

				reproduksi															
		1.02.02.2.02.046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 dokumen	1 Dokumen	472.000		472.000		495.600		495.600		495.600		2.430.800
		1.02.02.2.02.047	Pengelolaan pelayanan kesehatan Kelanjut usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	0	0	0	1 Dokumen	1.800.000		1.800.000		1.890.000		1.890.000		1.890.000		9.270.000
																			-
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																-
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						6.304.000		6.304.000		6.619.200		6.619.200		6.619.200		32.465.600
		1.02.05.2.03.001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	6.304.000		6.304.000		6.619.200		6.619.200		6.619.200		32.465.600
																			-
			PUSKESMAS BUAY NYERUPA						2.029.516.350		2.029.016.350	-	2.130.467.168	-	2.130.467.168	-	2.130.467.168		10.449.934.203
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																-

			KABUPATEN /KOTA																
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD															-	
		1.02.01.2.10.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1.104.512.000		1.104.512.000		1.159.737.600		1.159.737.600		1.159.737.600	5.688.236.800	
																		-	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															-	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						916.872.350		916.372.350		962.190.968		962.190.968		962.190.968	4.719.817.603	
		1.02.02.2.02.001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			554 org	566 org	203.040.000		203.040.000		213.192.000		213.192.000		213.192.000	1.045.656.000	
		1.02.02.2.02.005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			5350 org	5465 org	31.900.000		31.900.000		33.495.000		33.495.000		33.495.000	164.285.000	
		1.02.02.2.02.010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangghuan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	0	0	0	44 org	19.800.000		19.800.000		20.790.000		20.790.000		20.790.000	101.970.000	

				Standar																
		1.02.02.2. 02.011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			10 org	439 org	21.000.000		21.000.000		22.050.000		22.050.000		22.050.000		108.150.000	
		1.02.02.2. 02.015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 dokumen	1 dokumen	139.124.300		139.124.300		146.080.515		146.080.515		146.080.515		716.490.145	
		1.02.02.2. 02.016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1 dokumen	1 dokumen	7.750.000		7.750.000		8.137.500		8.137.500		8.137.500		39.912.500	
		1.02.02.2. 02.017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 dokumen	1 dokumen	11.500.000		11.500.000		12.075.000		12.075.000		12.075.000		59.225.000	
		1.02.02.2. 02.020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 dokumen	1 dokumen	36.756.800		36.756.800		38.594.640		38.594.640		38.594.640		189.297.520	
		1.02.02.2. 02.021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0	0	0	22 Org	4.000.000		4.000.000		4.200.000		4.200.000		4.200.000		20.600.000	
		1.02.02.2. 02.025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 dokumen	1 Dokumen	113.309.200		113.309.200		118.974.660		118.974.660		118.974.660		583.542.380	
		1.02.02.2. 02.033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 dokumen	1 Dokumen	314.210.650		314.210.650		329.921.183		329.921.183		329.921.183		1.618.184.848	
		1.02.02.2. 02.044	Pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan			1 dokumen	1 Dokumen	11.411.000		11.411.000		11.981.550		11.981.550		11.981.550		58.766.650	

				reproduksi																
		1.02.02.2. 02.046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 doku men	1 Doku men	1.270.400		1.270.400		1.333.920		1.333.920		1.333.920		6.542.560	
		1.02.02.2. 02.047	Pengelolaan pelayanan kesehatan Kelanjut usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	0	0	0	1 Doku men	1.800.000		1.300.000		1.365.000		1.365.000		1.365.000		7.195.000	
																			-	
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																-	
		1.02.05.2. 03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						8.132.000		8.132.000	-	8.538.600	-	8.538.600	-	8.538.600		41.879.800	
		1.02.05.2. 03.001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokum en	1 dokum en	1 doku men	1 Doku men	8.132.000		8.132.000		8.538.600		8.538.600		8.538.600		41.879.800	
																			-	
																			-	
			PUSKESMAS FAJAR BULAN						2.714.625. 281	-	2.714.625. 281	-	2.850.356. 545	-	2.850.356. 545	-	2.850.356. 545		13.980.320.197	
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN																-	

			PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA																	
		1.02.01.2. 10	Peningkatan Pelayanan BLUD																-	
		1.02.01.2. 10.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1.757.600. 231		1.757.600. 231		1.845.480. 243		1.845.480. 243		1.845.480. 243		9.051.641 .190	
																			-	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																-	
		1.02.02.2. 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						949.125.0 50		949.125.0 50	-	996.581.3 03	-	996.581.3 03	-	996.581.3 03		4.887.994 .008	
		1.02.02.2. 02.001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			760 org	768 org	163.800.0 00		163.800.0 00		171.990.0 00		171.990.0 00		171.990.0 00		843.570.0 00	
		1.02.02.2. 02.005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			7337 org	7406 org	42.300.00 0		42.300.00 0		44.415.00 0		44.415.00 0		44.415.00 0		217.845.0 00	
		1.02.02.2. 02.010	Pengelolaan Kesehatan Orang Dengan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang	0	0	0	60 org	35.400.00 0		35.400.00 0		37.170.00 0		37.170.00 0		37.170.00 0		182.310.0 00	

			Gangguan Jiwa Berat	dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar															
		1.02.02.2.02.011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			10 org	595 org	23.700.000		23.700.000		24.885.000		24.885.000		24.885.000		122.055.000
		1.02.02.2.02.015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 Dokumen	1 Dokumen	158.474.400		158.474.400		166.398.120		166.398.120		166.398.120		816.143.160
		1.02.02.2.02.016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1 Dokumen	1 Dokumen	15.450.000		15.450.000		16.222.500		16.222.500		16.222.500		79.567.500
		1.02.02.2.02.017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Dokumen	1 Dokumen	12.400.000		12.400.000		13.020.000		13.020.000		13.020.000		63.860.000
		1.02.02.2.02.020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen	1 Dokumen	23.115.000		23.115.000		24.270.750		24.270.750		24.270.750		119.042.250
		1.02.02.2.02.021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0	0	0	30 org	7.000.000		7.000.000		7.350.000		7.350.000		7.350.000		36.050.000
		1.02.02.2.02.025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen	1 Dokumen	132.713.000		132.713.000		139.348.650		139.348.650		139.348.650		683.471.950
		1.02.02.2.02.033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	1 Dokumen	322.422.650		322.422.650		338.543.783		338.543.783		338.543.783		1.660.476.648
		1.02.02.2.	Pengelolaan	Jumlah dokumen			1	1											

		02.044	elayanan kesehatan Reproduksi	hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			Doku men	Doku men	9.386.000		9.386.000		9.855.300		9.855.300		9.855.300		48.337.900	
		1.02.02.2.02.046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 Doku men	1 Doku men	1.164.000		1.164.000		1.222.200		1.222.200		1.222.200		5.994.600	
		1.02.02.2.02.047	Pengelolaan pelayanan kesehatan Kelanjut usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	0	0	0	1 Doku men	1.800.000		1.800.000		1.890.000		1.890.000		1.890.000		9.270.000	
																			-	
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAK AT BIDANG KESEHATAN																-	
		1.02.05.2.03	Pengembang an dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/K ota						7.900.000		7.900.000		8.295.000	-	8.295.000	-	8.295.000		40.685.000	
		1.02.05.2.03.001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembang an dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Doku men	1 Dokum en	1 Doku men	1 Doku men	7.900.000		7.900.000		8.295.000		8.295.000		8.295.000		40.685.000	
																			-	
			PUSKESMAS GEDUNG SURIAN						1.960.073.450		1.960.053.450	-	2.058.056.123	-	2.058.056.123	-	2.058.056.123		10.094.295.268	
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN																-	

			PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA																
		1.02.01.2. 10	Peningkatan Pelayanan BLUD															-	
		1.02.01.2. 10.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1.091.500. 000		1.091.500. 000		1.146.075. 000		1.146.075. 000		1.146.075. 000	5.621.225 .000	
																		-	
		1.02.02	PROGRAM PEMEMUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAK AT															-	
		1.02.02.2. 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/K ota						860.881.6 50		860.861.6 50	-	903.904.7 33	-	903.904.7 33	-	903.904.7 33	4.433.457 .498	
		1.02.02.2. 02.001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			373 org	376 org	138.180.0 00		138.180.0 00		145.089.0 00		145.089.0 00		145.089.0 00	711.627.0 00	
		1.02.02.2. 02.005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			3598 org	3632 org	21.800.00 0		21.800.00 0		22.890.00 0		22.890.00 0		22.890.00 0	112.270.0 00	
		1.02.02.2. 02.010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang	0	0	0	29 org	19.800.00 0		19.800.00 0		20.790.00 0		20.790.00 0		20.790.00 0	101.970.0 00	

			Gangghuan Jiwa Berat	dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar															
		1.02.02.2.02.011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			300 org	292 Org	16.600.000		16.600.000		17.430.000		17.430.000		17.430.000		85.490.000
		1.02.02.2.02.015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 Dokumen	1 Dokumen	184.342.000		184.342.000		193.559.100		193.559.100		193.559.100		949.361.300
		1.02.02.2.02.016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1 Dokumen	1 Dokumen	4.250.000		4.250.000		4.462.500		4.462.500		4.462.500		21.887.500
		1.02.02.2.02.017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Dokumen	1 Dokumen	12.900.000		12.900.000		13.545.000		13.545.000		13.545.000		66.435.000
		1.02.02.2.02.020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen	1 Dokumen	31.215.000		31.215.000		32.775.750		32.775.750		32.775.750		160.757.250
		1.02.02.2.02.021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0	0	0	10 org	6.600.000		6.600.000		6.930.000		6.930.000		6.930.000		33.990.000
		1.02.02.2.02.025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen	1 Dokumen	112.489.000		112.489.000		118.113.450		118.113.450		118.113.450		579.318.350
		1.02.02.2.02.033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	1 Dokumen	300.350.650		300.350.650		315.368.183		315.368.183		315.368.183		1.546.805.848
		1.02.02.2.	Pengelolaan	Jumlah dokumen			1	1											

		02.044	elayanan kesehatan Reproduksi	hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			Doku men	Doku men	10.855.000		10.835.000		11.376.750		11.376.750		11.376.750		55.820.250	
		1.02.02.2.02.046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 Doku men	1 Doku men	300.000		300.000		315.000		315.000		315.000		1.545.000	
		1.02.02.2.02.047	Pengelolaan pelayanan kesehatan Kelanjut usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kelanjutusiaan	0	0	0	1 Doku men	1.200.000		1.200.000		1.260.000		1.260.000		1.260.000		6.180.000	
																			-	
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																-	
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						7.691.800		7.691.800	-	8.076.390	-	8.076.390	-	8.076.390		39.612.770	
		1.02.05.2.03.001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Doku men	7.691.800		7.691.800		8.076.390		8.076.390		8.076.390		39.612.770	
																			-	
			PUSKESMAS KENALI						2.141.146.010		2.141.146.010	-	2.248.203.311	-	2.248.203.311	-	2.248.203.311		11.026.901.952	
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN																-	

			PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA																	
		1.02.01.2. 10	Peningkatan Pelayanan BLUD																-	
		1.02.01.2. 10.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1.179.771. 960		1.179.771. 960		1.238.760. 558		1.238.760. 558		1.238.760. 558		6.075.825 .594	
																			-	
		1.02.02	PROGRAM PEMEMUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAK AT																-	
		1.02.02.2. 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/K ota						952.524.0 50		952.524.0 50	-	1.000.150. 253	-	1.000.150. 253	-	1.000.150. 253		4.905.498 .858	
		1.02.02.2. 02.001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			273 org	276 Orang	212.160.0 00,00		212.160.0 00,00		222.768.0 00		222.768.0 00		222.768.0 00		1.092.624 .000	
		1.02.02.2. 02.005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2637 org	2661 Orang	14.300.00 0		14.300.00 0		15.015.00 0		15.015.00 0		15.015.00 0		73.645.00 0	
		1.02.02.2. 02.010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang	0	0	0	22 Orang	12.600.00 0		12.600.00 0		13.230.00 0		13.230.00 0		13.230.00 0		64.890.00 0	

			Gangguan Jiwa Berat	dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar															
		1.02.02.2.02.011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			10 org	214 Orang	13.100.000		13.100.000		13.755.000		13.755.000		13.755.000		67.465.000
		1.02.02.2.02.015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 Dokumen	1 Dokumen	205.659.400		205.659.400		215.942.370		215.942.370		215.942.370		1.059.145.910
		1.02.02.2.02.016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000		7.000.000		7.350.000		7.350.000		7.350.000		36.050.000
		1.02.02.2.02.017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Dokumen	1 Dokumen	11.500.000		11.500.000		12.075.000		12.075.000		12.075.000		59.225.000
		1.02.02.2.02.020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen	1 Dokumen	11.985.000		11.985.000		12.584.250		12.584.250		12.584.250		61.722.750
		1.02.02.2.02.021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0	0	0	11 org	5.600.000		5.600.000		5.880.000		5.880.000		5.880.000		28.840.000
		1.02.02.2.02.025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen	1 Dokumen	127.257.000		127.257.000		133.619.850		133.619.850		133.619.850		655.373.550
		1.02.02.2.02.033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	1 Dokumen	320.522.650		320.522.650		336.548.783		336.548.783		336.548.783		1.650.691.648
		1.02.02.2.	Pengelolaan	Jumlah dokumen			1	1											

		02.044	elayanan kesehatan Reproduksi	hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			Doku men	Doku men	8.576.000		8.576.000		9.004.800		9.004.800		9.004.800		44.166.400	
		1.02.02.2.02.046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 Doku men	1 Doku men	464.000		464.000		487.200		487.200		487.200		2.389.600	
		1.02.02.2.02.047	Pengelolaan pelayanan kesehatan Kelanjut usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	0	0	0	1 Doku men	1.800.000		1.800.000		1.890.000		1.890.000		1.890.000		9.270.000	
																			-	
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																-	
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						8.850.000		8.850.000	-	9.292.500	-	9.292.500	-	9.292.500		45.577.500	
		1.02.05.2.03.001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Doku men	1 Dokum en	1 Doku men	1 Doku men	8.850.000		8.850.000		9.292.500		9.292.500		9.292.500		45.577.500	
																			-	
			PUSKESMAS LIWA						2.755.955.537		2.705.955.537	-	2.841.253.314	-	2.841.253.314	-	2.841.253.314		13.985.671.016	
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN																-	

			PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA																	
		1.02.01.2. 10	Peningkatan Pelayanan BLUD																-	
		1.02.01.2. 10.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1.772.054. 887,00		1.722.054. 887		1.808.157. 631		1.808.157. 631		1.808.157. 631		8.918.582 .668	
																			-	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAK AT																-	
		1.02.02.2. 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/K ota						974.336.6 50		974.336.6 50	-	1.023.053. 483	-	1.023.053. 483	-	1.023.053. 483		5.017.833 .748	
		1.02.02.2. 02.001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			261 org	953 Org	135.984.0 00		135.984.0 00		142.783.2 00		142.783.2 00		142.783.2 00		700.317.6 00	
		1.02.02.2. 02.005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2690 org	9194 org	28.000.00 0		28.000.00 0		29.400.00 0		29.400.00 0		29.400.00 0		144.200.0 00	
		1.02.02.2. 02.010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang	0	0	0	74 org	27.500.00 0		27.500.00 0		28.875.00 0		28.875.00 0		28.875.00 0		141.625.0 00	

			Gangghuan Jiwa Berat	dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar															
		1.02.02.2.02.011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			711 org	739 org	18.000.000		18.000.000		18.900.000		18.900.000		18.900.000		92.700.000
		1.02.02.2.02.015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 Dokumen	1 Dokumen	224.262.000		224.262.000		235.475.100		235.475.100		235.475.100		1.154.949.300
		1.02.02.2.02.016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1 Dokumen	1 Dokumen	19.900.000		19.900.000		20.895.000		20.895.000		20.895.000		102.485.000
		1.02.02.2.02.017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000		12.500.000		13.125.000		13.125.000		13.125.000		64.375.000
		1.02.02.2.02.020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen	1 Dokumen	27.274.000		27.274.000		28.637.700		28.637.700		28.637.700		140.461.100
		1.02.02.2.02.021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0	0	0	37 org	9.000.000		9.000.000		9.450.000		9.450.000		9.450.000		46.350.000
		1.02.02.2.02.025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen	1 Dokumen	124.792.000		124.792.000		131.031.600		131.031.600		131.031.600		642.678.800
		1.02.02.2.02.033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	1 Dokumen	331.828.650		331.828.650		348.420.083		348.420.083		348.420.083		1.708.917.548
		1.02.02.2.	Pengelolaan	Jumlah dokumen			1	1											

		02.044	elayanan kesehatan Reproduksi	hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			Doku men	Doku men	10.348.000		10.348.000		10.865.400		10.865.400		10.865.400		53.292.200	
		1.02.02.2.02.046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 Doku men	1 Doku men	3.148.000		3.148.000		3.305.400		3.305.400		3.305.400		16.212.200	
		1.02.02.2.02.047	Pengelolaan pelayanan kesehatan Kelanjut usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	0	0	0	1 Doku men	1.800.000		1.800.000		1.890.000		1.890.000		1.890.000		9.270.000	
																			-	
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																-	
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						9.564.000		9.564.000	-	10.042.200	-	10.042.200	-	10.042.200		49.254.600	
		1.02.05.2.03.001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Doku men	1 Dokum en	1 Doku men	1 Doku men	9.564.000		9.564.000		10.042.200		10.042.200		10.042.200		49.254.600	
																			-	
			PUSKESMAS LOMBOK						1.361.617.380		1.361.617.380	-	1.429.698.249	-	1.429.698.249	-	1.429.698.249		7.012.329.507	
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN																-	

			PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA																	
		1.02.01.2. 10	Peningkatan Pelayanan BLUD																-	
		1.02.01.2. 10.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	499.892.3 30		499.892.3 30		524.886.9 47		524.886.9 47		524.886.9 47		2.574.445 .500	
																			-	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAK AT																-	
		1.02.02.2. 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/K ota						851.253.0 50		851.253.0 50	-	893.815.7 03	-	893.815.7 03	-	893.815.7 03		4.383.953 .208	
		1.02.02.2. 02.001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			182 org	190 org	141.570.0 00		141.570.0 00		148.648.5 00		148.648.5 00		148.648.5 00		729.085.5 00	
		1.02.02.2. 02.005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1756 org	1829 org	13.666.00 0		13.666.00 0		14.349.30 0		14.349.30 0		14.349.30 0		70.379.90 0	
		1.02.02.2. 02.010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang	0	0	0	15 org	12.600.00 0		12.600.00 0		13.230.00 0		13.230.00 0		13.230.00 0		64.890.00 0	

			Gangghuan Jiwa Berat	dengan Gangghuan Jiwa Berat Sesuai Standar															
		1.02.02.2.02.011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			10 org	147 org	11.800.000		11.800.000		12.390.000		12.390.000		12.390.000		60.770.000
		1.02.02.2.02.015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 Dokumen	1 Dokumen	213.012.400		213.012.400		223.663.020		223.663.020		223.663.020		1.097.013.860
		1.02.02.2.02.016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1 Dokumen	1 Dokumen	4.050.000		4.050.000		4.252.500		4.252.500		4.252.500		20.857.500
		1.02.02.2.02.017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Dokumen	1 Dokumen	10.500.000		10.500.000		11.025.000		11.025.000		11.025.000		54.075.000
		1.02.02.2.02.020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen	1 Dokumen	20.075.000		20.075.000		21.078.750		21.078.750		21.078.750		103.386.250
		1.02.02.2.02.021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0	0	0	6 org	3.600.000		3.600.000		3.780.000		3.780.000		3.780.000		18.540.000
		1.02.02.2.02.025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen	1 Dokumen	121.467.000		121.467.000		127.540.350		127.540.350		127.540.350		625.555.050
		1.02.02.2.02.033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	1 Dokumen	289.775.650		289.775.650		304.264.433		304.264.433		304.264.433		1.492.344.598
		1.02.02.2.	Pengelolaan	Jumlah dokumen			1	1											

		02.044	elayanan kesehatan Reproduksi	hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			Doku men	Doku men	7.037.000		7.037.000		7.388.850		7.388.850		7.388.850		36.240.550	
		1.02.02.2.02.046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 Doku men	1 Doku men	300.000		300.000		315.000		315.000		315.000		1.545.000	
		1.02.02.2.02.047	Pengelolaan pelayanan kesehatan Kelanjut usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kelanjutusiaan	0	0	0	1 Doku men	1.800.000		1.800.000		1.890.000		1.890.000		1.890.000		9.270.000	
																			-	
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAK AT BIDANG KESEHATAN																-	
		1.02.05.2.03	Pengembang an dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/K ota						10.472.000		10.472.000	-	10.995.600	-	10.995.600	-	10.995.600		53.930.800	
		1.02.05.2.03.001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Doku men	1 Dokum en	1 Doku men	1 Doku men	10.472.000		10.472.000		10.995.600		10.995.600		10.995.600		53.930.800	
																			-	
									2.004.526.986		2.004.526.986	-	2.104.753.335	-	2.104.753.335	-	2.104.753.335		10.323.313.978	
			PUSKESMAS PAGAR DEWA																-	

		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA															-	
		1.02.01.2. 10	Peningkatan Pelayanan BLUD															-	
		1.02.01.2. 10.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	782.212.7 36		782.212.7 36		821.323.3 73		821.323.3 73		821.323.3 73	4.028.395 .590	
																		-	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															-	
		1.02.02.2. 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.214.475. 250		1.214.475. 250	-	1.275.199. 013	-	1.275.199. 013	-	1.275.199. 013	6.254.547 .538	
		1.02.02.2. 02.001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			377 org	373 org	156.240.0 00		156.240.0 00		164.052.0 00		164.052.0 00		164.052.0 00	804.636.0 00	
		1.02.02.2. 02.005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			3642 org	3597 org	15.300.00 0		15.300.00 0		16.065.00 0		16.065.00 0		16.065.00 0	78.795.00 0	
		1.02.02.2. 02.010	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Orang yang	0	0	0	29 org	17.400.00		17.400.00		18.270.00		18.270.00		18.270.00	89.610.00	

			Kesehatan Orang Dengan Gangghuan Jiwa Berat	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0		0		0		0		0		0	
		1.02.02.2.02.011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			10 org	289 org	18.000.000		18.000.000		18.900.000		18.900.000		18.900.000		92.700.000
		1.02.02.2.02.015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 Dokumen	1 Dokumen	395.023.600		395.023.600		414.774.780		414.774.780		414.774.780		2.034.371.540
		1.02.02.2.02.016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1 Dokumen	1 Dokumen	10.800.000		10.800.000		11.340.000		11.340.000		11.340.000		55.620.000
		1.02.02.2.02.017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Dokumen	1 Dokumen	11.800.000		11.800.000		12.390.000		12.390.000		12.390.000		60.770.000
		1.02.02.2.02.020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen	1 Dokumen	22.420.000		22.420.000		23.541.000		23.541.000		23.541.000		115.463.000
		1.02.02.2.02.021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0	0	0	14 org	4.800.000		4.800.000		5.040.000		5.040.000		5.040.000		24.720.000
		1.02.02.2.02.025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen	1 Dokumen	130.346.000		130.346.000		136.863.300		136.863.300		136.863.300		671.281.900
		1.02.02.2.02.033	Operasional Pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional			1 Dokumen	1 Dokumen	383.285.6		383.285.6		402.449.9		402.449.9		402.449.9		1.973.921

			Puskesmas	Pelayanan Puskesmas			men	men	50		50		33		33		33		.098	
		1.02.02.2.02.044	Pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 Dokumen	1 Dokumen	46.120.000		46.120.000		48.426.000		48.426.000		48.426.000		237.518.000	
		1.02.02.2.02.046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 Dokumen	1 Dokumen	1.140.000		1.140.000		1.197.000		1.197.000		1.197.000		5.871.000	
		1.02.02.2.02.047	Pengelolaan pelayanan kesehatan Kelanjut usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	0	0	-	1 Dokumen	1.800.000		1.800.000		1.890.000		1.890.000		1.890.000		9.270.000	
																			-	
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																-	
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						7.839.000		7.839.000	-	8.230.950	-	8.230.950	-	8.230.950		40.370.850	
		1.02.05.2.03.001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.839.000		7.839.000		8.230.950		8.230.950		8.230.950		40.370.850	
																			-	
			PUSKESMAS SEKINCAU						2.688.916.299		2.688.916.299	-	2.823.362.114	-	2.823.362.114	-	2.823.362.114		13.847.918.940	

		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA															-	
		1.02.01.2. 10	Peningkatan Pelayanan BLUD															-	
		1.02.01.2. 10.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1.648.753. 249		1.648.753. 249		1.731.190. 911		1.731.190. 911		1.731.190. 911		8.491.079 .232
																		-	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															-	
		1.02.02.2. 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.027.825. 050		1.027.825. 050	-	1.079.216. 303	-	1.079.216. 303	-	1.079.216. 303		5.293.299 .008
		1.02.02.2. 02.001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			415 org	421 org	195.840.0 00		195.840.0 00		205.632.0 00		205.632.0 00		205.632.0 00		1.008.576 .000
		1.02.02.2. 02.005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			4006 org	4062 org	20.700.00 0		20.700.00 0		21.735.00 0		21.735.00 0		21.735.00 0		106.605.0 00

		1.02.02.2. 02.010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangghuan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0	0	0	33 org	15.600.000		15.600.000		16.380.000		16.380.000		16.380.000		80.340.000	
		1.02.02.2. 02.011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			150 org	327 org	18.000.000		18.000.000		18.900.000		18.900.000		18.900.000		92.700.000	
		1.02.02.2. 02.015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 Dokumen	1 Dokumen	262.488.400		262.488.400		275.612.820		275.612.820		275.612.820		1.351.815.260	
		1.02.02.2. 02.016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1 Dokumen	1 Dokumen	7.400.000		7.400.000		7.770.000		7.770.000		7.770.000		38.110.000	
		1.02.02.2. 02.017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Dokumen	1 Dokumen	9.900.000		9.900.000		10.395.000		10.395.000		10.395.000		50.985.000	
		1.02.02.2. 02.020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen	1 Dokumen	16.800.000		16.800.000		17.640.000		17.640.000		17.640.000		86.520.000	
		1.02.02.2. 02.021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0	0	0	1 Dokumen	1.800.000		1.800.000		1.890.000		1.890.000		1.890.000		9.270.000	
		1.02.02.2. 02.025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen	1 Dokumen	123.822.000		123.822.000		130.013.100		130.013.100		130.013.100		637.683.300	

		1.02.02.2. 02.033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Doku men	1 Doku men	342.259.6 50		342.259.6 50		359.372.6 33		359.372.6 33		359.372.6 33		1.762.637 .198	
		1.02.02.2. 02.044	Pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 Doku men	1 Doku men	10.887.00 0		10.887.00 0		11.431.35 0		11.431.35 0		11.431.35 0		56.068.05 0	
		1.02.02.2. 02.046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 Doku men	1 Doku men	528.000		528.000		554.400		554.400		554.400		2.719.200	
		1.02.02.2. 02.047	Pengelolaan pelayanan kesehatan Kelanjut usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	0	0	0	1 Doku men	1.800.000		1.800.000		1.890.000		1.890.000		1.890.000		9.270.000	
																			-	
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAK AT BIDANG KESEHATAN																-	
		1.02.05.2. 03	Pengembang an dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/K ota						12.338.00 0		12.338.00 0	-	12.954.90 0	-	12.954.90 0	-	12.954.90 0		63.540.70 0	
		1.02.05.2. 03.001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembang an dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Doku men	12.338.00 0		12.338.00 0		12.954.90 0		12.954.90 0		12.954.90 0		63.540.70 0	
																			-	
																			-	

																			-	
			PUSKESMAS SRIMULYO						2.196.034.150		2.196.034.150	-	2.305.835.858	-	2.305.835.858	-	2.305.835.858		11.309.575.873	
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																-	
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																-	
		1.02.01.2.10.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1.141.880.000		1.141.880.000		1.198.974.000		1.198.974.000		1.198.974.000		5.880.682.000	
																			-	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																-	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.047.014.150		1.047.014.150	-	1.099.364.858	-	1.099.364.858	-	1.099.364.858		5.392.122.873	
		1.02.02.2.02.001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			406 org	412 org	173.340.000		173.340.000		182.007.000		182.007.000		182.007.000		892.701.000	
		1.02.02.2.02.005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan			3916 org	3973 org	32.200.000		32.200.000		33.810.000		33.810.000		33.810.000		165.830.000	

			Dasar	Kesehatan Sesuai Standar															
		1.02.02.2. 02.010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0	0	0	32 org	22.200.00 0		22.200.00 0		23.310.00 0		23.310.00 0		23.310.00 0		114.330.0 00
		1.02.02.2. 02.011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			10 org	319 org	13.800.00 0		13.800.00 0		14.490.00 0		14.490.00 0		14.490.00 0		71.070.00 0
		1.02.02.2. 02.015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 Doku men	1 Doku men	256.710.5 00		256.710.5 00		269.546.0 25		269.546.0 25		269.546.0 25		1.322.059 .075
		1.02.02.2. 02.016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1 Doku men	1 Doku men	5.400.000		5.400.000		5.670.000		5.670.000		5.670.000		27.810.00 0
		1.02.02.2. 02.017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Doku men	1 Doku men	12.700.00 0		12.700.00 0		13.335.00 0		13.335.00 0		13.335.00 0		65.405.00 0
		1.02.02.2. 02.020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Doku men	1 Doku men	13.400.00 0		13.400.00 0		14.070.00 0		14.070.00 0		14.070.00 0		69.010.00 0
		1.02.02.2. 02.021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0	0	0	16 org	10.400.00 0		10.400.00 0		10.920.00 0		10.920.00 0		10.920.00 0		53.560.00 0
		1.02.02.2. 02.025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			1 Doku men	1 Doku men	137.986.0 00		137.986.0 00		144.885.3 00		144.885.3 00		144.885.3 00		710.627.9 00

			Tidak Menular	dan Tidak Menular																
		1.02.02.2.02.033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	1 Dokumen	355.872.650		355.872.650		373.666.283		373.666.283		373.666.283		1.832.744.148	
		1.02.02.2.02.044	Pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 Dokumen	1 Dokumen	9.305.000		9.305.000		9.770.250		9.770.250		9.770.250		47.920.750	
		1.02.02.2.02.046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.000		1.900.000		1.995.000		1.995.000		1.995.000		9.785.000	
		1.02.02.2.02.047	Pengelolaan pelayanan kesehatan Kelanjut usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kelanjutusiaan	0	0	0	1 Dokumen	1.800.000		1.800.000		1.890.000		1.890.000		1.890.000		9.270.000	
																			-	
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																-	
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						7.140.000		7.140.000	-	7.497.000	-	7.497.000	-	7.497.000		36.771.000	
		1.02.05.2.03.001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	7.140.000		7.140.000		7.497.000		7.497.000		7.497.000		36.771.000	

																			-	
																			-	
																			-	
			PUSKESMAS SUMBER JAYA						2.190.205.399		2.190.205.399	-	2.299.715.669	-	2.299.715.669	-	2.299.715.669		11.279.557.805	
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																-	
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																-	
		1.02.01.2.10.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1.170.487.349		1.170.487.349		1.229.011.716		1.229.011.716		1.229.011.716		6.028.009.847	
																			-	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																-	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.009.356.050		1.009.356.050	-	1.059.823.853	-	1.059.823.853	-	1.059.823.853		5.198.183.658	
		1.02.02.2.02.001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			530 org	528 org	160.200.000		160.200.000		168.210.000		168.210.000		168.210.000		825.030.000	

		1.02.02.2. 02.005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			5116 org	5098 org	48.000.00 0		48.000.00 0		50.400.00 0		50.400.00 0		50.400.00 0		247.200.0 00	
		1.02.02.2. 02.010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangghuan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0	0	0	41 org	27.000.00 0		27.000.00 0		28.350.00 0		28.350.00 0		28.350.00 0		139.050.0 00	
		1.02.02.2. 02.011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			10 org	410 org	18.600.00 0		18.600.00 0		19.530.00 0		19.530.00 0		19.530.00 0		95.790.00 0	
		1.02.02.2. 02.015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 Doku men	1 Doku men	207.963.4 00		207.963.4 00		218.361.5 70		218.361.5 70		218.361.5 70		1.071.011 .510	
		1.02.02.2. 02.016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1 Doku men	1 Doku men	4.900.000		4.900.000		5.145.000		5.145.000		5.145.000		25.235.00 0	
		1.02.02.2. 02.017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Doku men	1 Doku men	14.400.00 0		14.400.00 0		15.120.00 0		15.120.00 0		15.120.00 0		74.160.00 0	
		1.02.02.2. 02.020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Doku men	1 Doku men	37.306.40 0		37.306.40 0		39.171.72 0		39.171.72 0		39.171.72 0		192.127.9 60	
		1.02.02.2. 02.021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0	0	0	20 org	5.400.000		5.400.000		5.670.000		5.670.000		5.670.000		27.810.00 0	

			Jiwa (ODMK)																
		1.02.02.2. 02.025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Doku men	1 Doku men	112.259.6 00		112.259.6 00		117.872.5 80		117.872.5 80		117.872.5 80		578.136.9 40
		1.02.02.2. 02.033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Doku men	1 Doku men	337.965.6 50		337.965.6 50		354.863.9 33		354.863.9 33		354.863.9 33		1.740.523 .098
		1.02.02.2. 02.044	Pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 Doku men	1 Doku men	33.147.00 0		33.147.00 0		34.804.35 0		34.804.35 0		34.804.35 0		170.707.0 50
		1.02.02.2. 02.046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 Doku men	1 Doku men	414.000		414.000		434.700		434.700		434.700		2.132.100
		1.02.02.2. 02.047	Pengelolaan pelayanan kesehatan Kelanjut usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kelanjutusiaan	0	0	0	1 Doku men	1.800.000		1.800.000		1.890.000		1.890.000		1.890.000		9.270.000
																			-
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						10.362.00 0		10.362.00 0	-	10.880.10 0	-	10.880.10 0	-	10.880.10 0		53.364.30 0
		1.02.05.2. 03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Doku men		10.362.00 0		10.362.00 0		10.880.10 0		10.880.10 0		10.880.10 0		53.364.30 0
		1.02.05.2. 03.001	Bimbingan Teknis dan Supervisi	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan															-

			Pengembang an dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)															
																		-	
																		-	
			PUSKESMAS KEBUN TEBU					2.523.885. 690		2.523.885. 690	-	2.650.079. 975	-	2.650.079. 975	-	2.650.079. 975		12.998.01 1.304	
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA															-	
		1.02.01.2. 10	Peningkatan Pelayanan BLUD															-	
		1.02.01.2. 10.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1.402.199. 840	1.402.199. 840		1.472.309. 832		1.472.309. 832		1.472.309. 832		7.221.329 .176	
																		-	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAK AT															-	
		1.02.02.2. 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah						1.115.436. 850	1.115.436. 850	-	1.171.208. 693	-	1.171.208. 693	-	1.171.208. 693		5.744.499 .778	

			Kabupaten/Kota																
		1.02.02.2.02.001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			455 org	467 org	177.120.000		177.120.000		185.976.000		185.976.000		185.976.000		912.168.000
		1.02.02.2.02.005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			4394 org	4505 org	10.800.000		10.800.000		11.340.000		11.340.000		11.340.000		55.620.000
		1.02.02.2.02.010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			0	36 org	21.600.000		21.600.000		22.680.000		22.680.000		22.680.000		111.240.000
		1.02.02.2.02.011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			15 org	362 org	22.300.000		22.300.000		23.415.000		23.415.000		23.415.000		114.845.000
		1.02.02.2.02.015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 Dokumen	1 Dokumen	309.807.000		309.807.000		325.297.350		325.297.350		325.297.350		1.595.506.050
		1.02.02.2.02.016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1 Dokumen	1 Dokumen	4.600.000		4.600.000		4.830.000		4.830.000		4.830.000		23.690.000
		1.02.02.2.02.017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Dokumen	1 Dokumen	10.400.000		10.400.000		10.920.000		10.920.000		10.920.000		53.560.000
		1.02.02.2.02.020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans			1 Dokumen	1 Dokumen	28.999.000		28.999.000		30.448.950		30.448.950		30.448.950		149.344.850

				Kesehatan															
		1.02.02.2. 02.021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	-	-	10 org	11.000.000		11.000.000		11.550.000		11.550.000		11.550.000		56.650.000
		1.02.02.2. 02.025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen	1 Dokumen	134.909.000		134.909.000		141.654.450		141.654.450		141.654.450		694.781.350
		1.02.02.2. 02.033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	1 Dokumen	361.592.650		361.592.650		379.672.283		379.672.283		379.672.283		1.862.202.148
		1.02.02.2. 02.044	Pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 Dokumen	1 Dokumen	20.010.000		20.010.000		21.010.500		21.010.500		21.010.500		103.051.500
		1.02.02.2. 02.046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 Dokumen	1 Dokumen	499.200		499.200		524.160		524.160		524.160		2.570.880
		1.02.02.2. 02.047	Pengelolaan pelayanan kesehatan Kelanjut usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		0	-	1 Dokumen	1.800.000		1.800.000		1.890.000		1.890.000		1.890.000		9.270.000
					0														-
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																-
		1.02.05.2. 03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						6.249.000		6.249.000	-	6.561.450	-	6.561.450	-	6.561.450		32.182.350

		1.02.05.2.03.001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.249.000		6.249.000		6.561.450		6.561.450		6.561.450		32.182.350	
--	--	------------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--

TABEL DETAIL SUB KEGIATAN TAHUN 2025 - 2029

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan (Tahun)					
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA						
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan terdiri dari Dokumen Renstra, Cascading, Pohon Kinerja, Renja, Perubahan Renja, Kerangka Acuan Kerja, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Rencana Aksi, Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan terdiri dari Dokumen Renja, Perubahan Renja, Kerangka Acuan Kerja, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Rencana Aksi, Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan terdiri dari Dokumen Renstra, Cascading, Pohon Kinerja, Renja, Perubahan Renja, Kerangka Acuan Kerja, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Rencana Aksi, Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan terdiri dari Dokumen Renja, Perubahan Renja, Kerangka Acuan Kerja, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Rencana Aksi, Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan terdiri dari Dokumen Renja, Perubahan Renja, Kerangka Acuan Kerja, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Rencana Aksi, Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan	
	Penyusunan Dokumen	Penyusunan Dokumen	Penyusunan Dokumen	Penyusunan Dokumen	Penyusunan Dokumen	Perencanaan terdiri dari	

	Perencanaan Perangkat Daerah (RSUD AU)	Perencanaan terdiri dari Dokumen Renstra, Cascading, Pohon Kinerja, Renja, Perubahan Renja, Kerangka Acuan Kerja, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Rencana Aksi, Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan	Perencanaan terdiri dari Dokumen Renja, Perubahan Renja, Kerangka Acuan Kerja, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Rencana Aksi, Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan	Perencanaan terdiri dari Dokumen Renstra, Cascading, Pohon Kinerja, Renja, Perubahan Renja, Kerangka Acuan Kerja, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Rencana Aksi, Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan	Perencanaan terdiri dari Dokumen Renja, Perubahan Renja, Kerangka Acuan Kerja, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Rencana Aksi, Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan	Dokumen Renja, Perubahan Renja, Kerangka Acuan Kerja, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Rencana Aksi, Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA dilaksanakan berdasarkan usulan masing-masing program dan melalui koordinasi dengan TAPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA dilaksanakan berdasarkan usulan masing-masing program dan melalui koordinasi dengan TAPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA dilaksanakan berdasarkan usulan masing-masing program dan melalui koordinasi dengan TAPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA dilaksanakan berdasarkan usulan masing-masing program dan melalui koordinasi dengan TAPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA dilaksanakan berdasarkan usulan masing-masing program dan melalui koordinasi dengan TAPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (RSUD AU)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA dilaksanakan berdasarkan usulan masing-masing program dan melalui koordinasi dengan TAPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA dilaksanakan berdasarkan usulan masing-masing program dan melalui koordinasi dengan TAPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA dilaksanakan berdasarkan usulan masing-masing program dan melalui koordinasi dengan TAPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA dilaksanakan berdasarkan usulan masing-masing program dan melalui koordinasi dengan TAPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA dilaksanakan berdasarkan usulan masing-masing program dan melalui koordinasi dengan TAPD
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA dilaksanakan berdasarkan usulan masing-masing program melalui koordinasi dengan TAPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA dilaksanakan berdasarkan usulan masing-masing program melalui koordinasi dengan TAPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA dilaksanakan berdasarkan usulan masing-masing program melalui koordinasi dengan TAPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA dilaksanakan berdasarkan usulan masing-masing program melalui koordinasi dengan TAPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA dilaksanakan berdasarkan usulan masing-masing program melalui koordinasi dengan TAPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (RSUD AU)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan dilaksanakan berdasarkan usulan masing-masing program melalui koordinasi dengan TAPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan dilaksanakan berdasarkan usulan masing-masing program melalui koordinasi dengan TAPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan dilaksanakan berdasarkan usulan masing-masing program melalui koordinasi dengan TAPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan dilaksanakan berdasarkan usulan masing-masing program melalui koordinasi dengan TAPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan dilaksanakan berdasarkan usulan masing-masing program melalui koordinasi dengan TAPD

		pembahasan dengan program terkait dalam satu tahun anggaran	terkait dalam satu tahun anggaran	tahun anggaran	terkait dalam satu tahun anggaran	terkait dalam satu tahun anggaran
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan penilaian terhadap keberhasilan kinerja organisasi perangkat daerah dalam mencapai indikator kinerja yang telah di tetap dalam satu tahun anggaran dan sampai dengan tahun pelaksanaan renstra	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan penilaian terhadap keberhasilan kinerja organisasi perangkat daerah dalam mencapai indikator kinerja yang telah di tetap dalam satu tahun anggaran dan sampai dengan tahun pelaksanaan renstra	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan penilaian terhadap keberhasilan kinerja organisasi perangkat daerah dalam mencapai indikator kinerja yang telah di tetap dalam satu tahun anggaran dan sampai dengan tahun pelaksanaan renstra	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan penilaian terhadap keberhasilan kinerja organisasi perangkat daerah dalam mencapai indikator kinerja yang telah di tetap dalam satu tahun anggaran dan sampai dengan tahun pelaksanaan renstra	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan penilaian terhadap keberhasilan kinerja organisasi perangkat daerah dalam mencapai indikator kinerja yang telah di tetap dalam satu tahun anggaran dan sampai dengan tahun pelaksanaan renstra
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (RSUD AU)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan penilaian terhadap keberhasilan kinerja organisasi perangkat daerah dalam mencapai indikator kinerja yang telah di tetap dalam satu tahun anggaran dan sampai dengan tahun pelaksanaan renstra	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan penilaian terhadap keberhasilan kinerja organisasi perangkat daerah dalam mencapai indikator kinerja yang telah di tetap dalam satu tahun anggaran dan sampai dengan tahun pelaksanaan renstra	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan penilaian terhadap keberhasilan kinerja organisasi perangkat daerah dalam mencapai indikator kinerja yang telah di tetap dalam satu tahun anggaran dan sampai dengan tahun pelaksanaan renstra	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan penilaian terhadap keberhasilan kinerja organisasi perangkat daerah dalam mencapai indikator kinerja yang telah di tetap dalam satu tahun anggaran dan sampai dengan tahun pelaksanaan renstra	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan penilaian terhadap keberhasilan kinerja organisasi perangkat daerah dalam mencapai indikator kinerja yang telah di tetap dalam satu tahun anggaran dan sampai dengan tahun pelaksanaan renstra
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan merupakan kegiatan yang diperuntukaan untuk pembayaarn gaji dan tunjangan kinerja bagi pegawai ASN Dinas kesehatan, pegawai 15 Puskesmas dan Pegawai Pustu Se-Kabupaten Lampung Barat sejumlah 525 pegawai	Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan merupakan kegiatan yang diperuntukaan untuk pembayaarn gaji dan tunjangan kinerja bagi pegawai ASN Dinas kesehatan, pegawai 15 Puskesmas dan Pegawai Pustu Se-Kabupaten Lampung Barat sejumlah 550 pegawai	Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan merupakan kegiatan yang diperuntukaan untuk pembayaarn gaji dan tunjangan kinerja bagi pegawai ASN Dinas kesehatan, pegawai 15 Puskesmas dan Pegawai Pustu Se-Kabupaten Lampung Barat sejumlah 575 pegawai	Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan merupakan kegiatan yang diperuntukaan untuk pembayaarn gaji dan tunjangan kinerja bagi pegawai ASN Dinas kesehatan, pegawai 15 Puskesmas dan Pegawai Pustu Se-Kabupaten Lampung Barat sejumlah 600 pegawai	Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan merupakan kegiatan yang diperuntukaan untuk pembayaarn gaji dan tunjangan kinerja bagi pegawai ASN Dinas kesehatan, pegawai 15 Puskesmas dan Pegawai Pustu Se-Kabupaten Lampung Barat sejumlah 600 pegawai

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD AU)	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dilaksanakan berdasarkan jumlah pegawai RSUD AU yang menerima gaji dan tunjangan	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dilaksanakan berdasarkan jumlah pegawai RSUD AU yang menerima gaji dan tunjangan	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dilaksanakan berdasarkan jumlah pegawai RSUD AU yang menerima gaji dan tunjangan	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dilaksanakan berdasarkan jumlah pegawai RSUD AU yang menerima gaji dan tunjangan	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dilaksanakan berdasarkan jumlah pegawai RSUD AU yang menerima gaji dan tunjangan
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Suatu bentuk kegiatan penatausahaan keuangan dengan memferivikasi: - Semua dokumen pengajuan pencairan dari PPTK (BKP, NPD dan kelengkapan administrasi lainnya) - memferifikasi Dokumen pencairan SPP dan SPM GU-UP-TU dan LS - Memferivikasi semua laporan pertanggungjawaban	Suatu bentuk kegiatan penatausahaan keuangan dengan memferivikasi: - Semua dokumen pengajuan pencairan dari PPTK (BKP, NPD dan kelengkapan administrasi lainnya) - memferifikasi Dokumen pencairan SPP dan SPM GU-UP-TU dan LS - Memferivikasi semua laporan pertanggungjawaban	Suatu bentuk kegiatan penatausahaan keuangan dengan memferivikasi: - Semua dokumen pengajuan pencairan dari PPTK (BKP, NPD dan kelengkapan administrasi lainnya) - memferifikasi Dokumen pencairan SPP dan SPM GU-UP-TU dan LS - Memferivikasi semua laporan pertanggungjawaban	Suatu bentuk kegiatan penatausahaan keuangan dengan memferivikasi: - Semua dokumen pengajuan pencairan dari PPTK (BKP, NPD dan kelengkapan administrasi lainnya) - memferifikasi Dokumen pencairan SPP dan SPM GU-UP-TU dan LS - Memferivikasi semua laporan pertanggungjawaban	Suatu bentuk kegiatan penatausahaan keuangan dengan memferivikasi: - Semua dokumen pengajuan pencairan dari PPTK (BKP, NPD dan kelengkapan administrasi lainnya) - memferifikasi Dokumen pencairan SPP dan SPM GU-UP-TU dan LS - Memferivikasi semua laporan pertanggungjawaban
1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Melaksanakan koordinasi ke BPKAD terkait penatausahaan akuntansi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, yaitu mensinkronkan hasil penjurnalan realisasi anggaran belanja dan realisasi anggaran pendapatan	Melaksanakan koordinasi ke BPKAD terkait penatausahaan akuntansi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, yaitu mensinkronkan hasil penjurnalan realisasi anggaran belanja dan realisasi anggaran pendapatan	Melaksanakan koordinasi ke BPKAD terkait penatausahaan akuntansi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, yaitu mensinkronkan hasil penjurnalan realisasi anggaran belanja dan realisasi anggaran pendapatan	Melaksanakan koordinasi ke BPKAD terkait penatausahaan akuntansi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, yaitu mensinkronkan hasil penjurnalan realisasi anggaran belanja dan realisasi anggaran pendapatan	Melaksanakan koordinasi ke BPKAD terkait penatausahaan akuntansi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, yaitu mensinkronkan hasil penjurnalan realisasi anggaran belanja dan realisasi anggaran pendapatan
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi laporan keuangan akhir tahun dengan bidang yang ada di Dinkes dan Puskesmas atas capaian pendapatan dan belanja per program, perkegiatan dan sub kegiatan	Koordinasi laporan keuangan akhir tahun dengan bidang yang ada di Dinkes dan Puskesmas atas capaian pendapatan dan belanja per program, perkegiatan dan sub kegiatan	Koordinasi laporan keuangan akhir tahun dengan bidang yang ada di Dinkes dan Puskesmas atas capaian pendapatan dan belanja per program, perkegiatan dan sub kegiatan	Koordinasi laporan keuangan akhir tahun dengan bidang yang ada di Dinkes dan Puskesmas atas capaian pendapatan dan belanja per program, perkegiatan dan sub kegiatan	Koordinasi laporan keuangan akhir tahun dengan bidang yang ada di Dinkes dan Puskesmas atas capaian pendapatan dan belanja per program, perkegiatan dan sub kegiatan

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (RSUD AU)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dilaksanakan berdasarkan data target dan realisasi kinerja dari masing-masing program dan dilakukan pembahasan dengan program terkait dalam satu tahun anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dilaksanakan berdasarkan data target dan realisasi kinerja dari masing-masing program dan dilakukan pembahasan dengan program terkait dalam satu tahun anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dilaksanakan berdasarkan data target dan realisasi kinerja dari masing-masing program dan dilakukan pembahasan dengan program terkait dalam satu tahun anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dilaksanakan berdasarkan data target dan realisasi kinerja dari masing-masing program dan dilakukan pembahasan dengan program terkait dalam satu tahun anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dilaksanakan berdasarkan data target dan realisasi kinerja dari masing-masing program dan dilakukan pembahasan dengan program terkait dalam satu tahun anggaran
1.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Menyiapkan dan mengkoordinasikan ke Bidang2 dan puskesmas yang ada di Dinkes terhadap seluruh bahan tanggapan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim audit	Menyiapkan dan mengkoordinasikan ke Bidang2 dan puskesmas yang ada di Dinkes terhadap seluruh bahan tanggapan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim audit	Menyiapkan dan mengkoordinasikan ke Bidang2 dan puskesmas yang ada di Dinkes terhadap seluruh bahan tanggapan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim audit	Menyiapkan dan mengkoordinasikan ke Bidang2 dan puskesmas yang ada di Dinkes terhadap seluruh bahan tanggapan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim audit	Menyiapkan dan mengkoordinasikan ke Bidang2 dan puskesmas yang ada di Dinkes terhadap seluruh bahan tanggapan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim audit
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Menyusun laporan adminstrasif, fungsional, LRA dll, dan mengkoordinasikan laporan keuangan ke bidang dan Puskesmas per program, kegiatan dan sub kegiatan atas capaian belanja dan pendapatan	Menyusun laporan adminstrasif, fungsional, LRA dll, dan mengkoordinasikan laporan keuangan ke bidang dan Puskesmas per program, kegiatan dan sub kegiatan atas capaian belanja dan pendapatan	Menyusun laporan adminstrasif, fungsional, LRA dll, dan mengkoordinasikan laporan keuangan ke bidang dan Puskesmas per program, kegiatan dan sub kegiatan atas capaian belanja dan pendapatan	Menyusun laporan adminstrasif, fungsional, LRA dll, dan mengkoordinasikan laporan keuangan ke bidang dan Puskesmas per program, kegiatan dan sub kegiatan atas capaian belanja dan pendapatan	Menyusun laporan adminstrasif, fungsional, LRA dll, dan mengkoordinasikan laporan keuangan ke bidang dan Puskesmas per program, kegiatan dan sub kegiatan atas capaian belanja dan pendapatan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (RSUD AU)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD berdasarkan data target dan realisasi kinerja dari masing-masing program dan dilakukan pembahasan dengan program terkait	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD berdasarkan data target dan realisasi kinerja dari masing-masing program dan dilakukan pembahasan dengan program terkait	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD berdasarkan data target dan realisasi kinerja dari masing-masing program dan dilakukan pembahasan dengan program terkait	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD berdasarkan data target dan realisasi kinerja dari masing-masing program dan dilakukan pembahasan dengan program terkait	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD berdasarkan data target dan realisasi kinerja dari masing-masing program dan dilakukan pembahasan dengan program terkait
1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Menyusun laporan prognosis berdasarkan realisasi anggaran belanja dan pendapatan dan membuat estimasi realisasi belanja kegiatan per	Menyusun laporan prognosis berdasarkan realisasi anggaran belanja dan pendapatan dan membuat estimasi realisasi belanja kegiatan per program,	Menyusun laporan prognosis berdasarkan realisasi anggaran belanja dan pendapatan dan membuat estimasi realisasi belanja kegiatan per program, kegiatan dan sub kegiatan	Menyusun laporan prognosis berdasarkan realisasi anggaran belanja dan pendapatan dan membuat estimasi realisasi belanja kegiatan per program,	Menyusun laporan prognosis berdasarkan realisasi anggaran belanja dan pendapatan dan membuat estimasi realisasi belanja kegiatan per program,

		program, kegiatan dan sub kegiatan	kegiatan dan sub kegiatan		kegiatan dan sub kegiatan	kegiatan dan sub kegiatan
	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran (RSUD AU)	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran berdasarkan data target dan realisasi Anggaran dari masing-masing program dan dilakukan pembahasan dengan program terkait dalam satu tahun	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran berdasarkan data target dan realisasi Anggaran dari masing-masing program dan dilakukan pembahasan dengan program terkait dalam satu tahun	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran berdasarkan data target dan realisasi Anggaran dari masing-masing program dan dilakukan pembahasan dengan program terkait dalam satu tahun	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran berdasarkan data target dan realisasi Anggaran dari masing-masing program dan dilakukan pembahasan dengan program terkait dalam satu tahun	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran berdasarkan data target dan realisasi Anggaran dari masing-masing program dan dilakukan pembahasan dengan program terkait dalam satu tahun
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
1.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Menyusun perencanaan kebutuhan barang milik daerah yaitu mengakomodir rencana kebutuhan barang, baik barang habis pakai ataupun belanja modal	Menyusun perencanaan kebutuhan barang milik daerah yaitu mengakomodir rencana kebutuhan barang, baik barang habis pakai ataupun belanja modal	Menyusun perencanaan kebutuhan barang milik daerah yaitu mengakomodir rencana kebutuhan barang, baik barang habis pakai ataupun belanja modal	Menyusun perencanaan kebutuhan barang milik daerah yaitu mengakomodir rencana kebutuhan barang, baik barang habis pakai ataupun belanja modal	Menyusun perencanaan kebutuhan barang milik daerah yaitu mengakomodir rencana kebutuhan barang, baik barang habis pakai ataupun belanja modal
1.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Menginventarisir atau melaksanakan pengecekan barang dan aset tetap kemudian mensinkronkan data antara Kartu inventaris barang (KIB) dengan kondisi dan keberadaan barang baik yang ada di Dinkes, Puskesmas dan Pustu	Menginventarisir atau melaksanakan pengecekan barang dan mensinkronkan data antara Kartu inventaris barang (KIB) dengan kondisi dan keberadaan barang baik yang ada di Dinkes, Puskesmas dan Pustu	Menginventarisir atau melaksanakan pengecekan barang dan mensinkronkan data antara Kartu inventaris barang (KIB) dengan kondisi dan keberadaan barang baik yang ada di Dinkes, Puskesmas dan Pustu	Menginventarisir atau melaksanakan pengecekan barang dan mensinkronkan data antara Kartu inventaris barang (KIB) dengan kondisi dan keberadaan barang baik yang ada di Dinkes, Puskesmas dan Pustu	Menginventarisir atau melaksanakan pengecekan barang dan mensinkronkan data antara Kartu inventaris barang (KIB) dengan kondisi dan keberadaan barang baik yang ada di Dinkes, Puskesmas dan Pustu
1.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Melaksanakan pembinaan dan monitoring ke Puskesmas terakait penatausahaan aset bagaimana mencatat dan melaporkan barang yang telah di beli	Melaksanakan pembinaan dan monitoring ke Puskesmas terakait penatausahaan aset bagaimana mencatat dan melaporkan barang yang telah di beli	Melaksanakan pembinaan dan monitoring ke Puskesmas terakait penatausahaan aset bagaimana mencatat dan melaporkan barang yang telah di beli	Melaksanakan pembinaan dan monitoring ke Puskesmas terakait penatausahaan aset bagaimana mencatat dan melaporkan barang yang telah di beli	Melaksanakan pembinaan dan monitoring ke Puskesmas terakait penatausahaan aset bagaimana mencatat dan melaporkan barang yang telah di beli

1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Melaksanakan rekonsiliasi atas laporan barang yang telah disusun oleh pengurus barang Dinkes dengan BPKAD dan rekonsiliasi antara Puskesmas dengan Dinkes	Melaksanakan rekonsiliasi atas laporan barang yang telah disusun oleh pengurus barang Dinkes dengan BPKAD dan rekonsiliasi antara Puskesmas dengan Dinkes	Melaksanakan rekonsiliasi atas laporan barang yang telah disusun oleh pengurus barang Dinkes dengan BPKAD dan rekonsiliasi antara Puskesmas dengan Dinkes	Melaksanakan rekonsiliasi atas laporan barang yang telah disusun oleh pengurus barang Dinkes dengan BPKAD dan rekonsiliasi antara Puskesmas dengan Dinkes	Melaksanakan rekonsiliasi atas laporan barang yang telah disusun oleh pengurus barang Dinkes dengan BPKAD dan rekonsiliasi antara Puskesmas dengan Dinkes
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Melaksanakan penatausahaan aset yaitu menyusun seluruh laporan barang baik barang habis pakai maupun modal baik secara manual maupun dalam bentuk aplikasi berupa laporan SPPAT, KIB, KIR, laporan persediaan barang, laporan mutasi barang, kartu pemeliharaan, kartu pengeluaran, kartu penerimaan dll)	Melaksanakan penatausahaan aset yaitu menyusun seluruh laporan barang baik barang habis pakai maupun modal baik secara manual maupun dalam bentuk aplikasi berupa laporan SPPAT, KIB, KIR, laporan persediaan barang, laporan mutasi barang, kartu pemeliharaan, kartu pengeluaran, kartu penerimaan dll)	Melaksanakan penatausahaan aset yaitu menyusun seluruh laporan barang baik barang habis pakai maupun modal baik secara manual maupun dalam bentuk aplikasi berupa laporan SPPAT, KIB, KIR, laporan persediaan barang, laporan mutasi barang, kartu pemeliharaan, kartu pengeluaran, kartu penerimaan dll)	Melaksanakan penatausahaan aset yaitu menyusun seluruh laporan barang baik barang habis pakai maupun modal baik secara manual maupun dalam bentuk aplikasi berupa laporan SPPAT, KIB, KIR, laporan persediaan barang, laporan mutasi barang, kartu pemeliharaan, kartu pengeluaran, kartu penerimaan dll)	Melaksanakan penatausahaan aset yaitu menyusun seluruh laporan barang baik barang habis pakai maupun modal baik secara manual maupun dalam bentuk aplikasi berupa laporan SPPAT, KIB, KIR, laporan persediaan barang, laporan mutasi barang, kartu pemeliharaan, kartu pengeluaran, kartu penerimaan dll)
1.02.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	- Menertibkan pemanfaatan barang milik daerah agar tidak disalahgunakan oleh penerima manfaat barang misal penggunaan kendaraan Dinas, ditertibkan dengan dibuatkannya SK pengguna kendaraan, berita acara pemakaian kendaraan, surat peminjaman aset apabila ada peminjam dll	- Menertibkan pemanfaatan barang milik daerah agar tidak disalahgunakan oleh penerima manfaat barang misal penggunaan kendaraan Dinas, ditertibkan dengan dibuatkannya SK pengguna kendaraan, berita acara pemakaian kendaraan, surat peminjaman aset apabila ada peminjam dll	- Menertibkan pemanfaatan barang milik daerah agar tidak disalahgunakan oleh penerima manfaat barang misal penggunaan kendaraan Dinas, ditertibkan dengan dibuatkannya SK pengguna kendaraan, berita acara pemakaian kendaraan, surat peminjaman aset apabila ada peminjam dll	- Menertibkan pemanfaatan barang milik daerah agar tidak disalahgunakan oleh penerima manfaat barang misal penggunaan kendaraan Dinas, ditertibkan dengan dibuatkannya SK pengguna kendaraan, berita acara pemakaian kendaraan, surat peminjaman aset apabila ada peminjam dll	- Menertibkan pemanfaatan barang milik daerah agar tidak disalahgunakan oleh penerima manfaat barang misal penggunaan kendaraan Dinas, ditertibkan dengan dibuatkannya SK pengguna kendaraan, berita acara pemakaian kendaraan, surat peminjaman aset apabila ada peminjam dll
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
1.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pembuatan name tag pegawai sebanyak 100 pcs	Pembuatan name tag pegawai sebanyak 100 pcs	Pembuatan name tag pegawai sebanyak 100 pcs	Pembuatan name tag pegawai sebanyak 100 pcs	Pembuatan name tag pegawai sebanyak 100 pcs

1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	pertemuan sinkronisasi dan pengolahan data ASN untuk keperluan administrasi kepegawaian dengan jumlah peserta sebanyak 47 orang terdiri dari 30 org dari puskesmas, 15 orang dinkes, 2 orang UPT IFK	pertemuan sinkronisasi dan pengolahan data ASN untuk keperluan administrasi kepegawaian dengan jumlah peserta sebanyak 47 orang terdiri dari 30 org dari puskesmas, 15 orang dinkes, 2 orang UPT IFK	pertemuan sinkronisasi dan pengolahan data ASN untuk keperluan administrasi kepegawaian dengan jumlah peserta sebanyak 47 orang terdiri dari 30 org dari puskesmas, 15 orang dinkes, 2 orang UPT IFK	pertemuan sinkronisasi dan pengolahan data ASN untuk keperluan administrasi kepegawaian dengan jumlah peserta sebanyak 47 orang terdiri dari 30 org dari puskesmas, 15 orang dinkes, 2 orang UPT IFK	pertemuan sinkronisasi dan pengolahan data ASN untuk keperluan administrasi kepegawaian dengan jumlah peserta sebanyak 47 orang terdiri dari 30 org dari puskesmas, 15 orang dinkes, 2 orang UPT IFK
1.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	pertemuan guna desiminasi dan refreshing penerapan sistem informasi kepegawaian dengan jumlah peserta sebanyak 47 orang terdiri dari 30 org dari puskesmas, 15 orang dinkes, 2 orang UPT IFK	pertemuan guna desiminasi dan refreshing penerapan sistem informasi kepegawaian dengan jumlah peserta sebanyak 47 orang terdiri dari 30 org dari puskesmas, 15 orang dinkes, 2 orang UPT IFK	pertemuan guna desiminasi dan refreshing penerapan sistem informasi kepegawaian dengan jumlah peserta sebanyak 47 orang terdiri dari 30 org dari puskesmas, 15 orang dinkes, 2 orang UPT IFK	pertemuan guna desiminasi dan refreshing penerapan sistem informasi kepegawaian dengan jumlah peserta sebanyak 47 orang terdiri dari 30 org dari puskesmas, 15 orang dinkes, 2 orang UPT IFK	pertemuan guna desiminasi dan refreshing penerapan sistem informasi kepegawaian dengan jumlah peserta sebanyak 47 orang terdiri dari 30 org dari puskesmas, 15 orang dinkes, 2 orang UPT IFK
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	penetapan kinerja pegawai sebanyak 1 kali dan monev kepegawaian sebanyak 1 kali	penetapan kinerja pegawai sebanyak 1 kali dan monev kepegawaian sebanyak 1 kali	penetapan kinerja pegawai sebanyak 1 kali dan monev kepegawaian sebanyak 1 kali	penetapan kinerja pegawai sebanyak 1 kali dan monev kepegawaian sebanyak 1 kali	penetapan kinerja pegawai sebanyak 1 kali dan monev kepegawaian sebanyak 1 kali
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	pendidikan dan pelatihan PNS dengan jumlah pesengiriman peserta sebanyak 10 orang	pendidikan dan pelatihan PNS dengan jumlah pesengiriman peserta sebanyak 2 orang	pendidikan dan pelatihan PNS dengan jumlah pesengiriman peserta sebanyak 2 orang	pendidikan dan pelatihan PNS dengan jumlah pesengiriman peserta sebanyak 2 orang	pendidikan dan pelatihan PNS dengan jumlah pesengiriman peserta sebanyak 2 orang
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi (RSUD AU)	pendidikan dan pelatihan Pegawai RSUD AU dengan jumlah pesengiriman peserta sebanyak 2 orang	pendidikan dan pelatihan Pegawai RSUD AU dengan jumlah pesengiriman peserta sebanyak 2 orang	pendidikan dan pelatihan Pegawai RSUD AU dengan jumlah pesengiriman peserta sebanyak 2 orang	pendidikan dan pelatihan Pegawai RSUD AU dengan jumlah pesengiriman peserta sebanyak 2 orang	pendidikan dan pelatihan Pegawai RSUD AU dengan jumlah pesengiriman peserta sebanyak 2 orang
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	sosialisasi peraturan perundang-undangan terbaru dengan jumlah peserta sebanyak 47 orang terdiri dari 30 org dari puskesmas, 15 orang dinkes, 2 orang UPT IFK	sosialisasi peraturan perundang-undangan terbaru dengan jumlah peserta sebanyak 47 orang terdiri dari 30 org dari puskesmas, 15 orang dinkes, 2 orang UPT IFK	sosialisasi peraturan perundang-undangan terbaru dengan jumlah peserta sebanyak 47 orang terdiri dari 30 org dari puskesmas, 15 orang dinkes, 2 orang UPT IFK	sosialisasi peraturan perundang-undangan terbaru dengan jumlah peserta sebanyak 47 orang terdiri dari 30 org dari puskesmas, 15 orang dinkes, 2 orang UPT IFK	sosialisasi peraturan perundang-undangan terbaru dengan jumlah peserta sebanyak 47 orang terdiri dari 30 org dari puskesmas, 15 orang dinkes, 2 orang UPT IFK
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	penyediaan komponen instalasi listrik seperti lampu, kabel, sakelar sebanyak 9 jenis	penyediaan komponen instalasi listrik seperti lampu, kabel, sakelar sebanyak 9 jenis	penyediaan komponen instalasi listrik seperti lampu, kabel, sakelar sebanyak 9 jenis	penyediaan komponen instalasi listrik seperti lampu, kabel, sakelar sebanyak 9 jenis	penyediaan komponen instalasi listrik seperti lampu, kabel, sakelar sebanyak 9 jenis
	Penyediaan Komponen Instalasi	Penyediaan Komponen	Penyediaan Komponen	Penyediaan Komponen	Penyediaan Komponen	Penyediaan Komponen

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (RSUD AU)	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor , mencukupi kebutuhan penerangan/peralatan listrik kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor , mencukupi kebutuhan penerangan/peralatan listrik kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor , mencukupi kebutuhan penerangan/peralatan listrik kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor , mencukupi kebutuhan penerangan/peralatan listrik kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor , mencukupi kebutuhan penerangan/peralatan listrik kantor
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor seperti laptop, sound system, dll sebanyak 4 unit	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor seperti laptop, sound system, dll sebanyak 4 unit	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor seperti laptop, sound system, dll sebanyak 4 unit	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor seperti laptop, sound system, dll sebanyak 4 unit	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor seperti laptop, sound system, dll sebanyak 4 unit
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (RSUD AU)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor , penyediaan bahan-bahan perlengkapan kantor guna penunjang pelayanan RS	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor , penyediaan bahan-bahan perlengkapan kantor guna penunjang pelayanan RS	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor , penyediaan bahan-bahan perlengkapan kantor guna penunjang pelayanan RS	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor , penyediaan bahan-bahan perlengkapan kantor guna penunjang pelayanan RS	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor , penyediaan bahan-bahan perlengkapan kantor guna penunjang pelayanan RS
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (RSUD AU)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga , kegiatan yang mendukung penyediaan peralatan rumah tangga berupa alat tenun dan instalasi gizi	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga , kegiatan yang mendukung penyediaan peralatan rumah tangga berupa alat tenun dan instalasi gizi	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga , kegiatan yang mendukung penyediaan peralatan rumah tangga berupa alat tenun dan instalasi gizi	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga , kegiatan yang mendukung penyediaan peralatan rumah tangga berupa alat tenun dan instalasi gizi	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga , kegiatan yang mendukung penyediaan peralatan rumah tangga berupa alat tenun dan instalasi gizi
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (RSUD AU)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor ,penyediaan bahan bahan logistik kantor, guna penunjang pelayanan rs	Penyediaan Bahan Logistik Kantor ,penyediaan bahan bahan logistik kantor, guna penunjang pelayanan rs	Penyediaan Bahan Logistik Kantor ,penyediaan bahan bahan logistik kantor, guna penunjang pelayanan rs	Penyediaan Bahan Logistik Kantor ,penyediaan bahan bahan logistik kantor, guna penunjang pelayanan rs	Penyediaan Bahan Logistik Kantor ,penyediaan bahan bahan logistik kantor, guna penunjang pelayanan rs
1.02.01.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	penyediaan bahan cetakan dan penggandaan sebanyak 7 jenis (amplop, kertas kop, map, blangko disposisi, sticker kode barang, kalender/block note)	penyediaan bahan cetakan dan penggandaan (amplop, kertas kop, map, blangko disposisi, sticker kode barang, kalender/block note) sebanyak 7 jenis	penyediaan bahan cetakan dan penggandaan (amplop, kertas kop, map, blangko disposisi, sticker kode barang, kalender/block note) sebanyak 7 jenis	penyediaan bahan cetakan dan penggandaan (amplop, kertas kop, map, blangko disposisi, sticker kode barang, kalender/block note) sebanyak 7 jenis	penyediaan bahan cetakan dan penggandaan (amplop, kertas kop, map, blangko disposisi, sticker kode barang, kalender/block note) sebanyak 7 jenis
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (RSUD AU)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan , kegiatan pengadaan cetak rekam medis pasien	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan , kegiatan pengadaan cetak rekam medis pasien	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan , kegiatan pengadaan cetak rekam medis pasien	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan , kegiatan pengadaan cetak rekam medis pasien	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan , kegiatan pengadaan cetak rekam medis pasien
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	pembayaran langganan surat kabar harian umum sebanyak 4 SKHU	pembayaran langganan surat kabar harian umum sebanyak 4 SKHU (Lampung post,	pembayaran langganan surat kabar harian umum sebanyak 4 SKHU (Lampung post, tribu	pembayaran langganan surat kabar harian umum sebanyak 4 SKHU (Lampung post,	pembayaran langganan surat kabar harian umum sebanyak 4 SKHU (Lampung post,

		(Lampung post, tribun lampung, radar lampung, radar lambar)	tribun lampung, radar lampung, radar lambar)	lampung, radar lampung, radar lambar)	tribun lampung, radar lampung, radar lambar)	tribun lampung, radar lampung, radar lambar)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (RSUD AU)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan jumlah surat kabar, majalah, langganan jurnal yang masuk ke RSUD AU setiap bulan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan jumlah surat kabar, majalah, langganan jurnal yang masuk ke RSUD AU setiap bulan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan jumlah surat kabar, majalah, langganan jurnal yang masuk ke RSUD AU setiap bulan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan jumlah surat kabar, majalah, langganan jurnal yang masuk ke RSUD AU setiap bulan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan jumlah surat kabar, majalah, langganan jurnal yang masuk ke RSUD AU setiap bulan
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	makan minum kunjungan tamu dilaksanakan tentative dalam kurun waktu 12 bulan	makan minum kunjungan tamu dilaksanakan tentative dalam kurun waktu 12 bulan	makan minum kunjungan tamu dilaksanakan tentative dalam kurun waktu 12 bulan	makan minum kunjungan tamu dilaksanakan tentative dalam kurun waktu 12 bulan	makan minum kunjungan tamu dilaksanakan tentative dalam kurun waktu 12 bulan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu (RSUD AU)	Fasilitasi Kunjungan Tamu berdasarkan banyaknya kunjungan tamu yang datang ke RSUD AU	Fasilitasi Kunjungan Tamu berdasarkan banyaknya kunjungan tamu yang datang ke RSUD AU	Fasilitasi Kunjungan Tamu berdasarkan banyaknya kunjungan tamu yang datang ke RSUD AU	Fasilitasi Kunjungan Tamu berdasarkan banyaknya kunjungan tamu yang datang ke RSUD AU	Fasilitasi Kunjungan Tamu berdasarkan banyaknya kunjungan tamu yang datang ke RSUD AU
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi berupa perjalanan dinas dilakukan baik di dalam daerah maupun luar daerah kabupaten	Rapat Koordinasi dan Konsultasi berupa perjalanan dinas dilakukan baik di dalam daerah maupun luar daerah kabupaten	Rapat Koordinasi dan Konsultasi berupa perjalanan dinas dilakukan baik di dalam daerah maupun luar daerah kabupaten	Rapat Koordinasi dan Konsultasi berupa perjalanan dinas dilakukan baik di dalam daerah maupun luar daerah kabupaten	Rapat Koordinasi dan Konsultasi berupa perjalanan dinas dilakukan baik di dalam daerah maupun luar daerah kabupaten
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (RSUD AU)	Rapat Koordinasi dan Konsultasi berupa perjalanan dinas dilakukan baik di dalam daerah maupun luar daerah kabupaten	Rapat Koordinasi dan Konsultasi berupa perjalanan dinas dilakukan baik di dalam daerah maupun luar daerah kabupaten	Rapat Koordinasi dan Konsultasi berupa perjalanan dinas dilakukan baik di dalam daerah maupun luar daerah kabupaten	Rapat Koordinasi dan Konsultasi berupa perjalanan dinas dilakukan baik di dalam daerah maupun luar daerah kabupaten	Rapat Koordinasi dan Konsultasi berupa perjalanan dinas dilakukan baik di dalam daerah maupun luar daerah kabupaten
1.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pertemuan Sosialisasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (peserta 100 orang) dan pengadaan software dan hardware	Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (peserta 100 orang) dan pengadaan/upgrade software dan hardware	Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (peserta 100 orang) dan pengadaan/upgrade software dan hardware	Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (peserta 100 orang) dan pengadaan/upgrade software dan hardware	Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (peserta 100 orang) dan pengadaan/upgrade software dan hardware
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					

1.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya(RSUD AU)	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, pengadaan gedung bangunan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, pengadaan gedung bangunan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, pengadaan gedung bangunan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, pengadaan gedung bangunan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, pengadaan gedung bangunan
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (RSUD AU)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, guna mendukung gedung admistrasi maupun gedung kesehatan dan alat kesehatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mendukung gedung admistrasi maupun gedung kesehatan dan alat kesehatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mendukung gedung admistrasi maupun gedung kesehatan dan alat kesehatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mendukung gedung admistrasi maupun gedung kesehatan dan alat kesehatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mendukung gedung admistrasi maupun gedung kesehatan dan alat kesehatan
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	penyediaan materai	penyediaan materai	penyediaan materai	penyediaan materai	penyediaan materai
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (RSUD AU)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat berdasarkan jumlah materai dan ongkos pengiriman paket setiap bulan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat berdasarkan jumlah materai dan ongkos pengiriman paket setiap bulan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat berdasarkan jumlah materai dan ongkos pengiriman paket setiap bulan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat berdasarkan jumlah materai dan ongkos pengiriman paket setiap bulan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat berdasarkan jumlah materai dan ongkos pengiriman paket setiap bulan
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening listrik dinkes sebanyak 3 rekening, pembayaran rekening listrik puskesmas lama sebanyak 18 rekening; pembayarana internet sebanyak 5 rekening, pembayaran telepon sebanyak 1 rekening dan pembayaran air sebanyak 1 rekening	pembayaran rekening listrik dinkes sebanyak 3 rekening, pembayaran rekening listrik puskesmas lama sebanyak 18 rekening; pembayarana internet sebanyak 5 rekening, pembayaran telepon sebanyak 1 rekening dan pembayaran air sebanyak 1 rekening	pembayaran rekening listrik dinkes sebanyak 3 rekening, pembayaran rekening listrik puskesmas lama sebanyak 18 rekening; pembayarana internet sebanyak 5 rekening, pembayaran telepon sebanyak 1 rekening dan pembayaran air sebanyak 1 rekening	pembayaran rekening listrik dinkes sebanyak 3 rekening, pembayaran rekening listrik puskesmas lama sebanyak 18 rekening; pembayarana internet sebanyak 5 rekening, pembayaran telepon sebanyak 1 rekening dan pembayaran air sebanyak 1 rekening	pembayaran rekening listrik dinkes sebanyak 3 rekening, pembayaran rekening listrik puskesmas lama sebanyak 18 rekening; pembayarana internet sebanyak 5 rekening, pembayaran telepon sebanyak 1 rekening dan pembayaran air sebanyak 1 rekening
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (RSUD AU)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berdasarkan jumlah pemakaian listrik, telpon, internet dan air setiap bulannya	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berdasarkan jumlah pemakaian listrik, telpon, internet dan air setiap bulannya	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berdasarkan jumlah pemakaian listrik, telpon, internet dan air setiap bulannya	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berdasarkan jumlah pemakaian listrik, telpon, internet dan air setiap bulannya	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berdasarkan jumlah pemakaian listrik, telpon, internet dan air setiap bulannya
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	penyediaan alat-alat kebersihan kantor sebanyak 16 jenis, ATK sebanyak 20 jenis dan upah tenaga kebersihan	penyediaan alat-alat kebersihan kantor sebanyak 16 jenis, ATK sebanyak 20 jenis dan upah tenaga kebersihan sebanyak 3 orang	penyediaan alat-alat kebersihan kantor sebanyak 16 jenis, ATK sebanyak 20 jenis dan upah tenaga kebersihan sebanyak 3 orang	penyediaan alat-alat kebersihan kantor sebanyak 16 jenis, ATK sebanyak 20 jenis dan upah tenaga kebersihan sebanyak 3 orang	penyediaan alat-alat kebersihan kantor sebanyak 16 jenis, ATK sebanyak 20 jenis dan upah tenaga kebersihan sebanyak 3 orang

		sebanyak 3 orang				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (RSUD AU)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Honorarium penanggung jawaban pengelola keuangan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Honorarium penanggung jawaban pengelola keuangan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Honorarium penanggung jawaban pengelola keuangan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Honorarium penanggung jawaban pengelola keuangan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Honorarium penanggung jawaban pengelola keuangan
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	penyediaan BBM, servis, suku cadang dan pajak kendaraan dinas sebanyak 8 mobil dan 20 motor	penyediaan BBM, servis, suku cadang dan pajak kendaraan dinas sebanyak 8 mobil dan 20 motor	penyediaan BBM, servis, suku cadang dan pajak kendaraan dinas sebanyak 8 mobil dan 20 motor	penyediaan BBM, servis, suku cadang dan pajak kendaraan dinas sebanyak 8 mobil dan 20 motor	penyediaan BBM, servis, suku cadang dan pajak kendaraan dinas sebanyak 8 mobil dan 20 motor
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (RSUD AU)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berdasarkan berapa besar pajak yang dibayarkan pada setiap kendaraan baik roda empat maupun roda dua	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berdasarkan berapa besar pajak yang dibayarkan pada setiap kendaraan baik roda empat maupun roda dua	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berdasarkan berapa besar pajak yang dibayarkan pada setiap kendaraan baik roda empat maupun roda dua	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berdasarkan berapa besar pajak yang dibayarkan pada setiap kendaraan baik roda empat maupun roda dua	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berdasarkan berapa besar pajak yang dibayarkan pada setiap kendaraan baik roda empat maupun roda dua
1.02.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar (RSUD Alimuddin Umar)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar , untuk alat besar, seperti genset dan oksigen generator, dll	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar , untuk alat besar, seperti genset dan oksigen generator, dll	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar , untuk alat besar, seperti genset dan oksigen generator, dll	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar , untuk alat besar, seperti genset dan oksigen generator, dll	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar , untuk alat besar, seperti genset dan oksigen generator, dll
1.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel					
	Pemeliharaan Mebel (RSUD AU)	Pemeliharaan Mebel , pengdaan meubel dan furniture	Pemeliharaan Mebel , pengdaan meubel dan furniture	Pemeliharaan Mebel , pengdaan meubel dan furniture	Pemeliharaan Mebel , pengdaan meubel dan furniture	Pemeliharaan Mebel , pengdaan meubel dan furniture
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (RSUD AU)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, guna memelihara peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, guna memelihara peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, guna memelihara peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, guna memelihara peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, guna memelihara peralatan dan mesin lainnya
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung sebanyak 6 gedung (gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, gedung E, F	pemeliharaan gedung sebanyak 6 gedung (gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, gedung E, F	pemeliharaan gedung sebanyak 6 gedung (gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, gedung E, F)	pemeliharaan gedung sebanyak 6 gedung (gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, gedung E, F)	pemeliharaan gedung sebanyak 6 gedung (gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, gedung E, F)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (RSUD AU)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, rehab gedung kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, rehab gedung kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, rehab gedung kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, rehab gedung kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, rehab gedung kantor
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pembelian BBM 1 unit genset dan pemeliharaan komputer sebanyak 1 unit dan laptop sebanyak 9 unit	pembelian BBM 1 unit genset dan pemeliharaan komputer sebanyak 1 unit dan laptop sebanyak 9 unit	pembelian BBM 1 unit genset dan pemeliharaan komputer sebanyak 1 unit dan laptop sebanyak 9 unit	pembelian BBM 1 unit genset dan pemeliharaan komputer sebanyak 1 unit dan laptop sebanyak 9 unit	pembelian BBM 1 unit genset dan pemeliharaan komputer sebanyak 1 unit dan laptop sebanyak 9 unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (RSUD AU)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya berdasarkan bahan habis pakai dan jasa cleaning servise kebersihan RSUD AU	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya berdasarkan bahan habis pakai dan jasa cleaning servise kebersihan RSUD AU	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya berdasarkan bahan habis pakai dan jasa cleaning servise kebersihan RSUD AU	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya berdasarkan bahan habis pakai dan jasa cleaning servise kebersihan RSUD AU	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya berdasarkan bahan habis pakai dan jasa cleaning servise kebersihan RSUD AU
1.02.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Pemeliharaan/Rehabilitasi berupa pemasangan bronjong/penahan longsor pada area lahan fasyankes yang rawan longsor	Pemeliharaan/Rehabilitasi berupa pemasangan bronjong/penahan longsor pada area lahan fasyankes yang rawan longsor	Pemeliharaan/Rehabilitasi berupa pemasangan bronjong/penahan longsor pada area lahan fasyankes yang rawan longsor	Pemeliharaan/Rehabilitasi berupa pemasangan bronjong/penahan longsor pada area lahan fasyankes yang rawan longsor	Pemeliharaan/Rehabilitasi berupa pemasangan bronjong/penahan longsor pada area lahan fasyankes yang rawan longsor
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					

1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1. Melaksanakan kegiatan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan anggaran pendapatan dan belanja BLUD di Puskesmas Se-Kabupaten Lampung Barat dengan jumlah peserta 45 orang dimana masing-masing Puskesmas mengirimkan 3 orang terdiri Kasubbag TU, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD. 2. Kegiatan peningkatan pelayanan BLUD di 15 Puskesmas	1. Melaksanakan kegiatan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan anggaran pendapatan dan belanja BLUD di Puskesmas Se-Kabupaten Lampung Barat dengan jumlah peserta 45 orang dimana masing-masing Puskesmas mengirimkan 3 orang terdiri Kasubbag TU, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD. 2. Kegiatan peningkatan pelayanan BLUD di 15 Puskesmas	1. Melaksanakan kegiatan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan anggaran pendapatan dan belanja BLUD di Puskesmas Se-Kabupaten Lampung Barat dengan jumlah peserta 45 orang dimana masing-masing Puskesmas mengirimkan 3 orang terdiri Kasubbag TU, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD. 2. Kegiatan peningkatan pelayanan BLUD di 15 Puskesmas	1. Melaksanakan kegiatan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan anggaran pendapatan dan belanja BLUD di Puskesmas Se-Kabupaten Lampung Barat dengan jumlah peserta 45 orang dimana masing-masing Puskesmas mengirimkan 3 orang terdiri Kasubbag TU, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD. 2. Kegiatan peningkatan pelayanan BLUD di 15 Puskesmas	1. Melaksanakan kegiatan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan anggaran pendapatan dan belanja BLUD di Puskesmas Se-Kabupaten Lampung Barat dengan jumlah peserta 45 orang dimana masing-masing Puskesmas mengirimkan 3 orang terdiri Kasubbag TU, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD. 2. Kegiatan peningkatan pelayanan BLUD di 15 Puskesmas
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD AU)	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, pelayanan kesehatan yang bersumber dana BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, pelayanan kesehatan yang bersumber dana BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, pelayanan kesehatan yang bersumber dana BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, pelayanan kesehatan yang bersumber dana BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, pelayanan kesehatan yang bersumber dana BLUD
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Pembangunan Rumah Sakit Pratama Tipe D Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya				
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Puskesmas Pembantu di 15 di 15 kecamatan untuk mendukung Puskesmas ILP	Pembangunan Puskesmas Pembantu di 15 di 15 kecamatan untuk mendukung Puskesmas ILP	Pembangunan Puskesmas Pembantu di 15 di 15 kecamatan untuk mendukung Puskesmas ILP	Pembangunan Puskesmas Pembantu di 15 di 15 kecamatan untuk mendukung Puskesmas ILP	Pembangunan Puskesmas Pembantu di 15 di 15 kecamatan untuk mendukung Puskesmas ILP
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Pembangunan Rumah Dinas Untuk Tenaga Kesehatan di Puskesmas 2 unit,	Pembangunan Rumah Dinas Untuk Tenaga Kesehatan di Puskesmas 3 unit,	Pembangunan Rumah Dinas Untuk Tenaga Kesehatan di Puskesmas 3 unit,	Pembangunan Rumah Dinas Untuk Tenaga Kesehatan di Puskesmas 2 unit,	Pembangunan Rumah Dinas Untuk Tenaga Kesehatan di Puskesmas 2 unit,

1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit (RSUD AU)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit berdasarkan pemeliharaan gedung maupun diluar gedung	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit berdasarkan pemeliharaan gedung maupun diluar gedung	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit berdasarkan pemeliharaan gedung maupun diluar gedung	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit berdasarkan pemeliharaan gedung maupun diluar gedung	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit berdasarkan pemeliharaan gedung maupun diluar gedung
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Berkala 9 Puskesmas yang dibangun tahun 2018 (Puskesmas Lombok, Liwa, Batu Brak, Kenali, BNS, Sri Mulyo, Gedung Surian dan Sumber Jaya)	Rehabilitasi Puskesmas Sekincau menyesuaikan Puskesmas lainnya yang sudah sesuai prototype Kementerian Kesehatan dan rehabilitasi 5 puskesmas	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Berkala 5 Puskesmas (Puskesmas Buay Nyerupa, Pagar Dewa, Air Hitam dan Kebun Tebu, Lombok)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Berkala 5 Puskesmas (Puskesmas Batu Ketulis dan Fajar Bulan , Gedung Surian, Kenali, Sumber Jaya)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Berkala 5 Puskesmas (Puskesmas BNS, Srimulyo, Liwa, Batu Brak, Sekincau)
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Berkala di Puskesmas Pembantu di Tebaliokh, Luas, Betung, Rowo Rejo, Mekar Sari dan Sumber Alam	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Berkala di Puskesmas Pembantu di Bumi Hantatai, Kembahang dan Sulung	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Berkala di Puskesmas Pembantu di Bahway, Hujung dan Pekon Balak	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Berkala di Puskesmas Pembantu di Tanjung Raya, Waspada dan Sukabanjar	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Berkala di Puskesmas Pembantu di Tanjung Raya, Waspada dan Sukabanjar
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Puskesmas Liwa, Kebun Tebu, BNS dan Buay Nyerupa	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Puskesmas Batu Brak 2 unit, Kenali 1 unit dan BNS 2 unit	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Puskesmas Pagar Dewa 2 unit dan Fajar Bulan 2 unit	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Puskesmas Sumber jaya 1 unit, Gedung Surian 2 Unit, Fajar Bulan 1 unit dan Liwa 1 unit	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Puskesmas Sumber jaya 1 unit, Gedung Surian 2 Unit, Fajar Bulan 1 unit dan Liwa 1 unit
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan (RSUD AU)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan berdasarkan pemeliharaan rumah medis, rumah paramedis	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan berdasarkan pemeliharaan rumah medis, rumah paramedis	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan berdasarkan pemeliharaan rumah medis, rumah paramedis	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan berdasarkan pemeliharaan rumah medis, rumah paramedis	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan berdasarkan pemeliharaan rumah medis, rumah paramedis
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Puskesmas Keliling Roda Dua 15 Unit untuk tenaga promkes di 15 Puskesmas	Pengadaan ambulance untuk Puskesmas Liwa	Pengadaan ambulance untuk Puskesmas Lombok dan Sumber Jaya	Pengadaan ambulance untuk Puskesmas Batu Brak dan Puskesmas Keliling Roda 4 untuk Puskesmas BNS	Pengadaan ambulance untuk Puskesmas Batu Brak dan Puskesmas Keliling Roda 4 untuk Puskesmas BNS

	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD AU)	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan , Penggadaan gedung yang mendukung pelayanan kesehatan RS	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan , Penggadaan gedung yang mendukung pelayanan kesehatan RS	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan , Penggadaan gedung yang mendukung pelayanan kesehatan RS	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan , Penggadaan gedung yang mendukung pelayanan kesehatan RS	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan , Penggadaan gedung yang mendukung pelayanan kesehatan RS
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan prasarana air bersih Pustu tri mulyo, paving block Puskesmas BNS, Cipta Waras dan Kembahang, Pagar Puskesmas Liwa, Kenali, Sumber Jaya, Gedung Surian, sekincau, Srimulyo dan Fajar Bulan dan Solar cell Puskesmas Batu Brak	Pengadaan paving block Rumah Sakit Pratama Tipe D, Pagar Puskesmas Buay Nyerupa, Bronjong Puskesmas Kebun Tebu dan Gedung Surian	Pengadaan prasarana air bersih Puskesmas Batu Brak, Pustu Penataran, Pustu Turgak, Pustu Cipta Waras dan Pustu Basungan	Pengadaan prasarana air bersih Pustu Tanjung Raya, Way Mengaku, Kembahang,Turgak, Luas dan Pampangan	Pengadaan prasarana air bersih Pustu Tanjung Raya, Way Mengaku, Kembahang,Turgak, Luas dan Pampangan
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD AU)	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan melalui Pengadaan instalasi pendukung pelayanan kesehatan RS	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan melalui Pengadaan instalasi pendukung pelayanan kesehatan RS	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan melalui Pengadaan instalasi pendukung pelayanan kesehatan RS	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan melalui Pengadaan instalasi pendukung pelayanan kesehatan RS	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan melalui Pengadaan instalasi pendukung pelayanan kesehatan RS
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang untuk Puskesmas Liwa, Buay Nyerupa, Pagar Dewa, Air Hitam, Batu Brak, Sumber Jaya dan Sri Mulyo	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang untuk Puskesmas 15 Puskesmas di Kabupaten Lampung Barat	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang untuk Puskesmas 15 Puskesmas di Kabupaten Lampung Barat	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang untuk Puskesmas 15 Puskesmas di Kabupaten Lampung Barat	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang untuk Puskesmas 15 Puskesmas di Kabupaten Lampung Barat
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUDAU)	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Sebagai penunjang pelayanan RS	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Sebagai penunjang pelayanan RS	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Sebagai penunjang pelayanan RS	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Sebagai penunjang pelayanan RS	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Sebagai penunjang pelayanan RS

1.02.02.2.01.16	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, BMHP, Vaksin, Makanan dan Minuman di fasilitas Kesehatan	Pengadaan obat-obatan pelayanan kesehatan dasar juga vaksin (kecuali vaksin rutin) berdasarkan RKO tahun berjalan, pertemuan penyusunan RKO dengan tim RKO terpadu Dinkes (18 org) dan pertemuan penyusunan RKO dengan Apoteker/pengelola farmasi Puskesmas (15 org), perjadiin monev ke Puskesmas	Pengadaan obat-obatan pelayanan kesehatan dasar juga vaksin (kecuali vaksin rutin) berdasarkan RKO tahun berjalan, pertemuan penyusunan RKO dengan tim RKO terpadu Dinkes (18 org) dan pertemuan penyusunan RKO dengan Apoteker/pengelola farmasi Puskesmas (15 org), perjadiin monev ke Puskesmas	Pengadaan obat-obatan pelayanan kesehatan dasar juga vaksin (kecuali vaksin rutin) berdasarkan RKO tahun berjalan, pertemuan penyusunan RKO dengan tim RKO terpadu Dinkes (18 org) dan pertemuan penyusunan RKO dengan Apoteker/pengelola farmasi Puskesmas (15 org), perjadiin monev ke Puskesmas	Pengadaan obat-obatan pelayanan kesehatan dasar juga vaksin (kecuali vaksin rutin) berdasarkan RKO tahun berjalan, pertemuan penyusunan RKO dengan tim RKO terpadu Dinkes (18 org) dan pertemuan penyusunan RKO dengan Apoteker/pengelola farmasi Puskesmas (15 org), perjadiin monev ke Puskesmas	Pengadaan obat-obatan pelayanan kesehatan dasar juga vaksin (kecuali vaksin rutin) berdasarkan RKO tahun berjalan, pertemuan penyusunan RKO dengan tim RKO terpadu Dinkes (18 org) dan pertemuan penyusunan RKO dengan Apoteker/pengelola farmasi Puskesmas (15 org), perjadiin monev ke Puskesmas
	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin (RSUD AU)	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Penyeidaan Bahan habis pakai guna pelayanan penanganan covid-19	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Penyeidaan Bahan habis pakai guna pelayanan penanganan covid-19	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Penyeidaan Bahan habis pakai guna pelayanan penanganan covid-19	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Penyeidaan Bahan habis pakai guna pelayanan penanganan covid-19	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Penyeidaan Bahan habis pakai guna pelayanan penanganan covid-19
1.02.02.2.01.17	Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	Pengadaan bahan habis pakai untuk pelayanan kesehatan dasar berdasarkan Rencana Kebutuhan Bahan Habis Pakai tahun berjalan, pertemuan penyusunan RKBHP dengan tim RKBHP terpadu Dinkes (18 org) dan Apoteker/pengelola farmasi Puskesmas (15 org)	Pengadaan bahan habis pakai untuk pelayanan kesehatan dasar berdasarkan Rencana Kebutuhan Bahan Habis Pakai tahun berjalan, pertemuan penyusunan RKBHP dengan tim RKBHP terpadu Dinkes (18 org) dan Apoteker/pengelola farmasi Puskesmas (15 org)	Pengadaan bahan habis pakai untuk pelayanan kesehatan dasar berdasarkan Rencana Kebutuhan Bahan Habis Pakai tahun berjalan, pertemuan penyusunan RKBHP dengan tim RKBHP terpadu Dinkes (18 org) dan Apoteker/pengelola farmasi Puskesmas (15 org)	Pengadaan bahan habis pakai untuk pelayanan kesehatan dasar berdasarkan Rencana Kebutuhan Bahan Habis Pakai tahun berjalan, pertemuan penyusunan RKBHP dengan tim RKBHP terpadu Dinkes (18 org) dan Apoteker/pengelola farmasi Puskesmas (15 org)	Pengadaan bahan habis pakai untuk pelayanan kesehatan dasar berdasarkan Rencana Kebutuhan Bahan Habis Pakai tahun berjalan, pertemuan penyusunan RKBHP dengan tim RKBHP terpadu Dinkes (18 org) dan Apoteker/pengelola farmasi Puskesmas (15 org)
	Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai (RSUD AU)	Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai, Penyeidaan Bahan habis pakai guna pelayanan penanganan covid-19	Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai, Penyeidaan Bahan habis pakai guna pelayanan penanganan covid-19	Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai, Penyeidaan Bahan habis pakai guna pelayanan penanganan covid-19	Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai, Penyeidaan Bahan habis pakai guna pelayanan penanganan covid-19	Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai, Penyeidaan Bahan habis pakai guna pelayanan penanganan covid-19
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD Alimuddin Umar)	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, guna	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, guna pemeliharaan gedung	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, guna pemeliharaan gedung	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, guna pemeliharaan gedung	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, guna pemeliharaan gedung

		pemeliharaan gedung				
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD AU)	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD Alimuddin mar)				
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas yankes	Kalibrasi rutin berkala alat kesehatan di 15 Puskesmas	Kalibrasi rutin berkala alat kesehatan di 15 Puskesmas	Kalibrasi rutin berkala alat kesehatan di 15 Puskesmas	Kalibrasi rutin berkala alat kesehatan di 15 Puskesmas	Kalibrasi rutin berkala alat kesehatan di 15 Puskesmas
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUDAU)	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dilakukak untuk memelihara/mengganti suku cadang alat kesehatan	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dilakukak untuk memelihara/mengganti suku cadang alat kesehatan	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dilakukak untuk memelihara/mengganti suku cadang alat kesehatan	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dilakukak untuk memelihara/mengganti suku cadang alat kesehatan	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dilakukak untuk memelihara/mengganti suku cadang alat kesehatan
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pendistribusian Obat, Vaksin dan BMHP dari Kabupaten ke seluruh Puskesmas di Kabupaten Lampung Barat	Pendistribusian Obat, Vaksin dan BMHP dari Kabupaten ke seluruh Puskesmas di Kabupaten Lampung Barat	Pendistribusian Obat, Vaksin dan BMHP dari Kabupaten ke seluruh Puskesmas di Kabupaten Lampung Barat	Pendistribusian Obat, Vaksin dan BMHP dari Kabupaten ke seluruh Puskesmas di Kabupaten Lampung Barat	Pendistribusian Obat, Vaksin dan BMHP dari Kabupaten ke seluruh Puskesmas di Kabupaten Lampung Barat
1.02.02.2.01.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga	Terdiri dari Pertemuan Koordinasi Teknis Terintegrasi lintas program/lintas sektor puskesmas (2 kali, dengan jumlah peserta 55 orang), Pertemuan Analisis hasil PIS-PK terintegrasi lintas program di tingkat Kab/Kota (2 kali pertemuan daring dengan jumlah peserta 20 orang, 2 kali pertemuan offline dengan jumlah peserta 30 orang), Pelaksanaan Kunjungan Keluarga dan Intervensi awal dan Pelaksanaan intervensi dalam rangka intervensi	Terdiri dari Pertemuan Koordinasi Teknis Terintegrasi lintas program/lintas sektor puskesmas (2 kali, dengan jumlah peserta 55 orang), Pertemuan Analisis hasil PIS-PK terintegrasi lintas program di tingkat Kab/Kota (2 kali pertemuan daring dengan jumlah peserta 20 orang, 2 kali pertemuan offline dengan jumlah peserta 30 orang), Pelaksanaan Kunjungan Keluarga dan Intervensi awal dan Pelaksanaan intervensi lanjut termasuk perkesmas dalam rangka intervensi	Terdiri dari Pertemuan Koordinasi Teknis Terintegrasi lintas program/lintas sektor puskesmas (2 kali, dengan jumlah peserta 55 orang), Pertemuan Analisis hasil PIS-PK terintegrasi lintas program di tingkat Kab/Kota (2 kali pertemuan daring dengan jumlah peserta 20 orang, 2 kali pertemuan offline dengan jumlah peserta 30 orang), Pelaksanaan Kunjungan Keluarga dan Intervensi awal dan Pelaksanaan intervensi lanjut termasuk perkesmas dalam rangka intervensi hasil PIS-PK	Terdiri dari Pertemuan Koordinasi Teknis Terintegrasi lintas program/lintas sektor puskesmas (2 kali, dengan jumlah peserta 55 orang), Pertemuan Analisis hasil PIS-PK terintegrasi lintas program di tingkat Kab/Kota (2 kali pertemuan daring dengan jumlah peserta 20 orang, 2 kali pertemuan offline dengan jumlah peserta 30 orang), Pelaksanaan Kunjungan Keluarga dan Intervensi awal dan Pelaksanaan intervensi lanjut termasuk perkesmas dalam rangka intervensi	Terdiri dari Pertemuan Koordinasi Teknis Terintegrasi lintas program/lintas sektor puskesmas (2 kali, dengan jumlah peserta 55 orang), Pertemuan Analisis hasil PIS-PK terintegrasi lintas program di tingkat Kab/Kota (2 kali pertemuan daring dengan jumlah peserta 20 orang, 2 kali pertemuan offline dengan jumlah peserta 30 orang), Pelaksanaan Kunjungan Keluarga dan Intervensi awal dan Pelaksanaan intervensi lanjut termasuk perkesmas dalam rangka intervensi

		lanjut termasuk perkesmas dalam rangka intervensi hasil PIS-PK (68.276 keluarga)	hasil PIS-PK (69.276 keluarga)	(70.326 keluarga)	hasil PIS-PK (71.467 keluarga)	hasil PIS-PK (71.467 keluarga)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan paket persalinan sebanyak 350 paket, Pengadaan Buku KIA sebanyak 2900 buah , Dana Hibah Profesi IBI sebanyak 1 (satu) paket, Pendataan sasaran ibu hamil sebanyak 1675 orang, deteksi resiko tinggi ibu hamil 335 orang, penyeliaan fasilitatif 2 kali, pertemuan sosialisasi program dan monitoring evaluasi program di Kabupaten sebanyak 8 kali	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan paket persalinan sebanyak 400 paket, Pengadaan Buku KIA sebanyak 2900 buah , Dana Hibah Profesi IBI sebanyak 1 (satu) paket, Pendataan sasaran ibu hamil sebanyak 3350 orang, deteksi resiko tinggi ibu hamil 670 orang, penyeliaan fasilitatif 2 kali, pertemuan sosialisasi program dan monitoring evaluasi program di Kabupaten sebanyak 8 kali	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan paket persalinan sebanyak 450 paket, Pengadaan Buku KIA sebanyak 2900 buah , Dana Hibah Profesi IBI sebanyak 1 (satu) paket, Pendataan sasaran ibu hamil sebanyak 5025 orang, deteksi resiko tinggi ibu hamil 1005 orang, penyeliaan fasilitatif 2 kali, pertemuan sosialisasi program dan monitoring evaluasi program di Kabupaten sebanyak 8 kali	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan paket persalinan sebanyak 500 paket, Pengadaan Buku KIA sebanyak 2900 buah , Dana Hibah Profesi IBI sebanyak 1 (satu) paket, Pendataan sasaran ibu hamil sebanyak 6700 orang, deteksi resiko tinggi ibu hamil 1340 orang, penyeliaan fasilitatif 2 kali, pertemuan sosialisasi program dan monitoring evaluasi program di Kabupaten sebanyak 8 kali	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan paket persalinan sebanyak 500 paket, Pengadaan Buku KIA sebanyak 2900 buah , Dana Hibah Profesi IBI sebanyak 1 (satu) paket, Pendataan sasaran ibu hamil sebanyak 6700 orang, deteksi resiko tinggi ibu hamil 1340 orang, penyeliaan fasilitatif 2 kali, pertemuan sosialisasi program dan monitoring evaluasi program di Kabupaten sebanyak 8 kali

1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Ibu Bersalin	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran dan operasional RTK sebanyak 13 buah, Makan Minum Ibu Hamil dan pendamping yang tinggal di RTK sebanyak 1200 kali, Biaya transportasi rujukan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebanyak 742 kali rujukan	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran dan operasional RTK sebanyak 13 buah, Makan Minum Ibu Hamil dan pendamping yang tinggal di RTK sebanyak 1200 kali, Biaya transportasi rujukan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebanyak 742 kali rujukan	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran dan operasional RTK sebanyak 13 buah, Makan Minum Ibu Hamil dan pendamping yang tinggal di RTK sebanyak 1200 kali, Biaya transportasi rujukan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebanyak 742 kali rujukan	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran dan operasional RTK sebanyak 13 buah, Makan Minum Ibu Hamil dan pendamping yang tinggal di RTK sebanyak 1200 kali, Biaya transportasi rujukan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebanyak 742 kali rujukan	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran dan operasional RTK sebanyak 13 buah, Makan Minum Ibu Hamil dan pendamping yang tinggal di RTK sebanyak 1200 kali, Biaya transportasi rujukan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebanyak 742 kali rujukan
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk kunjungan rumah pada bayi baru lahir sebanyak 4.275 kali kunjungan untuk 15 puskesmas selama satu tahun, dan satu kali kunjungan terdiri dari 1 orang tenaga kesehatan dan dilaksanakan sebanyak 3 kali untuk satu bayi. Kegiatan yang dilakukan adalah pelayanan neonatal esensial setelah lahir usia 6 jam sampai 28 hari, pemeriksaan kesehatan dengan pendekatan MTBM, pemberian Vitamin K untuk bayi yang lahir tidak di fasyankes dan belum mendapatkan injeksi vitamin K1, Imunisasi hepatitis B untuk bayi <24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan dan penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk kunjungan rumah pada bayi baru lahir sebanyak 8.550 kali kunjungan untuk 15 puskesmas selama satu tahun, dan satu kali kunjungan terdiri dari 1 orang tenaga kesehatan dan dilaksanakan sebanyak 3 kali untuk satu bayi. Kegiatan yang dilakukan adalah pelayanan neonatal esensial setelah lahir usia 6 jam sampai 28 hari, pemeriksaan kesehatan dengan pendekatan MTBM, pemberian Vitamin K untuk bayi yang lahir tidak di fasyankes dan belum mendapatkan injeksi vitamin K1, Imunisasi hepatitis B untuk bayi <24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan dan penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk kunjungan rumah pada bayi baru lahir sebanyak 12.825 kali kunjungan untuk 15 puskesmas selama satu tahun, dan satu kali kunjungan terdiri dari 1 orang tenaga kesehatan dan dilaksanakan sebanyak 3 kali untuk satu bayi. Kegiatan yang dilakukan adalah pelayanan neonatal esensial setelah lahir usia 6 jam sampai 28 hari, pemeriksaan kesehatan dengan pendekatan MTBM, pemberian Vitamin K untuk bayi yang lahir tidak di fasyankes dan belum mendapatkan injeksi vitamin K1, Imunisasi hepatitis B untuk bayi <24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan dan penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk kunjungan rumah pada bayi baru lahir sebanyak 17.100 kali kunjungan untuk 15 puskesmas selama satu tahun, dan satu kali kunjungan terdiri dari 1 orang tenaga kesehatan dan dilaksanakan sebanyak 3 kali untuk satu bayi. Kegiatan yang dilakukan adalah pelayanan neonatal esensial setelah lahir usia 6 jam sampai 28 hari, pemeriksaan kesehatan dengan pendekatan MTBM, pemberian Vitamin K untuk bayi yang lahir tidak di fasyankes dan belum mendapatkan injeksi vitamin K1, Imunisasi hepatitis B untuk bayi <24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan dan penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk kunjungan rumah pada bayi baru lahir sebanyak 17.100 kali kunjungan untuk 15 puskesmas selama satu tahun, dan satu kali kunjungan terdiri dari 1 orang tenaga kesehatan dan dilaksanakan sebanyak 3 kali untuk satu bayi. Kegiatan yang dilakukan adalah pelayanan neonatal esensial setelah lahir usia 6 jam sampai 28 hari, pemeriksaan kesehatan dengan pendekatan MTBM, pemberian Vitamin K untuk bayi yang lahir tidak di fasyankes dan belum mendapatkan injeksi vitamin K1, Imunisasi hepatitis B untuk bayi <24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan dan penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi

1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk transportasi untuk tenaga kesehatan dalam upaya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di posyandu yang dilaksanakan di 260 posyandu yang dilaksanakan oleh 3 orang tenaga kesehatan setiap puskesmas selama 9 bulan dengan jumlah sasaran balita adalah 6.350. Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah penimbangan berat badan, pengukuran panjang/tinggi badan, pemantauan perkembangan melalui pemeriksaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang, pemberian kapsul vitamin A, dan pemberian imunisasi dasar lengkap, edukasi dan informasi	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk transportasi untuk tenaga kesehatan dalam upaya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di posyandu yang dilaksanakan di 260 posyandu yang dilaksanakan oleh 3 orang tenaga kesehatan setiap puskesmas selama 9 bulan dengan jumlah sasaran balita adalah 12.700. Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah penimbangan berat badan, pengukuran panjang/tinggi badan, pemantauan perkembangan melalui pemeriksaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang, pemberian kapsul vitamin A, dan pemberian imunisasi dasar lengkap, edukasi dan informasi	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk transportasi untuk tenaga kesehatan dalam upaya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di posyandu yang dilaksanakan di 260 posyandu yang dilaksanakan oleh 3 orang tenaga kesehatan setiap puskesmas selama 9 bulan dengan jumlah sasaran balita adalah 19.050. Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah penimbangan berat badan, pengukuran panjang/tinggi badan, pemantauan perkembangan melalui pemeriksaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang, pemberian kapsul vitamin A, dan pemberian imunisasi dasar lengkap, edukasi dan informasi	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk transportasi untuk tenaga kesehatan dalam upaya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di posyandu yang dilaksanakan di 260 posyandu yang dilaksanakan oleh 3 orang tenaga kesehatan setiap puskesmas selama 9 bulan dengan jumlah sasaran balita adalah 25.400. Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah penimbangan berat badan, pengukuran panjang/tinggi badan, pemantauan perkembangan melalui pemeriksaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang, pemberian kapsul vitamin A, dan pemberian imunisasi dasar lengkap, edukasi dan informasi	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk transportasi untuk tenaga kesehatan dalam upaya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di posyandu yang dilaksanakan di 260 posyandu yang dilaksanakan oleh 3 orang tenaga kesehatan setiap puskesmas selama 9 bulan dengan jumlah sasaran balita adalah 25.400. Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah penimbangan berat badan, pengukuran panjang/tinggi badan, pemantauan perkembangan melalui pemeriksaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang, pemberian kapsul vitamin A, dan pemberian imunisasi dasar lengkap, edukasi dan informasi
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Sekolah Dasar	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk transportasi untuk tenaga kesehatan dalam upaya pemberian pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang meliputi pendataan sasaran anak setingkat usia pendidikan dasar sebanyak orang, pelaksanaan skrining kesehatan yang terdiri dari penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, penilaian ketajaman indra, dan memberikan tindak lanjut hasil skrining dengan	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk transportasi untuk tenaga kesehatan dalam upaya pemberian pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang meliputi pendataan sasaran anak setingkat usia pendidikan dasar sebanyak orang, pelaksanaan skrining kesehatan yang terdiri dari penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, penilaian ketajaman indra, dan memberikan tindak lanjut hasil skrining dengan penyuluhan atau	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk transportasi untuk tenaga kesehatan dalam upaya pemberian pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang meliputi pendataan sasaran anak setingkat usia pendidikan dasar sebanyak orang, pelaksanaan skrining kesehatan yang terdiri dari penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, penilaian ketajaman indra, dan memberikan tindak lanjut hasil skrining dengan penyuluhan atau rujukan jika diperlukan.	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk transportasi untuk tenaga kesehatan dalam upaya pemberian pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang meliputi pendataan sasaran anak setingkat usia pendidikan dasar sebanyak orang, pelaksanaan skrining kesehatan yang terdiri dari penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, penilaian ketajaman indra, dan memberikan tindak lanjut hasil skrining dengan penyuluhan atau	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk transportasi untuk tenaga kesehatan dalam upaya pemberian pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang meliputi pendataan sasaran anak setingkat usia pendidikan dasar sebanyak orang, pelaksanaan skrining kesehatan yang terdiri dari penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, penilaian ketajaman indra, dan memberikan tindak lanjut hasil skrining dengan penyuluhan atau

		penyuluhan atau rujukan jika diperlukan. Dilaksanakan di 250 Sekolah Dasar, kegiatan selama 1 kali, jumlah tenaga kesehatan 5 orang masing-masing Puskesmas.	rujukan jika diperlukan. Dilaksanakan di 250 Sekolah Dasar, kegiatan selama 1 kali, jumlah tenaga kesehatan 5 orang masing-masing Puskesmas.	Dilaksanakan di 250 Sekolah Dasar, kegiatan selama 1 kali, jumlah tenaga kesehatan 5 orang masing-masing Puskesmas.	rujukan jika diperlukan. Dilaksanakan di 250 Sekolah Dasar, kegiatan selama 1 kali, jumlah tenaga kesehatan 5 orang masing-masing Puskesmas.	rujukan jika diperlukan. Dilaksanakan di 250 Sekolah Dasar, kegiatan selama 1 kali, jumlah tenaga kesehatan 5 orang masing-masing Puskesmas.
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cetak Buku Saku (1428 Buku),Jumlah Peserta Pertemuan Evaluasi Usia Produktif, (2 kali/thn),Jumlah Peserta Pertemuan Orientasi Upaya Berhenti Merokok/UBM (1 kali/thn) untuk menunjang pelayanan kesehatan pada usia produktif	Cetak Buku Saku (2000 Buku),Jumlah Peserta Pertemuan Evaluasi Usia Produktif, (2 kali/thn),Jumlah Peserta Pertemuan Orientasi PTM (1 kali/thn)untuk menunjang pelayanan kesehatan pada usia produktif	Cetak Buku Saku (2500 Buku),Jumlah Peserta Pertemuan Evaluasi Usia Produktif, (2 kali/thn),Jumlah Peserta Pertemuan Orientasi PTM (1 kali/thn)untuk menunjang pelayanan kesehatan pada usia produktif	Cetak Buku Saku (3000 Buku),Jumlah Peserta Pertemuan Evaluasi Usia Produktif, (2 kali/thn),Jumlah Peserta Pertemuan Orientasi PTM (1 kali/thn)untuk menunjang pelayanan kesehatan pada usia produktif	Cetak Buku Saku (3000 Buku),Jumlah Peserta Pertemuan Evaluasi Usia Produktif, (2 kali/thn),Jumlah Peserta Pertemuan Orientasi PTM (1 kali/thn)untuk menunjang pelayanan kesehatan pada usia produktif
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut	Terdiri dari Pelaksanaan Kegiatan P3K (Rutin dan Insidentil), Poskotis Hari raya (2 kali) Idul Fitri (15 hari) & Nataru (10 hari) , Pelaksanaan sunatan massal (150 peserta), Pertemuan Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Haji (45 orang), Pemeriksaan kesehatan CJH dan vaksinasi meningitis CJH (1 kali), Hibah PPNI	Terdiri dari Pelaksanaan Kegiatan P3K (Rutin dan Insidentil), Poskotis Hari raya (2 kali) Idul Fitri (15 hari) & Nataru (10 hari) , Pelaksanaan sunatan massal (150 peserta), Pertemuan Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Haji (45 orang), Pemeriksaan kesehatan CJH dan vaksinasi meningitis CJH (1 kali), Hibah PPNI	Terdiri dari Pelaksanaan Kegiatan P3K (Rutin dan Insidentil), Poskotis Hari raya (2 kali) Idul Fitri (15 hari) & Nataru (10 hari) , Pelaksanaan sunatan massal (150 peserta), Pertemuan Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Haji (45 orang), Pemeriksaan kesehatan CJH dan vaksinasi meningitis CJH (1 kali), Hibah PPNI	Terdiri dari Pelaksanaan Kegiatan P3K (Rutin dan Insidentil), Poskotis Hari raya (2 kali) Idul Fitri (15 hari) & Nataru (10 hari) , Pelaksanaan sunatan massal (150 peserta), Pertemuan Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Haji (45 orang), Pemeriksaan kesehatan CJH dan vaksinasi meningitis CJH (1 kali), Hibah PPNI	Terdiri dari Pelaksanaan Kegiatan P3K (Rutin dan Insidentil), Poskotis Hari raya (2 kali) Idul Fitri (15 hari) & Nataru (10 hari) , Pelaksanaan sunatan massal (150 peserta), Pertemuan Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Haji (45 orang), Pemeriksaan kesehatan CJH dan vaksinasi meningitis CJH (1 kali), Hibah PPNI
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Belanja Tensi Duduk (117 Unit) Untuk menunjang pelayanan kesehatan penderita hipertensi di fasyankes dan posbindu sesuai standar	Belanja Tensi Duduk (128 Unit) untuk menunjang pelayanan kesehatan penderita hipertensi di fasyankes dan posbindu sesuai standar	Belanja Tensi Duduk (140 Unit) untuk menunjang pelayanan kesehatan penderita hipertensi di fasyankes dan posbindu sesuai standar	Belanja Tensi Duduk (152Unit) untuk menunjang pelayanan kesehatan penderita hipertensi di fasyankes dan posbindu sesuai standar	Belanja Tensi Duduk (152Unit) untuk menunjang pelayanan kesehatan penderita hipertensi di fasyankes dan posbindu sesuai standar

1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Belanja Bahan Medis Habis Pakai/BMHP Alkohol Swab (497 Kotak),Blood Lancet (498 Kotak),Strip Gula Darah (550 Kotak) untuk menunjang pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus di fasyankes dan posbindu sesuai standar	Belanja Bahan Medis Habis Pakai/BMHP Alkohol Swab (540 Kotak),Blood Lancet (540 Kotak),Strip Gula Darah (605 Kotak) untuk menunjang pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus di fasyankes dan posbindu sesuai standar	Belanja Bahan Medis Habis Pakai/BMHP Alkohol Swab (600 Kotak),Blood Lancet (600 Kotak),Strip Gula Darah (665 Kotak) untuk menunjang pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus di fasyankes dan posbindu sesuai standar	Belanja Bahan Medis Habis Pakai/BMHP Alkohol Swab (660 Kotak),Blood Lancet (660 Kotak),Strip Gula Darah (730 Kotak) untuk menunjang pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus di fasyankes dan posbindu sesuai standar	Belanja Bahan Medis Habis Pakai/BMHP Alkohol Swab (660 Kotak),Blood Lancet (660 Kotak),Strip Gula Darah (730 Kotak) untuk menunjang pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus di fasyankes dan posbindu sesuai standar
2 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Penggandaan SDQ (46.130 lbr),Jumlah Penggandaan SRQ-20 (26.000 lbr),Jumlah Peserta Pertemuan Evaluasi ODGJ (2 kali/thn),Jumlah Peserta Pertemuan Posbindu Cerdik Jiwa (1 kali /thn) untuk menunjang pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar.	Jumlah Penggandaan SDQ (48.437 lbr),Jumlah Penggandaan SRQ-20 (27.300 lbr),Jumlah Peserta Pertemuan Evaluasi ODGJ (2 kali/thn),Jumlah Peserta Pertemuan Posbindu Cerdik Jiwa (1 kali /thn)untuk menunjang pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar.	Jumlah Penggandaan SDQ (50.860 lbr),Jumlah Penggandaan SRQ-20 (28.700 lbr),Jumlah Peserta Pertemuan Evaluasi ODGJ (2 kali/thn),Jumlah Peserta Pertemuan Posbindu Cerdik Jiwa (1 kali /thn)untuk menunjang pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar.	Jumlah Penggandaan SDQ (53.400 lbr),Jumlah Penggandaan SRQ-20 (30.000 lbr),Jumlah Peserta Pertemuan Evaluasi ODGJ (2 kali/thn),Jumlah Peserta Pertemuan Posbindu Cerdik Jiwa (1 kali /thn)untuk menunjang pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar.	Jumlah Penggandaan SDQ (53.400 lbr),Jumlah Penggandaan SRQ-20 (30.000 lbr),Jumlah Peserta Pertemuan Evaluasi ODGJ (2 kali/thn),Jumlah Peserta Pertemuan Posbindu Cerdik Jiwa (1 kali /thn)untuk menunjang pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar.
2 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis, dengan kegiatan Pertemuan dan Evaluasi Capaian Program TBC dengan Pengelola Program TBC di Puskesmas sebanyak 45 orang, Rapat Penyusunan Rencana Kerja Koalisi Organisasi Profesi (KOPI) TBC. Dengan kegiatan penunjang antara lain belanja ATK, Bahan Komputer, Bahan cetak, dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis, dengan kegiatan Pertemuan dan Evaluasi Capaian Program TBC dengan Pengelola Program TBC di Puskesmas sebanyak 45 orang. Pertemuan Jejaring Layanan Program TBC 45 orang. Dengan kegiatan penunjang antara lain belanja ATK, Bahan Komputer, Bahan cetak, dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis, dengan kegiatan Pertemuan dan Evaluasi Capaian Program TBC dengan Pengelola Program TBC di Puskesmas sebanyak 45 orang. Pertemuan Validasi data capaian program TBC 45 orang. Dengan kegiatan penunjang antara lain belanja ATK, Bahan Komputer, Bahan cetak, dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis, dengan kegiatan Pertemuan dan Evaluasi Capaian Program TBC dengan Pengelola Program TBC di Puskesmas sebanyak 45 orang. Pertemuan Validasi data capaian program TBC 45 orang. Dengan kegiatan penunjang antara lain belanja ATK, Bahan Komputer, Bahan cetak, dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis, dengan kegiatan Pertemuan dan Evaluasi Capaian Program TBC dengan Pengelola Program TBC di Puskesmas sebanyak 45 orang. Pertemuan Validasi data capaian program TBC 45 orang. Dengan kegiatan penunjang antara lain belanja ATK, Bahan Komputer, Bahan cetak, dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah.

2 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Risiko Teronfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Risiko Teronfeksi HIV, dengan kegiatan Pertemuan dan Evaluasi Capaian Program HIV dengan Pengelola Program TBC di Puskesmas sebanyak 45 orang. Dengan kegiatan penunjang antara lain belanja ATK, Bahan Komputer, Bahan cetak, dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah, serta belanja modal komputer jinjing/laptop.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Risiko Teronfeksi HIV, dengan kegiatan Pertemuan dan Evaluasi Capaian Program HIV dengan Pengelola Program TBC di Puskesmas sebanyak 45 orang. Dengan kegiatan penunjang antara lain belanja ATK, Bahan Komputer, Bahan cetak, dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Risiko Teronfeksi HIV, dengan kegiatan Pertemuan dan Evaluasi Capaian Program HIV dengan Pengelola Program TBC di Puskesmas sebanyak 45 orang. Dengan kegiatan penunjang antara lain belanja ATK, Bahan Komputer, Bahan cetak, dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Risiko Teronfeksi HIV, dengan kegiatan Pertemuan dan Evaluasi Capaian Program HIV dengan Pengelola Program TBC di Puskesmas sebanyak 45 orang. Dengan kegiatan penunjang antara lain belanja ATK, Bahan Komputer, Bahan cetak, dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Risiko Teronfeksi HIV, dengan kegiatan Pertemuan dan Evaluasi Capaian Program HIV dengan Pengelola Program TBC di Puskesmas sebanyak 45 orang. Dengan kegiatan penunjang antara lain belanja ATK, Bahan Komputer, Bahan cetak, dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah.
1 02 02 2.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi kejadian Luar Biasa (KLB)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Penyediaan Makanan Tambahan untuk ibu hamil miskin sebanyak 625 ibu hamil dan balita miskin sebanyak 3926 balita, kemudian DAK Stunting yang terdiri dari Rencana Aksi 1 sampai dengan Rencana Aksi 8, dan kegiatan pertemuan sosialisasi dan evaluasi program kesehatan gizi masyarakat sebanyak 8 kali pertemuan	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Penyediaan Makanan Tambahan untuk ibu hamil miskin sebanyak 650 ibu hamil dan balita miskin sebanyak 3926 balita, kemudian DAK Stunting yang terdiri dari Rencana Aksi 1 sampai dengan Rencana Aksi 8, dan kegiatan pertemuan sosialisasi dan evaluasi program kesehatan gizi masyarakat sebanyak 8 kali pertemuan	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Penyediaan Makanan Tambahan untuk ibu hamil miskin sebanyak 675 ibu hamil dan balita miskin sebanyak 3926 balita, kemudian DAK Stunting yang terdiri dari Rencana Aksi 1 sampai dengan Rencana Aksi 8, dan kegiatan pertemuan sosialisasi dan evaluasi program kesehatan gizi masyarakat sebanyak 8 kali pertemuan	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Penyediaan Makanan Tambahan untuk ibu hamil miskin sebanyak 700 ibu hamil dan balita miskin sebanyak 3926 balita, kemudian DAK Stunting yang terdiri dari Rencana Aksi 1 sampai dengan Rencana Aksi 8, dan kegiatan pertemuan sosialisasi dan evaluasi program kesehatan gizi masyarakat sebanyak 8 kali pertemuan	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Penyediaan Makanan Tambahan untuk ibu hamil miskin sebanyak 700 ibu hamil dan balita miskin sebanyak 3926 balita, kemudian DAK Stunting yang terdiri dari Rencana Aksi 1 sampai dengan Rencana Aksi 8, dan kegiatan pertemuan sosialisasi dan evaluasi program kesehatan gizi masyarakat sebanyak 8 kali pertemuan
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kebugaran pada Calon Jemaah haji/ASN di lingkungan	Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kebugaran pada Calon Jemaah haji/ASN di lingkungan	Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kebugaran pada Calon Jemaah haji/ASN di lingkungan	Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kebugaran pada Calon Jemaah haji/ASN di lingkungan	Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kebugaran pada Calon Jemaah haji/ASN di lingkungan

		Pemda Kabupaten Lampung Barat	Pemda Kabupaten Lampung Barat	Pemda Kabupaten Lampung Barat	Pemda Kabupaten Lampung Barat	Pemda Kabupaten Lampung Barat
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pemeriksaan Kualitas Air Minum Rumah tangga serta makanan dengan pengadaan Reagen Pemeriksaan untuk 15 Puskesmas yang bersumber Dana DAK non Fisik	Pemeriksaan Kualitas Air Minum Rumah tangga serta makanan dengan pengadaan Reagen Pemeriksaan untuk 15 Puskesmas yang bersumber Dana DAK non Fisik	Pemeriksaan Kualitas Air Minum Rumah tangga serta makanan dengan pengadaan Reagen Pemeriksaan untuk 15 Puskesmas yang bersumber Dana DAK non Fisik	Pemeriksaan Kualitas Air Minum Rumah tangga serta makanan dengan pengadaan Reagen Pemeriksaan untuk 15 Puskesmas yang bersumber Dana DAK non Fisik	Pemeriksaan Kualitas Air Minum Rumah tangga serta makanan dengan pengadaan Reagen Pemeriksaan untuk 15 Puskesmas yang bersumber Dana DAK non Fisik
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan melalui cetak dan media (tv,radio,skhu,online)di kabupaten Lampung Barat	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan melalui cetak dan media (tv,radio,skhu,online)di kabupaten Lampung Barat	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan melalui cetak dan media (tv,radio,skhu,online)di kabupaten Lampung Barat	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan melalui cetak dan media (tv,radio,skhu,online)di kabupaten Lampung Barat	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan melalui cetak dan media (tv,radio,skhu,online)di kabupaten Lampung Barat
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (RSUDAU)	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, melalui media baik media elektronik, dan media cetak	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, melalui media baik media elektronik, dan media cetak	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, melalui media baik media elektronik, dan media cetak	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, melalui media baik media elektronik, dan media cetak	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, melalui media baik media elektronik, dan media cetak
1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya					
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pertemuan petugas imunisasi (30 orang), Pertemuan petugas surveilans (30 orang), Perjalanan koordinasi dan konsultasi kegiatan ke Dinkes Provinsi (9 paket), Perjalanan koordinasi dan konsultasi kegiatan ke Kemenkes (1 paket)	Pertemuan petugas imunisasi (30 orang), Pertemuan petugas surveilans (30 orang), Perjalanan koordinasi dan konsultasi kegiatan ke Dinkes Provinsi (9 paket), Perjalanan koordinasi dan konsultasi kegiatan ke Kemenkes (2 paket)	Pertemuan petugas imunisasi (30 orang), Pertemuan petugas surveilans (30 orang), Perjalanan koordinasi dan konsultasi kegiatan ke Dinkes Provinsi (9 paket), Perjalanan koordinasi dan konsultasi kegiatan ke Kemenkes (1 paket)	Pertemuan petugas imunisasi (30 orang), Pertemuan petugas surveilans (30 orang), Perjalanan koordinasi dan konsultasi kegiatan ke Dinkes Provinsi (9 paket), Perjalanan koordinasi dan konsultasi kegiatan ke Kemenkes (2 paket)	Pertemuan petugas imunisasi (30 orang), Pertemuan petugas surveilans (30 orang), Perjalanan koordinasi dan konsultasi kegiatan ke Dinkes Provinsi (9 paket), Perjalanan koordinasi dan konsultasi kegiatan ke Kemenkes (2 paket)
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (RSUD AU)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA untuk pelayanan atau pemeriksaan kepada	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA untuk pelayanan atau pemeriksaan kepada	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA untuk pelayanan atau pemeriksaan kepada pengguna	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA untuk pelayanan atau pemeriksaan kepada	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA untuk pelayanan atau pemeriksaan kepada

		pengguna napza	pengguna napza	napza	pengguna napza	pengguna napza
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terdiri dari Pelaksanaan Kegiatan P3K (Rutin dan Insidentil), Poskotis Hari raya (2 kali) Idul Fitri (15 hari) & Nataru (10 hari) , Pelaksanaan sunatan massal (150 peserta), Pertemuan Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Haji (45 orang), Pemeriksaan kesehatan CJH dan vaksinasi meningitis CJH (1 kali), Hibah PPNI	Terdiri dari Pelaksanaan Kegiatan P3K (Rutin dan Insidentil), Poskotis Hari raya (2 kali) Idul Fitri (15 hari) & Nataru (10 hari) , Pelaksanaan sunatan massal (150 peserta), Pertemuan Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Haji (45 orang), Pemeriksaan kesehatan CJH dan vaksinasi meningitis CJH (1 kali), Hibah PPNI	Terdiri dari Pelaksanaan Kegiatan P3K (Rutin dan Insidentil), Poskotis Hari raya (2 kali) Idul Fitri (15 hari) & Nataru (10 hari) , Pelaksanaan sunatan massal (150 peserta), Pertemuan Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Haji (45 orang), Pemeriksaan kesehatan CJH dan vaksinasi meningitis CJH (1 kali), Hibah PPNI	Terdiri dari Pelaksanaan Kegiatan P3K (Rutin dan Insidentil), Poskotis Hari raya (2 kali) Idul Fitri (15 hari) & Nataru (10 hari) , Pelaksanaan sunatan massal (150 peserta), Pertemuan Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Haji (45 orang), Pemeriksaan kesehatan CJH dan vaksinasi meningitis CJH (1 kali), Hibah PPNI	Terdiri dari Pelaksanaan Kegiatan P3K (Rutin dan Insidentil), Poskotis Hari raya (2 kali) Idul Fitri (15 hari) & Nataru (10 hari) , Pelaksanaan sunatan massal (150 peserta), Pertemuan Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Haji (45 orang), Pemeriksaan kesehatan CJH dan vaksinasi meningitis CJH (1 kali), Hibah PPNI
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (RSUD AU)	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus berdasarkan biaya pengobatan tanggungan negara pasien yang tidak memiliki kartu JKN	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus berdasarkan biaya pengobatan tanggungan negara pasien yang tidak memiliki kartu JKN	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus berdasarkan biaya pengobatan tanggungan negara pasien yang tidak memiliki kartu JKN	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus berdasarkan biaya pengobatan tanggungan negara pasien yang tidak memiliki kartu JKN	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus berdasarkan biaya pengobatan tanggungan negara pasien yang tidak memiliki kartu JKN
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Pertemuan petugas kesehatan (1 kali), koordinasi dan konsultasi ke Dinkes Provinsi (5 paket), Konsultasi dan Koordinasi Kegiatan ke Kemenkes (2 paket), Pengadaan Kit Peralatan Krisis Kesehatan (7 set)	Pertemuan petugas kesehatan (1 kali), koordinasi dan konsultasi ke Dinkes Provinsi (5 paket), Konsultasi dan Koordinasi Kegiatan ke Kemenkes (2 paket), Pengadaan Kit Peralatan Krisis Kesehatan (7 set)	Pertemuan petugas kesehatan (1 kali), koordinasi dan konsultasi ke Dinkes Provinsi (5 paket), Konsultasi dan Koordinasi Kegiatan ke Kemenkes (2 paket), Pengadaan Kit Peralatan Krisis Kesehatan (3 set)	Pertemuan petugas kesehatan (1 kali), koordinasi dan konsultasi ke Dinkes Provinsi (5 paket), Konsultasi dan Koordinasi Kegiatan ke Kemenkes (2 paket), Belanja Komputer Jinjing (2 unit), Belanja Printer (1 unit)	Pertemuan petugas kesehatan (1 kali), koordinasi dan konsultasi ke Dinkes Provinsi (5 paket), Konsultasi dan Koordinasi Kegiatan ke Kemenkes (2 paket), Belanja Komputer Jinjing (2 unit), Belanja Printer (1 unit)

1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Melalui Pertemuan, Sosialisasi dan Evaluasi Capain Program Pentakit Menular 45 orang 2 kali dalam 1 tahun. Dengan kegiatan penunjang antara lain belanja ATK, Bahan Komputer, Bahan cetak, dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah. Belanja APD petugas fogging, Belanja RDT DBD NS 1, dan belanja bahan kimia pengendalian vektor (Abate dan Insectisida)	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Melalui Pertemuan, Sosialisasi dan Evaluasi Capain Program Pentakit Menular 45 orang 2 kali dalam 1 tahun. Dengan kegiatan penunjang antara lain belanja ATK, Bahan Komputer, Bahan cetak, dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah. Belanja RDT DBD NS 1, dan belanja bahan kimia pengendalian vektor (Abate dan Insectisida)	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Melalui Pertemuan, Sosialisasi dan Evaluasi Capain Program Pentakit Menular 45 orang 2 kali dalam 1 tahun. Dengan kegiatan penunjang antara lain belanja ATK, Bahan Komputer, Bahan cetak, dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah. Belanja RDT DBD NS 1, dan belanja bahan kimia pengendalian vektor (Abate dan Insectisida)	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Melalui Pertemuan, Sosialisasi dan Evaluasi Capain Program Pentakit Menular 45 orang 2 kali dalam 1 tahun. Dengan kegiatan penunjang antara lain belanja ATK, Bahan Komputer, Bahan cetak, dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah. Belanja RDT DBD NS 1, dan belanja bahan kimia pengendalian vektor (Abate dan Insectisida)	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Melalui Pertemuan, Sosialisasi dan Evaluasi Capain Program Pentakit Menular 45 orang 2 kali dalam 1 tahun. Dengan kegiatan penunjang antara lain belanja ATK, Bahan Komputer, Bahan cetak, dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah. Belanja RDT DBD NS 1, dan belanja bahan kimia pengendalian vektor (Abate dan Insectisida)
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pembiayaan JKN PBI/PBPU Pemda (15820 jiwa), Bayi Baru Lahir (300 jiwa), Subsidi kls III aktif (8000 jiwa), Bimtek JKN ke Puskesmas (15 Puskesmas), Pertemuan Pengelola JKN dan P-Care Puskesmas dua kali sebanyak 30 org.	Pembiayaan JKN PBI/PBPU Pemda (15820 jiwa), Bayi Baru Lahir (300 jiwa), Subsidi kls III aktif (8000 jiwa), Bimtek JKN ke Puskesmas (15 Puskesmas), Pertemuan Pengelola JKN dan P-Care Puskesmas dua kali sebanyak 30 org.	Pembiayaan JKN PBI/PBPU Pemda (15850 jiwa), Bayi Baru Lahir (300 jiwa), Subsidi kls III aktif (8000 jiwa), Bimtek JKN ke Puskesmas (15 Puskesmas), Pertemuan Pengelola JKN dan P-Care dan Kepala Puskesmas dua kali sebanyak 45 org.	Pembiayaan JKN PBI/PBPU Pemda (15850 jiwa), Bayi Baru Lahir (300 jiwa), Subsidi kls III aktif (8000 jiwa), Bimtek JKN ke Puskesmas (15 Puskesmas), Pertemuan Pengelola JKN dan P-Care dan Kepala Puskesmas dua kali sebanyak 45 org.	Pembiayaan JKN PBI/PBPU Pemda (15850 jiwa), Bayi Baru Lahir (300 jiwa), Subsidi kls III aktif (8000 jiwa), Bimtek JKN ke Puskesmas (15 Puskesmas), Pertemuan Pengelola JKN dan P-Care dan Kepala Puskesmas dua kali sebanyak 45 org.
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (RSUD AU)	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat berdasarkan kepada pasien JKN PBI, Jampersal dan tanggungan negara berupa Makanan Pendamping kepada keluarga pasien diberikan sehari 3 x selama pasien dirawat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat berdasarkan kepada pasien JKN PBI, Jampersal dan tanggungan negara berupa Makanan Pendamping kepada keluarga pasien diberikan sehari 3 x selama pasien dirawat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat berdasarkan kepada pasien JKN PBI, Jampersal dan tanggungan negara berupa Makanan Pendamping kepada keluarga pasien diberikan sehari 3 x selama pasien dirawat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat berdasarkan kepada pasien JKN PBI, Jampersal dan tanggungan negara berupa Makanan Pendamping kepada keluarga pasien diberikan sehari 3 x selama pasien dirawat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat berdasarkan kepada pasien JKN PBI, Jampersal dan tanggungan negara berupa Makanan Pendamping kepada keluarga pasien diberikan sehari 3 x selama pasien dirawat

1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Penggandaan Fomulir Assist (30.000 lembar),Perjalanan Dinas Dalam Rangka Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA Di Fasyankes dan Sekolah (6 Paket),Pertemuan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA (1 kali/thn)	Jumlah Penggandaan Fomulir Assist (40.000 lembar),Perjalanan Dinas Dalam Rangka Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA Di Fasyankes dan Sekolah (6 Paket)	Jumlah Penggandaan Fomulir Assist (50.000 lembar),Perjalanan Dinas Dalam Rangka Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA Di Fasyankes dan Sekolah (6 Paket)	Jumlah Penggandaan Fomulir Assist (60000 lembar),Perjalanan Dinas Dalam Rangka Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA Di Fasyankes dan Sekolah (6 Paket),Pertemuan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA (1 kali/thn)	Jumlah Penggandaan Fomulir Assist (60000 lembar),Perjalanan Dinas Dalam Rangka Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA Di Fasyankes dan Sekolah (6 Paket),Pertemuan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA (1 kali/thn)
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium	Perjalanan dinas ke Wilayah Puskesmas	Perjalanan dinas ke Wilayah Puskesmas (5 paket), Perjalanan dinas luar daerah (8 paket)	Perjalanan dinas ke Wilayah Puskesmas (5 paket), Perjalanan dinas luar daerah (8 paket)	Perjalanan dinas ke Wilayah Puskesmas (5 paket), Perjalanan dinas luar daerah (8 paket)	Perjalanan dinas ke Wilayah Puskesmas (5 paket), Perjalanan dinas luar daerah (8 paket)
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Pembinaan kecamatan sehat penilaian kabupaten sehat 5 kecamatan, perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka pembinaan, monitoring dan konsultasi	Tahap penilaian kabupaten sehat 15 kecamatan, perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi	Pembinaan kecamatan sehat penilaian kabupaten sehat 5 kecamatan, perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka pembinaan, monitoring dan konsultasi	Tahap penilaian kabupaten sehat 15 kecamatan, perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi	Pembinaan kecamatan sehat persiapan penilaian kabupaten sehat 15 kecamatan, perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Kesehatan					
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Kesehatan (RSUD AU)	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Kesehatan , penyediaan melalui jarak jauh/konsultasi jarak jauh	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Kesehatan , penyediaan melalui jarak jauh/konsultasi jarak jauh	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Kesehatan , penyediaan melalui jarak jauh/konsultasi jarak jauh	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Kesehatan , penyediaan melalui jarak jauh/konsultasi jarak jauh	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Kesehatan , penyediaan melalui jarak jauh/konsultasi jarak jauh
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Operasional pelayanan Rumah sakit pratama:	Operasional pelayanan Rumah sakit pratama: operasioanal	Operasional pelayanan Rumah sakit pratama:	Operasional pelayanan Rumah sakit pratama:

			operasioanal pemeliharaan gedung, Pembayaran listrik, Air, Telpon, gaji cleaning service, gaji satpam, insentif tenaga kesehatan, operasional kendaraan dinas, pembelian peralatan kebersihan, dan operasioanal peralatan kantor dll	pemeliharaan gedung, Pembayaran listrik, Air, Telpon, gaji cleaning service, gaji satpam, insentif tenaga kesehatan, operasional kendaraan dinas, pembelian peralatan kebersihan, dan operasioanal peralatan kantor dll	operasioanal pemeliharaan gedung, Pembayaran listrik, Air, Telpon, gaji cleaning service, gaji satpam, insentif tenaga kesehatan, operasional kendaraan dinas, pembelian peralatan kebersihan, dan operasioanal peralatan kantor dll	operasioanal pemeliharaan gedung, Pembayaran listrik, Air, Telpon, gaji cleaning service, gaji satpam, insentif tenaga kesehatan, operasional kendaraan dinas, pembelian peralatan kebersihan, dan operasioanal peralatan kantor dll
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSUD AU)	Operasional Pelayanan Rumah Sakit , Membiayai oprasional kegiatan yang berhubungan dengan managemen RS untuk meningkatkan administrasi pelayanan di RS	Operasional Pelayanan Rumah Sakit , Membiayai oprasional kegiatan yang berhubungan dengan managemen RS untuk meningkatkan administrasi pelayanan di RS	Operasional Pelayanan Rumah Sakit , Membiayai oprasional kegiatan yang berhubungan dengan managemen RS untuk meningkatkan administrasi pelayanan di RS	Operasional Pelayanan Rumah Sakit , Membiayai oprasional kegiatan yang berhubungan dengan managemen RS untuk meningkatkan administrasi pelayanan di RS	Operasional Pelayanan Rumah Sakit , Membiayai oprasional kegiatan yang berhubungan dengan managemen RS untuk meningkatkan administrasi pelayanan di RS
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Puskesmas dan Pustu Se- Kabupaten Lampung Barat yaitu operasional pembayaran Listrik, telpon, gaji satpam, gaji clening service dan pemeliharaan gedung Puskesmas dan Pustu	Operasional Puskesmas dan Pustu Se- Kabupaten Lampung Barat yaitu operasional pembayaran Listrik, telpon, gaji satpam, gaji clening service dan pemeliharaan gedung Puskesmas dan Pustu	Operasional Puskesmas dan Pustu Se- Kabupaten Lampung Barat yaitu operasional pembayaran Listrik, telpon, gaji satpam, gaji clening service dan pemeliharaan gedung Puskesmas dan Pustu	Operasional Puskesmas dan Pustu Se- Kabupaten Lampung Barat yaitu operasional pembayaran Listrik, telpon, gaji satpam, gaji clening service dan pemeliharaan gedung Puskesmas dan Pustu	Operasional Puskesmas dan Pustu Se- Kabupaten Lampung Barat yaitu operasional pembayaran Listrik, telpon, gaji satpam, gaji clening service dan pemeliharaan gedung Puskesmas dan Pustu
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional kantor UPT IFK, Operasional kendaraan dinas dan lapangan, pengambilan obat, vaksin dan BMHP ke Propinsi dan Honor tenaga kebersihan dan keamanan UPT IFK	Operasional kantor UPT IFK, Operasional kendaraan dinas dan lapangan, pengambilan obat, vaksin dan BMHP ke Propinsi dan Honor tenaga kebersihan dan keamanan UPT IFK	Operasional kantor UPT IFK, Operasional kendaraan dinas dan lapangan, pengambilan obat, vaksin dan BMHP ke Propinsi dan Honor tenaga kebersihan dan keamanan UPT IFK	Operasional kantor UPT IFK, Operasional kendaraan dinas dan lapangan, pengambilan obat, vaksin dan BMHP ke Propinsi dan Honor tenaga kebersihan dan keamanan UPT IFK	Operasional kantor UPT IFK, Operasional kendaraan dinas dan lapangan, pengambilan obat, vaksin dan BMHP ke Propinsi dan Honor tenaga kebersihan dan keamanan UPT IFK

1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terdiri dari Peningkatan dan Penilaian Mutu Eksternal (3 kali), Workshop Pendukung Akreditasi Puskesmas (1 Kali Pertemuan dengan jumlah peserta 30 orang), Peningkatan dan penilaian mutu eksternal/ Survey re Akreditasi (1 kali), Pertemuan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas (12 kali dengan jumlah peserta 40 orang), Pertemuan Lokakarya Mini Lintas Sektor (4 kali dengan jumlah peserta 70 orang)	Terdiri dari Peningkatan dan Penilaian Mutu Eksternal (3 kali), Workshop Pendukung Akreditasi Puskesmas (1 Kali Pertemuan dengan jumlah peserta 30 orang), Peningkatan dan penilaian mutu eksternal/ Survey re Akreditasi (1 kali), Pertemuan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas (12 kali dengan jumlah peserta 40 orang), Pertemuan Lokakarya Mini Lintas Sektor (4 kali dengan jumlah peserta 70 orang)	Terdiri dari Peningkatan dan Penilaian Mutu Eksternal (3 kali), Workshop Pendukung Akreditasi Puskesmas (1 Kali Pertemuan dengan jumlah peserta 30 orang), Peningkatan dan penilaian mutu eksternal/ Survey re Akreditasi (1 kali), Pertemuan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas (12 kali dengan jumlah peserta 40 orang), Pertemuan Lokakarya Mini Lintas Sektor (4 kali dengan jumlah peserta 70 orang)	Terdiri dari Peningkatan dan Penilaian Mutu Eksternal (3 kali), Workshop Pendukung Akreditasi Puskesmas (1 Kali Pertemuan dengan jumlah peserta 30 orang), Peningkatan dan penilaian mutu eksternal/ Survey re Akreditasi (1 kali), Pertemuan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas (12 kali dengan jumlah peserta 40 orang), Pertemuan Lokakarya Mini Lintas Sektor (4 kali dengan jumlah peserta 70 orang)	Terdiri dari Peningkatan dan Penilaian Mutu Eksternal (3 kali), Workshop Pendukung Akreditasi Puskesmas (1 Kali Pertemuan dengan jumlah peserta 30 orang), Peningkatan dan penilaian mutu eksternal/ Survey re Akreditasi (1 kali), Pertemuan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas (12 kali dengan jumlah peserta 40 orang), Pertemuan Lokakarya Mini Lintas Sektor (4 kali dengan jumlah peserta 70 orang)
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (RSUD AU)	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota, Kegiatan penilaian mutu pelayanan RS oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota, Kegiatan penilaian mutu pelayanan RS oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota, Kegiatan penilaian mutu pelayanan RS oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota, Kegiatan penilaian mutu pelayanan RS oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota, Kegiatan penilaian mutu pelayanan RS oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Operasional Tim Ambulan Hebat Kecamatan (15 Kecamatan), Operasional PSC 119 (1 Unit), Terlaksananya Pembinaan Tim Ambulan Hebat Kecamatan (15 Kecamatan), Terintegrasi nya Ambulans PSC 119 dengan RSAU Liwa, Jumlah Tim Ambulan Hebat Mendapatkan	Operasional Tim Ambulan Hebat Kecamatan (15 Kecamatan), Operasional PSC 119 (1 unit), Tersedia nya Seragam Tim PSC 119 dan Jejaring (80 stel), Terlaksananya Pembinaan Tim Ambulan Hebat Kecamatan (15 Kecamatan), Tersedia nya Ambulance Hebat 119 Kecamatan (5 Kecamatan)	Operasional Tim Ambulan Hebat Kecamatan (15 Kecamatan), Operasional PSC 119 (1 unit), Tersedia nya Seragam Tim PSC 119 dan Jejaring (80 stel), Terlaksananya Pembinaan Tim Ambulan Hebat Kecamatan (15 Kecamatan), Tersedia nya Ambulance Hebat 119 Kecamatan (5 Kecamatan)	Operasional Tim Ambulan Hebat Kecamatan (15 Kecamatan), Operasional PSC 119 (1 unit), Tersedia nya Rompi Tim PSC 119 dan Jejaring (80 stel), Terlaksananya Pembinaan Tim Ambulan Hebat Kecamatan (15 Kecamatan), Tersedia nya Ambulance Hebat 119 Kecamatan (5 Kecamatan)	Operasional Tim Ambulan Hebat Kecamatan (15 Kecamatan), Operasional PSC 119 (1 unit), Tersedia nya Rompi Tim PSC 119 dan Jejaring (80 stel), Terlaksananya Pembinaan Tim Ambulan Hebat Kecamatan (15 Kecamatan), Tersedia nya Ambulance Hebat 119 Kecamatan (5 Kecamatan)

		Pelatihan (80 orang), PSC 119 Memiliki call center 119 dan terintegrasi dengan NCC Kemkes (2 paket)				
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Pengelolaan Data dan Informasi dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Profil Kesehatan	Pengelolaan Data dan Informasi dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Profil Kesehatan	Pengelolaan Data dan Informasi dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Profil Kesehatan	Pengelolaan Data dan Informasi dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Profil Kesehatan	Pengelolaan Data dan Informasi dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Profil Kesehatan
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (RSUDAU)	Pengelolaan Data dan Informasi dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Profil Kesehatan	Pengelolaan Data dan Informasi dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Profil Kesehatan	Pengelolaan Data dan Informasi dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Profil Kesehatan	Pengelolaan Data dan Informasi dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Profil Kesehatan	Pengelolaan Data dan Informasi dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Profil Kesehatan
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan berbasis elektronik terpadu	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan berbasis elektronik terpadu	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan berbasis elektronik terpadu	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan berbasis elektronik terpadu	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan berbasis elektronik terpadu
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Pengadaan Komputer/Laptop, Server, dan perangkat lunak serta langganan jaringan internet	Pengadaan Komputer/Laptop, upgrade serta langganan jaringan internet	Pengadaan Komputer/Laptop, upgrade serta langganan jaringan internet	Pengadaan Komputer/Laptop, upgrade serta langganan jaringan internet	Pengadaan Komputer/Laptop, upgrade serta langganan jaringan internet
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota					
1 02 02 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit kelas C, D dan Fasilitas kesehatan lainnya	Pendampingan, visitasi dan pemberian rekomendasi perizinan Rumah Sakit Pratama Tipe D sesuai dengan Permenkes 14	Pendampingan, visitasi dan pemberian rekomendasi perizinan Rumah Sakit Pratama Tipe D sesuai dengan Permenkes 14 tahun 2021	Pendampingan, visitasi dan pemberian rekomendasi perizinan Rumah Sakit Pratama Tipe D sesuai dengan Permenkes 14 tahun 2021	Pendampingan, visitasi dan pemberian rekomendasi perizinan Rumah Sakit Pratama Tipe D sesuai dengan Permenkes 14 tahun 2021	Pendampingan, visitasi dan pemberian rekomendasi perizinan Rumah Sakit Pratama Tipe D sesuai dengan Permenkes 14 tahun 2021

		tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Risiko Sektor Kesehatan	tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Risiko Sektor Kesehatan	tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Risiko Sektor Kesehatan	tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Risiko Sektor Kesehatan	tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Risiko Sektor Kesehatan
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pelaksanaan Pengukuran Indikator Nasional Mutu dan Indeks Keselamatan Pasien	Pelaksanaan Pengukuran Indikator Nasional Mutu dan Indeks Keselamatan Pasien	Pelaksanaan Pengukuran Indikator Nasional Mutu dan Indeks Keselamatan Pasien	Pelaksanaan Pengukuran Indikator Nasional Mutu dan Indeks Keselamatan Pasien	Pelaksanaan Pengukuran Indikator Nasional Mutu dan Indeks Keselamatan Pasien
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (RSUDAU)	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan , melalui palatihan kepada tenaga fungsional tenaga kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan , melalui palatihan kepada tenaga fungsional tenaga kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan , melalui palatihan kepada tenaga fungsional tenaga kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan , melalui palatihan kepada tenaga fungsional tenaga kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan , melalui palatihan kepada tenaga fungsional tenaga kesehatan
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kabupaten Lampung Barat (15 Upt Puskesmas), Terlaksananya pertemuan operator sistrute di Kabupaten (45 org)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kabupaten Lampung Barat (15 Upt Puskesmas), Terlaksananya monitoring dan evaluasi sistrute di Puskesmas (15 Puskesmas)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kabupaten Lampung Barat (15 Upt Puskesmas), Terlaksananya pertemuan operator sistrute di Kabupaten (45 org)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kabupaten Lampung Barat (15 Upt Puskesmas), Terlaksananya monitoring dan evaluasi sistrute di Puskesmas (15 Puskesmas)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kabupaten Lampung Barat (15 Upt Puskesmas), Terlaksananya monitoring dan evaluasi sistrute di Puskesmas (15 Puskesmas)
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan					
1.02.03.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota					
1 02 03 2.01 01	Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Pelayanan pemberian rekomendasi surat izin praktik bagi tenaga kesehatan yang bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta visitasi Praktik Mandiri yang akan diterbitkan secara online melalui aplikasi perizinan PTSP Kabupaten	Pelayanan pemberian rekomendasi surat izin praktik bagi tenaga kesehatan yang bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta visitasi Praktik Mandiri yang akan diterbitkan secara online melalui aplikasi perizinan PTSP Kabupaten	Pelayanan pemberian rekomendasi surat izin praktik bagi tenaga kesehatan yang bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta visitasi Praktik Mandiri yang akan diterbitkan secara online melalui aplikasi perizinan PTSP Kabupaten	Pelayanan pemberian rekomendasi surat izin praktik bagi tenaga kesehatan yang bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta visitasi Praktik Mandiri yang akan diterbitkan secara online melalui aplikasi perizinan PTSP Kabupaten	Pelayanan pemberian rekomendasi surat izin praktik bagi tenaga kesehatan yang bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta visitasi Praktik Mandiri yang akan diterbitkan secara online melalui aplikasi perizinan PTSP Kabupaten
1 02 03 2.01 02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga kesehatan serta tindak	Pembinaan dan Pengawasan perizinan	Pembinaan dan Pengawasan perizinan praktik tenaga	Pembinaan dan Pengawasan perizinan praktik tenaga	Pembinaan dan Pengawasan perizinan praktik tenaga	Pembinaan dan Pengawasan perizinan praktik tenaga

	lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	praktik tenaga kesehatan baik yang bekerja di fasyankes dan praktik mandiri di wilayah Kabupaten Lampung Barat	kesehatan baik yang bekerja di fasyankes dan praktik mandiri di wilayah Kabupaten Lampung Barat	kesehatan baik yang bekerja di fasyankes dan praktik mandiri di wilayah Kabupaten Lampung Barat	kesehatan baik yang bekerja di fasyankes dan praktik mandiri di wilayah Kabupaten Lampung Barat	kesehatan baik yang bekerja di fasyankes dan praktik mandiri di wilayah Kabupaten Lampung Barat
1.02.03.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP &UKM di Wilayah Kabupaten/Kota					
1 02 03 2.02 01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Upaya penetapan jenis, jumlah, kualifikasi, dan distribusi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan serta upaya yang meliputi pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan. Pemerataan SDM kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan melalui penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (Tim Nusantara Sehat) atau individual di Puskesmas Terpencil dan sangat terpencil. Pendayagunaan SDMK bertujuan dapat didistribusikan dan dimanfaatkannya SDM Kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan	Upaya penetapan jenis, jumlah, kualifikasi, dan distribusi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan serta upaya yang meliputi pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan. Pemerataan SDM kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan melalui penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (Tim Nusantara Sehat) atau individual di Puskesmas Terpencil dan sangat terpencil. Pendayagunaan SDMK bertujuan dapat didistribusikan dan dimanfaatkannya SDM Kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan	Upaya penetapan jenis, jumlah, kualifikasi, dan distribusi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan serta upaya yang meliputi pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan. Pemerataan SDM kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan melalui penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (Tim Nusantara Sehat) atau individual di Puskesmas Terpencil dan sangat terpencil. Pendayagunaan SDMK bertujuan dapat didistribusikan dan dimanfaatkannya SDM Kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan	Upaya penetapan jenis, jumlah, kualifikasi, dan distribusi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan serta upaya yang meliputi pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan. Pemerataan SDM kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan melalui penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (Tim Nusantara Sehat) atau individual di Puskesmas Terpencil dan sangat terpencil. Pendayagunaan SDMK bertujuan dapat didistribusikan dan dimanfaatkannya SDM Kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan	Upaya penetapan jenis, jumlah, kualifikasi, dan distribusi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan serta upaya yang meliputi pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan. Pemerataan SDM kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan melalui penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (Tim Nusantara Sehat) atau individual di Puskesmas Terpencil dan sangat terpencil. Pendayagunaan SDMK bertujuan dapat didistribusikan dan dimanfaatkannya SDM Kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar	pembayaran gaji tenaga kesehatan PTTD/TKD Dokter 15 orang (Dokter Gigi dan Dokter Umum), Administrasi: 1 orang, Analis: 4 orang, Bidan	pembayaran gaji tenaga kesehatan PTTD/TKD Dokter 15 orang (Dokter Gigi dan Dokter Umum), Administrasi: 1 orang, Analis: 4 orang, Bidan Desa: 64	pembayaran gaji tenaga kesehatan PTTD/TKD Dokter 15 orang (Dokter Gigi dan Dokter Umum), Administrasi: 1 orang, Analis: 4 orang, Bidan Desa: 64 orang,	pembayaran gaji tenaga kesehatan PTTD/TKD Dokter 15 orang (Dokter Gigi dan Dokter Umum), Administrasi: 1 orang, Analis: 4 orang, Bidan Desa: 64	pembayaran gaji tenaga kesehatan PTTD/TKD Dokter 15 orang (Dokter Gigi dan Dokter Umum), Administrasi: 1 orang, Analis: 4 orang, Bidan Desa: 64

		Desa: 64 orang, Bidan: 16 orang, Farmasi: 1 orang, Kesehatan Lingkungan: 2 orang, Kesehatan Masyarakat: 2 orang, Perawat Gigi: 4 orang, Tenaga Perawat: 25 orang, masyarakat mendapat beasiswa pendidikan dokter: 15 orang)	orang, Bidan: 16 orang, Farmasi: 1 orang, Kesehatan Lingkungan: 2 orang, Kesehatan Masyarakat: 2 orang, Perawat Gigi: 4 orang, Tenaga Perawat: 25 orang, masyarakat mendapat beasiswa pendidikan dokter: 15 orang)	Bidan: 16 orang, Farmasi: 1 orang, Kesehatan Lingkungan: 2 orang, Kesehatan Masyarakat: 2 orang, Perawat Gigi: 4 orang, Tenaga Perawat: 25 orang, masyarakat mendapat beasiswa pendidikan dokter: 15 orang)	orang, Bidan: 16 orang, Farmasi: 1 orang, Kesehatan Lingkungan: 2 orang, Kesehatan Masyarakat: 2 orang, Perawat Gigi: 4 orang, Tenaga Perawat: 25 orang, masyarakat mendapat beasiswa pendidikan dokter: 15 orang)	orang, Bidan: 16 orang, Farmasi: 1 orang, Kesehatan Lingkungan: 2 orang, Kesehatan Masyarakat: 2 orang, Perawat Gigi: 4 orang, Tenaga Perawat: 25 orang, masyarakat mendapat beasiswa pendidikan dokter: 15 orang)
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar (RSUD AU)	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar , pemberian insentif diberikan kepada tenaga fungsional medis /non medis dan instalasi penunjang	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar , pemberian insentif diberikan kepada tenaga fungsional medis /non medis dan instalasi penunjang	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar , pemberian insentif diberikan kepada tenaga fungsional medis /non medis dan instalasi penunjang	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar , pemberian insentif diberikan kepada tenaga fungsional medis /non medis dan instalasi penunjang	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar , pemberian insentif diberikan kepada tenaga fungsional medis /non medis dan instalasi penunjang
1 02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia kesehatan	Untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kesehatan diperlukan upaya pembinaan dan pengawasan mutu sebagai bagian dari pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. Pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan juga ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pelaku pembangunan kesehatan dan konsumen pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan itu sendiri. Pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan dilakukan dengan melaksanakan standardisasi, sertifikasi dan lisensi, dengan meningkatkan kerjasama dengan pemangku	Untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kesehatan diperlukan upaya pembinaan dan pengawasan mutu sebagai bagian dari pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. Pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan juga ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pelaku pembangunan kesehatan dan konsumen pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan itu sendiri. Pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan dilakukan dengan melaksanakan standardisasi, sertifikasi dan lisensi, dengan meningkatkan kerjasama dengan pemangku	Untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kesehatan diperlukan upaya pembinaan dan pengawasan mutu sebagai bagian dari pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. Pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan juga ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pelaku pembangunan kesehatan dan konsumen pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan itu sendiri. Pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan dilakukan dengan melaksanakan standardisasi, sertifikasi dan lisensi, dengan meningkatkan kerjasama dengan pemangku	Untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kesehatan diperlukan upaya pembinaan dan pengawasan mutu sebagai bagian dari pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. Pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan juga ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pelaku pembangunan kesehatan dan konsumen pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan itu sendiri. Pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan dilakukan dengan melaksanakan standardisasi, sertifikasi dan lisensi, dengan meningkatkan kerjasama dengan pemangku	Untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kesehatan diperlukan upaya pembinaan dan pengawasan mutu sebagai bagian dari pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. Pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan juga ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pelaku pembangunan kesehatan dan konsumen pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan itu sendiri. Pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan dilakukan dengan melaksanakan standardisasi, sertifikasi dan lisensi, dengan meningkatkan kerjasama dengan pemangku

		dan lisensi, dengan meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya seperti Organisasi Profesi Kesehatan, dan pemerintah daerah	kepentingan lainnya seperti Organisasi Profesi Kesehatan, dan pemerintah daerah	kepentingan lainnya seperti Organisasi Profesi Kesehatan, dan pemerintah daerah	kepentingan lainnya seperti Organisasi Profesi Kesehatan, dan pemerintah daerah	kepentingan lainnya seperti Organisasi Profesi Kesehatan, dan pemerintah daerah
1.02.03.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi melalui pelatihan tenaga kesehatan didasarkan atas kajian kebutuhan pelatihan aparatur kesehatan berbasis data dan informasi pelatihan aparatur kesehatan yang akurat dan tepat waktu, serta memperhatikan penggunaan metodologi dan teknologi pelatihan yang inovatif, kreatif dan tepat guna dengan menerapkan prinsip peningkatan mutu yang berkesinambungan	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi melalui pelatihan tenaga kesehatan didasarkan atas kajian kebutuhan pelatihan aparatur kesehatan berbasis data dan informasi pelatihan aparatur kesehatan yang akurat dan tepat waktu, serta memperhatikan penggunaan metodologi dan teknologi pelatihan yang inovatif, kreatif dan tepat guna dengan menerapkan prinsip peningkatan mutu yang berkesinambungan	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi melalui pelatihan tenaga kesehatan didasarkan atas kajian kebutuhan pelatihan aparatur kesehatan berbasis data dan informasi pelatihan aparatur kesehatan yang akurat dan tepat waktu, serta memperhatikan penggunaan metodologi dan teknologi pelatihan yang inovatif, kreatif dan tepat guna dengan menerapkan prinsip peningkatan mutu yang berkesinambungan	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi melalui pelatihan tenaga kesehatan didasarkan atas kajian kebutuhan pelatihan aparatur kesehatan berbasis data dan informasi pelatihan aparatur kesehatan yang akurat dan tepat waktu, serta memperhatikan penggunaan metodologi dan teknologi pelatihan yang inovatif, kreatif dan tepat guna dengan menerapkan prinsip peningkatan mutu yang berkesinambungan	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi melalui pelatihan tenaga kesehatan didasarkan atas kajian kebutuhan pelatihan aparatur kesehatan berbasis data dan informasi pelatihan aparatur kesehatan yang akurat dan tepat waktu, serta memperhatikan penggunaan metodologi dan teknologi pelatihan yang inovatif, kreatif dan tepat guna dengan menerapkan prinsip peningkatan mutu yang berkesinambungan
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman					
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					
1.02.04.2.01.01	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	Rapat/ pertemuan/ koordinasi terkait	Rapat/ pertemuan/ koordinasi terkait	Rapat/ pertemuan/ koordinasi terkait	Rapat/ pertemuan/ koordinasi terkait	Rapat/ pertemuan/ koordinasi terkait

	Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	pemutakhiran data sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optikal, dan UMOT. Peserta pertemuan sebanyak 40 orang, terdiri dari 10 orang dari Dinkes (Kadis, Sekretaris, Kabid SDK, Subkoor Farmakmin, Pengelola Farmakmin, Subkoor SDMK, Subkoor Sarpras Alkes, Subkoor JKN Kestrad, Subag Perencanaan, Staf bidang SDK) dan 30 orang dari 15 Puskesmas (Kapus dan Pengelola Program)	pemutakhiran data sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optikal, dan UMOT. Peserta pertemuan sebanyak 40 orang, terdiri dari 10 orang dari Dinkes (Kadis, Sekretaris, Kabid SDK, Subkoor Farmakmin, Pengelola Farmakmin, Subkoor SDMK, Subkoor Sarpras Alkes, Subkoor JKN Kestrad, Subag Perencanaan, Staf bidang SDK) dan 30 orang dari 15 Puskesmas (Kapus dan Pengelola Program)	pemutakhiran data sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optikal, dan UMOT. Peserta pertemuan sebanyak 40 orang, terdiri dari 10 orang dari Dinkes (Kadis, Sekretaris, Kabid SDK, Subkoor Farmakmin, Pengelola Farmakmin, Subkoor SDMK, Subkoor Sarpras Alkes, Subkoor JKN Kestrad, Subag Perencanaan, Staf bidang SDK) dan 30 orang dari 15 Puskesmas (Kapus dan Pengelola Program)	pemutakhiran data sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optikal, dan UMOT. Peserta pertemuan sebanyak 40 orang, terdiri dari 10 orang dari Dinkes (Kadis, Sekretaris, Kabid SDK, Subkoor Farmakmin, Pengelola Farmakmin, Subkoor SDMK, Subkoor Sarpras Alkes, Subkoor JKN Kestrad, Subag Perencanaan, Staf bidang SDK) dan 30 orang dari 15 Puskesmas (Kapus dan Pengelola Program)	pemutakhiran data sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optikal, dan UMOT. Peserta pertemuan sebanyak 40 orang, terdiri dari 10 orang dari Dinkes (Kadis, Sekretaris, Kabid SDK, Subkoor Farmakmin, Pengelola Farmakmin, Subkoor SDMK, Subkoor Sarpras Alkes, Subkoor JKN Kestrad, Subag Perencanaan, Staf bidang SDK) dan 30 orang dari 15 Puskesmas (Kapus dan Pengelola Program)
1.02.04.2.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Perjalanan dinas dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan ke minimal 28 sarana (23 Apotek, 2 Toko Obat, 1 Toko Alkes, 2 Optikal)	Perjalanan dinas dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan ke minimal 29 sarana (24 Apotek, 2 Toko Obat, 1 Toko Alkes, 2 Optikal)	Perjalanan dinas dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan ke minimal 30 sarana (25 Apotek, 3 Toko Obat, 1 Toko Alkes, 1 Optikal)	Perjalanan dinas dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan ke minimal 31 sarana (26 Apotek, 3 Toko Obat, 1 Toko Alkes, 1 Optikal)	Perjalanan dinas dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan ke minimal 31 sarana (26 Apotek, 3 Toko Obat, 1 Toko Alkes, 1 Optikal)
1.02.03.2.02	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					
1.02.04.2.02.01	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin	Bimbingan teknis penyuluhan keamanan pangan bagi 80 orang pemilik/ penanggung	Bimbingan teknis penyuluhan keamanan pangan bagi 80 orang pemilik/ penanggung	Bimbingan teknis penyuluhan keamanan pangan bagi 80 orang pemilik/ penanggung jawab	Bimbingan teknis penyuluhan keamanan pangan bagi 80 orang pemilik/ penanggung	Bimbingan teknis penyuluhan keamanan pangan bagi 80 orang pemilik/ penanggung

	Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	jawab IRTP yang ingin mendapatkan SPPIRT, rapat penerbitan SPPIRT, rapat pengkajian ulang SPPIRT, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan pre market IRTP	jawab IRTP yang ingin mendapatkan SPPIRT, rapat penerbitan SPPIRT, rapat pengkajian ulang SPPIRT, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan pre market IRTP	IRTP yang ingin mendapatkan SPPIRT, rapat penerbitan SPPIRT, rapat pengkajian ulang SPPIRT, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan pre market IRTP	jawab IRTP yang ingin mendapatkan SPPIRT, rapat penerbitan SPPIRT, rapat pengkajian ulang SPPIRT, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan pre market IRTP	jawab IRTP yang ingin mendapatkan SPPIRT, rapat penerbitan SPPIRT, rapat pengkajian ulang SPPIRT, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan pre market IRTP
1.02.03.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					
1.02.03.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Monitoring dan evaluasi, koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Monitoring dan evaluasi, koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Monitoring dan evaluasi, koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Monitoring dan evaluasi, koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Monitoring dan evaluasi, koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
1.02.03.2.05	Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan					
1.02.03.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Sosialisasi portal website sertifikat laik hygiene sanitasi (SLHS) 30 orang dari 15 puskesmas, pembuatan stiker SLHS, perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka pembinaan, monitoring dan konsultasi	Evaluasi program kegiatanPenerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan 15 puskesmas, perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi	Evaluasi program kegiatanPenerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan 15 puskesmas, perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi	Evaluasi program kegiatanPenerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan 15 puskesmas, perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi	Evaluasi program kegiatanPenerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan 15 puskesmas, perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi
1.02.03.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan					

	minuman industri rumah tangga					
1.02.04.2.06.01	Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Sampling terhadap 27 produk IRTP untuk dilakukan pengujian keamanan pangan, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan post market ke minimal 60 sarana IRTP, pertemuan untuk membahas hasil pengawasan label dan iklan pangan dengan KPID/pakar iklan, pertemuan desk CAPA dengan pelaku 15 usaha IRTP	Sampling terhadap 27 produk IRTP untuk dilakukan pengujian keamanan pangan, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan post market ke minimal 60 sarana IRTP, pertemuan untuk membahas hasil pengawasan label dan iklan pangan dengan KPID/pakar iklan, pertemuan desk CAPA dengan 15 pelaku usaha IRTP	Sampling terhadap 27 produk IRTP untuk dilakukan pengujian keamanan pangan, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan post market ke minimal 60 sarana IRTP, pertemuan untuk membahas hasil pengawasan label dan iklan pangan dengan KPID/pakar iklan, pertemuan desk CAPA dengan 15 pelaku usaha IRTP	Sampling terhadap 27 produk IRTP untuk dilakukan pengujian keamanan pangan, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan post market ke minimal 60 sarana IRTP, pertemuan untuk membahas hasil pengawasan label dan iklan pangan dengan KPID/pakar iklan, pertemuan desk CAPA dengan 15 pelaku usaha IRTP	Sampling terhadap 27 produk IRTP untuk dilakukan pengujian keamanan pangan, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan post market ke minimal 60 sarana IRTP, pertemuan untuk membahas hasil pengawasan label dan iklan pangan dengan KPID/pakar iklan, pertemuan desk CAPA dengan 15 pelaku usaha IRTP
1.02.04.2.06.02	Subkegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Rapat/ pertemuan/ koordinasi terkait pemutakhiran data sarana Industri Rumah Tangga Pangan serta Produk Pangan Industri Rumah Tangga dengan peserta 40 orang. Peserta rapat sejumlah 10 orang dari Dinkes (Kabid SDK, Subkoor Farmakmin, Pengelola Farmakmin, Staf Bid. SDK, dan 6 orang tenaga PKP/DFI Dinkes), 30 orang dari Puskesmas (Kepala Puskesmas dan PKP/DFI Puskesmas)	Rapat/ pertemuan/ koordinasi terkait pemutakhiran data sarana Industri Rumah Tangga Pangan serta Produk Pangan Industri Rumah Tangga dengan peserta 40 orang. Peserta rapat sejumlah 10 orang dari Dinkes (Kabid SDK, Subkoor Farmakmin, Pengelola Farmakmin, Staf Bid. SDK, dan 6 orang tenaga PKP/DFI Dinkes), 30 orang dari Puskesmas (Kepala Puskesmas dan PKP/DFI Puskesmas)	Rapat/ pertemuan/ koordinasi terkait pemutakhiran data sarana Industri Rumah Tangga Pangan serta Produk Pangan Industri Rumah Tangga dengan peserta 40 orang. Peserta rapat sejumlah 10 orang dari Dinkes (Kabid SDK, Subkoor Farmakmin, Pengelola Farmakmin, Staf Bid. SDK, dan 6 orang tenaga PKP/DFI Dinkes), 30 orang dari Puskesmas (Kepala Puskesmas dan PKP/DFI Puskesmas)	Rapat/ pertemuan/ koordinasi terkait pemutakhiran data sarana Industri Rumah Tangga Pangan serta Produk Pangan Industri Rumah Tangga dengan peserta 40 orang. Peserta rapat sejumlah 10 orang dari Dinkes (Kabid SDK, Subkoor Farmakmin, Pengelola Farmakmin, Staf Bid. SDK, dan 6 orang tenaga PKP/DFI Dinkes), 30 orang dari Puskesmas (Kepala Puskesmas dan PKP/DFI Puskesmas)	Rapat/ pertemuan/ koordinasi terkait pemutakhiran data sarana Industri Rumah Tangga Pangan serta Produk Pangan Industri Rumah Tangga dengan peserta 40 orang. Peserta rapat sejumlah 10 orang dari Dinkes (Kabid SDK, Subkoor Farmakmin, Pengelola Farmakmin, Staf Bid. SDK, dan 6 orang tenaga PKP/DFI Dinkes), 30 orang dari Puskesmas (Kepala Puskesmas dan PKP/DFI Puskesmas)
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemintraan, Peningkatan					

	Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
1.02.05.2.01.01	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat dengan Sosialisasi program posyandu dengan peserta 75 orang, KIE DAN Bimtek Keamanan Pangan dengan peserta 250 orang, kegiatan BOK baik oleh kabupaten maupun puskesmas, perjalanan dinas ke kecamatan/puskesmas	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat dengan Sosialisasi program posyandu dengan peserta 75 orang, KIE DAN Bimtek Keamanan Pangan dengan peserta 250 orang, kegiatan BOK baik oleh kabupaten maupun puskesmas, perjalanan dinas ke kecamatan/puskesmas	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat dengan Sosialisasi program posyandu dengan peserta 75 orang, KIE DAN Bimtek Keamanan Pangan dengan peserta 250 orang, kegiatan BOK baik oleh kabupaten maupun puskesmas, perjalanan dinas ke kecamatan/puskesmas	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat dengan Sosialisasi program posyandu dengan peserta 75 orang, KIE DAN Bimtek Keamanan Pangan dengan peserta 250 orang, kegiatan BOK baik oleh kabupaten maupun puskesmas, perjalanan dinas ke kecamatan/puskesmas	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat dengan Sosialisasi program posyandu dengan peserta 75 orang, KIE DAN Bimtek Keamanan Pangan dengan peserta 250 orang, kegiatan BOK baik oleh kabupaten maupun puskesmas, perjalanan dinas ke kecamatan/puskesmas
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif, Preventif Tingkat Daerah Kabupaten Kota					
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Pada Masyarakat Dengan pertemuan peserta 150 orang dari 15 kecamatan dan perjalanan dinas ke 15 kecamatan serta kegiatan BOK oleh kabupaten maupun Puskesmas di kabupaten lampung barat	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Pada Masyarakat Dengan pertemuan peserta 150 orang dari 15 kecamatan dan perjalanan dinas ke 15 kecamatan serta kegiatan BOK oleh kabupaten maupun Puskesmas di kabupaten lampung barat	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Pada Masyarakat Dengan pertemuan peserta 150 orang dari 15 kecamatan dan perjalanan dinas ke 15 kecamatan serta kegiatan BOK oleh kabupaten maupun Puskesmas di kabupaten lampung barat	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Pada Masyarakat Dengan pertemuan peserta 150 orang dari 15 kecamatan dan perjalanan dinas ke 15 kecamatan serta kegiatan BOK oleh kabupaten maupun Puskesmas di kabupaten lampung barat	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Pada Masyarakat Dengan pertemuan peserta 150 orang dari 15 kecamatan dan perjalanan dinas ke 15 kecamatan serta kegiatan BOK oleh kabupaten maupun Puskesmas di kabupaten lampung barat
1.02.05.2.02.02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Masyarakat melalui pembinaan secara intensif kepada 300 keluarga terpilih, cetak leaflet, stiker	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Masyarakat melalui pembinaan secara intensif kepada 300 keluarga terpilih, cetak leaflet, stiker dan spanduk , makan dan	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Masyarakat melalui pembinaan secara intensif kepada 300 keluarga terpilih, cetak leaflet, stiker dan spanduk , makan dan	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Masyarakat melalui pembinaan secara intensif kepada 300 keluarga terpilih, cetak leaflet, stiker dan spanduk , makan dan	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Masyarakat melalui pembinaan secara intensif kepada 300 keluarga terpilih, cetak leaflet, stiker dan spanduk , makan dan

		dan spanduk , makan dan minum,batuan transport peserta pendukung kegiatan serta perjalanan dinas dalam wilayah diKabupaten Lampung Barat	minum,batuan transport peserta pendukung kegiatan serta perjalanan dinas dalam wilayah diKabupaten Lampung Barat	minum,batuan transport peserta pendukung kegiatan serta perjalanan dinas dalam wilayah diKabupaten Lampung Barat	minum,batuan transport peserta pendukung kegiatan serta perjalanan dinas dalam wilayah diKabupaten Lampung Barat	minum,batuan transport peserta pendukung kegiatan serta perjalanan dinas dalam wilayah diKabupaten Lampung Barat
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Tekhnis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Tekhnis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dengan pertemuan puskestren 48 orang diKabupaten Lampung Barat	Bimbingan Tekhnis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dengan pertemuan dan Pelantikan SBH (Saka Bakhti Husada) 50 orang diKabupaten Lampung Barat	Bimbingan Tekhnis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dengan pertemuan Kader PHBS 45 orang diKabupaten Lampung Barat	Bimbingan Tekhnis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dengan pertemuan Kader Kesing 45orang diKabupaten Lampung Barat	Bimbingan Tekhnis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dengan pertemuan Kader Kesing 45orang diKabupaten Lampung Barat

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN

Kinerja penyelenggaraan bidang kesehatan adalah menetapkan indikator kinerja penyelenggaraan perintah daerah di bidang kesehatan, yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan ukuran pelaksanaan program di bidang kesehatan.

Indikator kinerja secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Indikator kinerja bidang kesehatan dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh darisatu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja dinas. Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2026.

Berdasarkan tujuan kedua RPD Kabupaten Lampung Barat periode 2023-2026 yakni Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dengan Sasaran Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing maka Dinas Kesehatan menetapkan Indikator Strategis Bidang Kesehatan yang terdiri dari 1 (satu) Sasaran dan 3 (tiga) Indikator Kinerja.

Hasil penetapan indikator kinerja bidang kesehatan dituangkan pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.1 Indikator Kinerja Utama Bidang Kesehatan
Tahun 2025-2029

NO	SASARAN	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program dan Kegiatan	TARGET TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra / RPJMD
			2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) / 100.000 KH	100	95	90	80	75	75
		Angka Kematian Bayi (AKB/1.000 KH	3,6	3,4	3,2	3	2,6	2,6
		Prevalensi Balita Stunting (Pendek dan sangat pendek)	12,5	12	11,5	10,9	10,3	10,3
		Persentase TSR TB	90	90	90	90	90	90
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83	84	85	86	86	86

Tabel IV.2 Indikator Kinerja Kunci Bidang Kesehatan
Tahun 2025-2029

Urusan	IKK	Realisasi		Target					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Urusan Kesehatan Kabupaten/Kota	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan			0,407	0,403	0,399	0,395	0,392	0,388
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	83,23	88,04	80	82	85	88	90	92
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	81,38	98,90	88	89	90	91	92	93
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	85,97	97,67	91	92	93	94	95	96
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	83,74	95,8	50	55	60	65	70	75
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	86,03	95,54	50	55	60	65	70	75
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	84,22	99,47	85	85	88	89	90	95
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	88,72	95,18	80	83	87	89	90	95
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	72,75	95,8	75	75	78	85	90	95
	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	92,19	100	100	100	100	100	100
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	95,42	98,67	100	100	100	100	100	100
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	68,47	94,9	80	83	87	89	90	95
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	76,64	70	73	74	76	78	80

BAB V

PENUTUP

Dokumen Restra Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2030 disusun selain dengan pendekatan teknokratik yaitu melalui proses persiapan penyusunan yang dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, top-down bottom up yaitu metode penyusunan yang saling berkaitan, pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan seluruh stakeholders terkait.

Keberhasilan pencapaian RPD ini akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian pada Rencana Kerja Dinas Kesehatan dan melalui upaya sungguh-sungguh dan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas untuk mewujudkan Kabupaten Lampung Barat yang Hebat dan Sejahtera.

Liwa, 2 juni 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lampung Barat

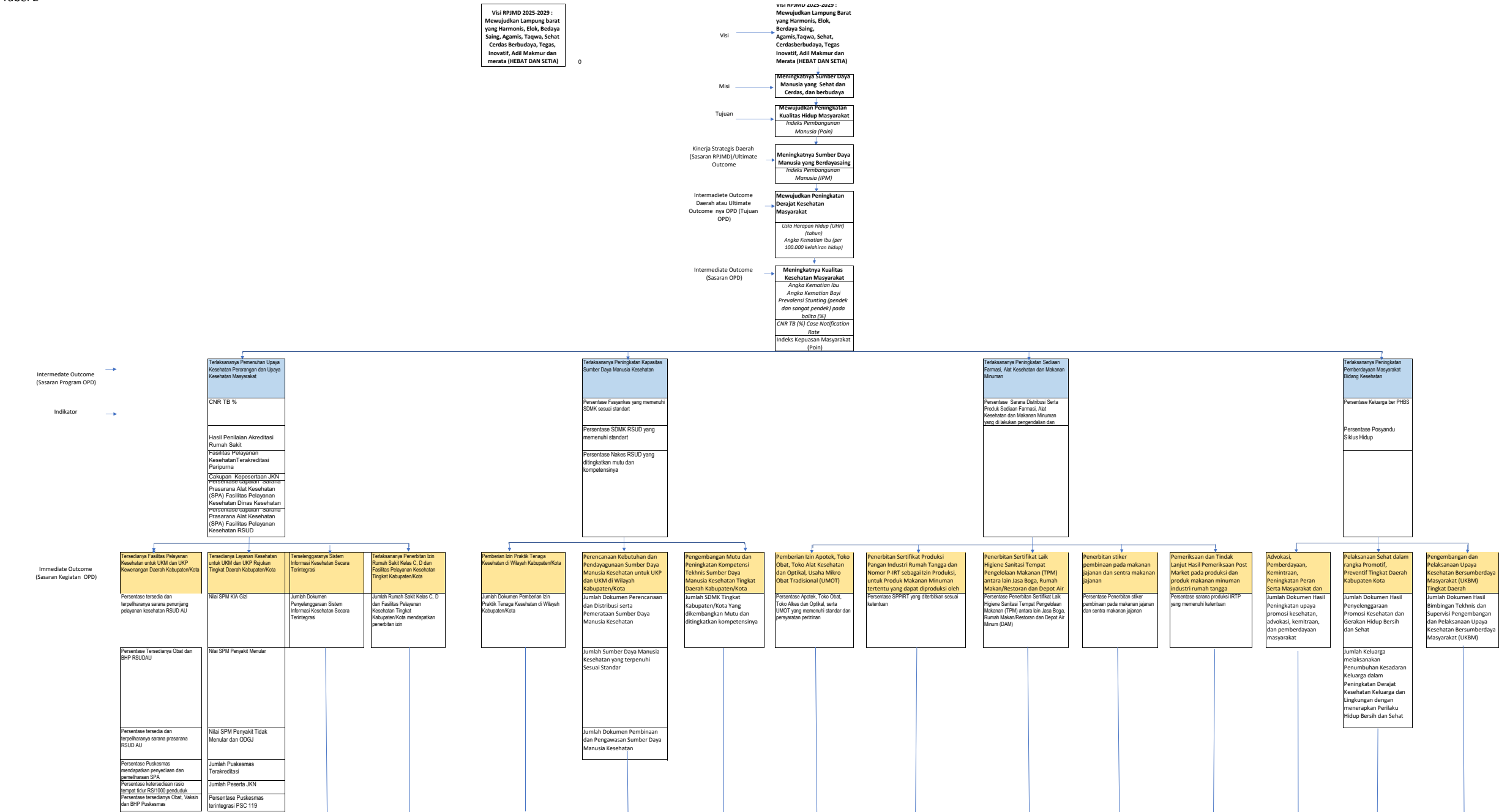


Dr. WIDYATMOKO KURNIAWAN, Sp.B

Pembina Utama Muda
NIP. 19700626 200501 1 007

LAMPIRAN

Tabel 2



Terlaksananya Pengolahan LingkunganKesehatan Masyarakat (IK : Dokumen)
Terlaksananya Deteksi Dini Penyakitgaraman NNTSA di Fasilitas dan Sekolah (IK : Dokumen)
Terlaksananya Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (IK : Dokumen)
Terlaksananya Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (IK : Dokumen)
Terlaksananya Penyediaan Telermedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (IK : Dokumen)
Terlaksananya Operasional Pelayanan Rumah Sakti (IK : Dokumen)
Terlaksananya Operasional Pelayanan Puskesmas (IK : Dokumen)
Terlaksananya Operasional Pelayanan Dokumen)
Terlaksananya Pelaksanaan Ministrasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (IK : Dokumen)
Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Tidak Pasca imunisasi danPemberian Obat Massal) (IK : Dokumen)
Terlaksananya Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Region Wabah (IK : Dokumen)
Terlaksananya Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (IK : Dokumen)
Terlaksananya Pengobatan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (IK : Orang)
Terlaksananya Pengobatan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
Terlaksananya Pengobatan pelayanan kesehatan Malaria (IK : Dokumen)
Terlaksananya Pengobatan Kawasan tanggap risiko (IK : Titipan)
Terlaksananya Pengobatan Pelayanan kesehatan Reproduksi (IK : Dokumen)
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (IK : Dokumen)
Terlaksananya Pengobatan upaya kesehatan Ibu dan Anak (IK : Dokumen)
Terlaksananya Pengobatan Pelayanan kelanjutannya (IK : Dokumen)

[illegible]

KALAJARAN								
Rincian Output dan Materi yang Didukung								
Indikator/ Sasaran	Satuan	Semester 2024	target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indikator Peningkatan Materi (PM)	unit	7.2.1	7.2.5	7.2.3	7.2.2	7.2.6	7.2.7	7.2.1

Tahun									
Indikator/Persepsi yang harus tercapai									
Indikator Tujuan	Formatasi Pengukuran	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Area Nelayan Melay	luas area terdistribusi untuk nelayan perikanan X perhektare	hektar	7500	7500	7425	7425	7425	7425	7425
Angka Persentase (rata-rata 100-200)	terdistribusi nelayan perikanan X perhektare	%	110	105	90	90	90	90	90

[illegible]

REKENTRA 2021-2023										
TUGAS										
Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat Kabupaten										
Sektor Program	Initiator Program	Fokus Kegiatan	Detail	Berkas	Tgl					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
Administrasi Keuangan Pemerintah Pusat Kabupaten	2020-2021	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
REK	2020-2021	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

[illegible]

Lampiran 2a/16							
Pergerakan Saluran Pemangan Ronggail Dairi							
Saluran Subkategorikan	Indikator Subkategorikan	Saluran	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Pergerakan Saluran Pemangan Ronggail Dairi	Saluran Saluran Pemangan Ronggail Dairi	Saluran	0	0	0	0	0
Pergerakan Saluran Pemangan Ronggail Dairi (RSD: Aliran)	Saluran Saluran Pemangan Ronggail Dairi	Saluran	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

KENDARIAN						
Kendaraan dan Perangannya						
Kendaraan dan Perangannya RKA SPPD						
Revisi Subtagihan	Indikator Subtagihan	Subsai	Target			
			2016	2017	2018	2019
Perbaikan Dokumen RKA SPPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Pengawasan Dokumen RKA SPPD	Indikator Dokumen RKA SPPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Pengawasan Dokumen RKA SPPD	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00
Perbaikan Dokumen RKA SPPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Pengawasan Dokumen RKA SPPD	Indikator Dokumen RKA SPPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Pengawasan Dokumen RKA SPPD	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00

INSTRUMEN						
Konsistensi dan Pengukuran Dokumentasi Perubahan RMA-SKPD						
Sesuai Subkategori	Indikator Subkategori	Skala	Tahun			
			2019	2020	2021	2022
Pengendalian Dokumen RMA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Pengawasan Dokumentasi Perubahan RMA-SKPD	Limitasi Dokumen RMA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi dan Pengawasan Dokumentasi Perubahan RMA-SKPD	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00
Pengendalian Dokumen RMA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Pengawasan Dokumentasi Perubahan RMA-SKPD (KSLU Aktivitas User)	Limitasi Dokumen RMA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi dan Pengawasan Dokumentasi Perubahan RMA-SKPD	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00

Substruktur						
Kategorie des Projekts: DPA, BAPD						
Struktur-Subkategorie	Indikator-Subkategorie	Status	Jahre			
			2020	2021	2022	2023
Struktur-Subkategorie DPA, BAPD	Indikator-Subkategorie DPA, BAPD	Struktur	1,00	1,00	1,00	1,00
Struktur-Subkategorie DPA, BAPD	Indikator-Subkategorie DPA, BAPD	Struktur	1,00	1,00	1,00	1,00
Struktur-Subkategorie DPA, BAPD	Indikator-Subkategorie DPA, BAPD	Struktur	1,00	1,00	1,00	1,00

Membaca/Nilai						
Kendaraan dan Peralengkapan Perahu DPA-SPPD						
Sasaran Sub-Kategori	Indikator Sub-Kategori	Subsai	2006	2007	Target 2008	2009
Perencanaan dan Pelaksanaan DPA-SPPD dan Laporan Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan DPA-SPPD dan Laporan Hasil	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00
Kendaraan dan Peralengkapan Perahu DPA-SPPD	Jumlah Peralengkapan Perahu DPA-SPPD	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00
Perencanaan dan Pelaksanaan DPA-SPPD dan Laporan Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan DPA-SPPD dan Laporan Hasil	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00
Kendaraan dan Peralengkapan Perahu DPA-SPPD	Jumlah Peralengkapan Perahu DPA-SPPD	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00

[illegible]

Subsidiary						
Business Kriteria Peringkat Daerah						
Business Subkategoris	Indikator Subkategoris	Satuan	Target			
			2019	2020	2021	2022
Business Kriteria Kriteria Peringkat Daerah	Indikator Laporan Kriteria Kriteria Peringkat Daerah	Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00
Business Kriteria Kriteria Peringkat Daerah	Indikator Laporan Kriteria Kriteria Peringkat Daerah	Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00

Berkas/DA/MS						
Pengelolaan Dag dan Tunjangan ASN						
Sasaran Subkategori	Indikator Subkategori	Sasaran	Target			
			2020	2021	2022	2023
Pembiayaan Dag dan Tunjangan ASN	Saluran pengalokasian Dag dan Tunjangan ASN	uang	855.00	855.00	855.00	855.00

Pembinaan, Peningkatan dan Pengawasan Kualitas RUPD							
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Sasaran	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Pembinaan, Peningkatan dan Pengawasan Kualitas RUPD	Arifin Dokumen Peningkatan dan Pengawasan Kualitas RUPD (60%)	Dokumen	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00

Subkategorie							
Koordinate des Projektes/Abstrakte BPP							
Seiten Subkategorie	Indikator Subkategorie	Status	Ziel				
			2026	2027	2028	2029	2030
Technische Koordinate des Projektes/Abstrakte BPP	Technische Koordinate des Projektes/Abstrakte BPP	Status	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Berkas/Barang						
Kendaraan dan Peralatan Lapangan Kegiatan Aksi Tahun 2020						
Sesuai Subkategori	Indikator Subkategori	Satuan	Target			
			2020	2021	2022	2023
Herdikawana Nondilabel dan Peralatan Lapangan Kegiatan Aksi Tahun 2020	Akhir Laporan Penerimaan Peralatan Lapangan Kegiatan Aksi Tahun 2020 dan Laporan Koordinasi dan Penerimaan Lapangan Kegiatan Aksi Tahun 2020	laporan	1,00	1,00	1,00	1,00
Herdikawana Nondilabel dan Peralatan Lapangan Kegiatan Aksi Tahun 2020 (SISD Amubulu shah)	Akhir Laporan Penerimaan Peralatan Lapangan Kegiatan Aksi Tahun 2020 dan Laporan Koordinasi dan Penerimaan Lapangan Kegiatan Aksi Tahun 2020	laporan	2,00	2,00	2,00	2,00

SUBKATEGORI							
Penggunaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemertisahan							
Babakan SubKategori	Indikator SubKategori	Satuan	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
Penggunaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemertisahan dan Tindak	Gambaran dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemertisahan dan Tindak	Indikator	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05

[illegible]

Laporan Laporan Keuangan Badan/Pratubadan (Sementara) (per 30/06/2016)	Laporan Laporan Keuangan Badan/Pratubadan (Sementara) (per 30/06/2016)				
Subsidiaris/Anak					
Penyusunan Laporan dan Analisa Program Rekrutasi Anggaran					
Sesuai Subkategori	Indikator Subkategori	Skor	2016	2016	2016
Penyusunan Laporan dan Analisa Program Rekrutasi Anggaran	Analisa Program Rekrutasi dan Analisa Program Rekrutasi	Skor	2,00	2,00	2,00
Penyusunan Laporan dan Analisa Program Rekrutasi Anggaran	Analisa Program Rekrutasi dan Analisa Program Rekrutasi	Skor	1,00	1,00	1,00

[illegible]

[illegible]

KEMENTERIAN KESEHATAN RI						
PENGANTARAN PENYEPAN KERAJAAN RI						
Sasaran Subkategori	Indikator Subkategori	Satuan	2024	2027	2028	2029
Perencanaan Pengiriman Penyepan Kesehatan RI Hirdi sesuai standar	Salah satu hasil yang mendukung pelaksanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan adalah terdapatnya standar pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, terjangkau, dan mudah diakses. Salah satu hasil yang mendukung pelaksanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan adalah terdapatnya standar pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, terjangkau, dan mudah diakses.	Persentase	82	85	88	90

Buku Kisi-Kisi							
Penguasaan Pengetahuan dan Keterampilan							
Penguasaan Pengetahuan dan Keterampilan							
Indikator Subdiges	Indikator Subdiges	Subtes	Tes				
			2014	2017	2018	2019	2020
Penguasaan Pengetahuan Pengetahuan dan Keterampilan	Indikator Subdiges	Subtes	2014	2017	2018	2019	2020
Penguasaan Pengetahuan Pengetahuan dan Keterampilan	Indikator Subdiges	Subtes	2014	2017	2018	2019	2020

KURANG/TAJID							
Penguatan Program Kesehatan Bay Baru Lahir							
Sasaran Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
Penguatan Pengawasan Pelayanan Kesehatan Bay Baru Lahir sesuai standar	jumlah bay baru lahir yang mendapatkan pelayanan bay baru lahir sesuai standar pada rumah sakit/terpadu di wilayah kesehatan target 1 (wilayah kesehatan 1 bay baru lahir pada tahun kedua rencana 5 rumah sakit/terpadu di wilayah kesehatan 1	orang	80	81	84	85	88

[illegible]

KINERJA						
Pengukuran Peningkatan Kelembutan pada Uji Penulisan Dasar						
Aspek Subkategori	Indikator Subkategori	Skala	2019	2021	Target	2020
Peningkatan Penguasaan, Penguasaan Hasil belajar pada Uji Penulisan dasar sesuai standar	Hasil akhir yang ditetapkan dalam penilaian yang akan dilaksanakan 7-8 SKM/kecamatan, dan 10-12 SKM/kecamatan dan Penguasaan yang akan dinilai. Hasil akhir, SKM/kecamatan, dan SKM/kecamatan di masing-masing Kecamatan $\times 100\%$	100	92	94	94	100

SUBSISTEM							
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Uji Produk2							
Sasaran SubSistem	Indikator SubSistem	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan Pengawasan Pelayanan Kesehatan pada Uji Produk2 sesuai standar	Jumlah Uji Produk2 yang tercapai/pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00

[illegible]

SUBKATEGORI							
Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi							
Sasaran Subkategori	Indikator Subkategori	Satuan	Target				
			2020	2021	2028	2029	2030
Memelihara Penguasaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai standar	Saluran Perantara Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000

SUBSISTEM							
Pengalihan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus							
Sasaran Subgiatan	Indikator Subgiatan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penyelesaian Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus sesuai standar	Saluran Pemindahaliran Mieloid yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00

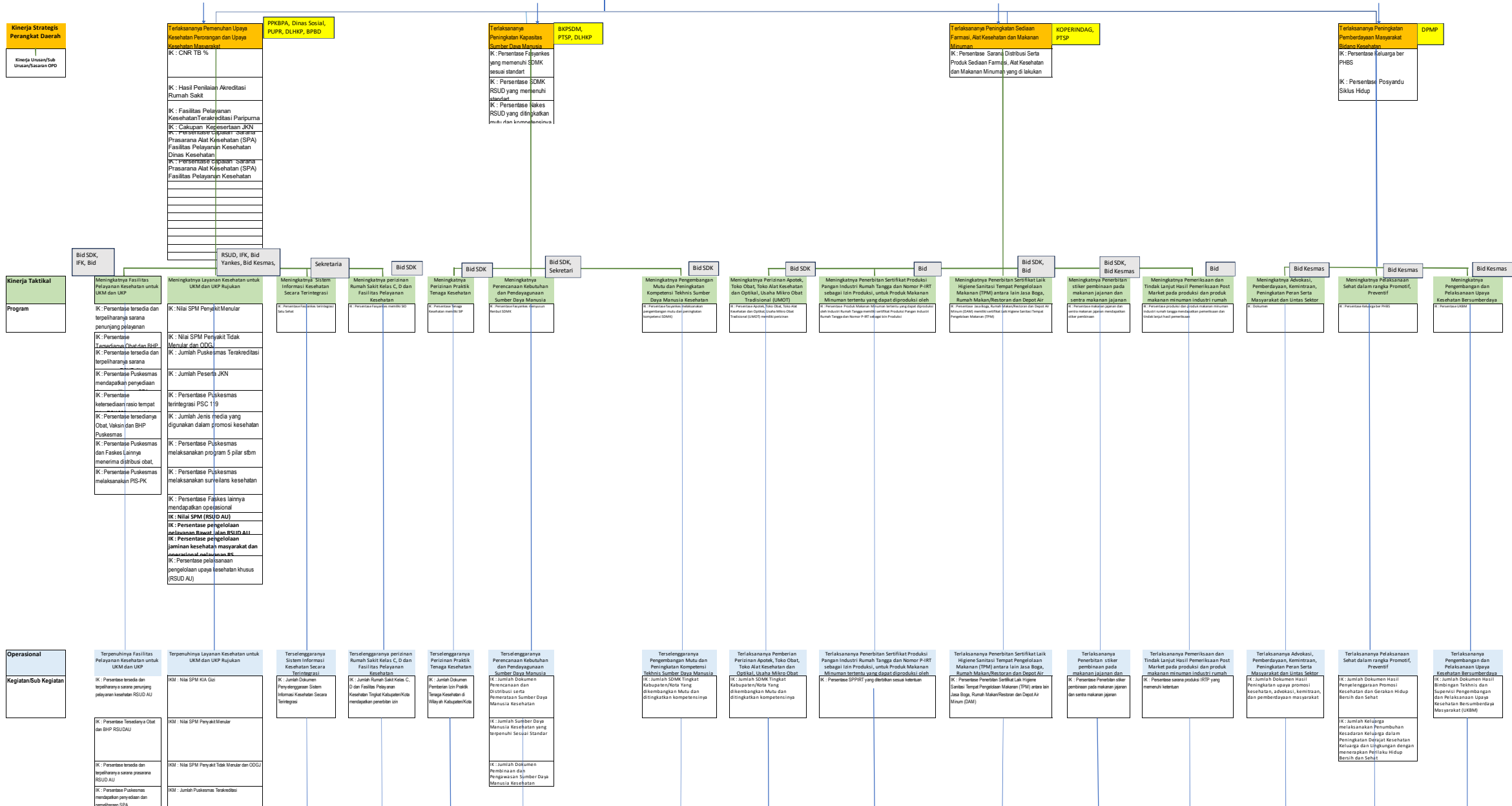
Berkas 1.1							
Pengelompokan Pelayanan Kesehatan yang Berdampak pada Kesehatan Masyarakat							
Kategori Kegiatan	Subkategori Kegiatan	Sektor	Target				
			2016	2017	2018	2019	2020
Peningkatan Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Masyarakat tentang Penyakit Menular Seksual (PMS)	Penyakit Menular Seksual (PMS)	Kesehatan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

Level Kinerja

Kinerja Strategis Perangkat Daerah
Tujuan OPD

LOGICAL FRAMEWORK DINAS KESEHATAN (CROSSCUTTING)
RENSTRA 2025-2030

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
IK : Angka Kematian Ibu	
IK : Angka Kematian Bayi	
IK : Prevalensi Balita Stunting	
IK : Indeks Kepuasan Masyarakat	



IK : Persentase ketersediaan ratio tempat tidur RS/1000 penduduk	IKM : Jumlah Peserta JKN
IK : Persentase tersedianya Obat Vaksin dan BHP Puskesmas	IKM : Persentase Puskesmas terintegrasi PSC 119
IK : Persentase Puskesmas dan Fasilitas Lainnya menerima distribusi obat, vaksin dan BHP	IKM : Jumlah Jenis media yang digunakan dalam promosi kesehatan
IK : Persentase Puskesmas melaksanakan PIS-PK	IKM : Persentase Puskesmas melaksanakan program 5 pilar stlm

	IKM : Persentase Puskesmas melaksanakan <u>surveilans</u> kesehatan IKM : Persentase Faskes lainnya mendapatkan <u>generasional</u> IKM : Nilai SPM (RSUD AU) IKM : Persentase pengelolaan pelayanan Rawat Jalan RSUD AU IKM : Persentase pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dan operasional pelayanan RS
--	--

[illegible]

IKM : Jumlah Peserta JKN
IKM : Persentase Puskesmas terintegrasi PSC 119
IKM : Jumlah Jenis media yang digunakan dalam promosi kesehatan
IKM : Persentase Puskesmas melaksanakan program 5 pilar sblm
IKM : Persentase Puskesmas melaksanakan surveilans kesehatan
IKM : Persentase Faskes lainnya mendapatkan operasional
IKM : Nilai SPM (RSUD AU)
IKM : Persentase pengelolaan pelayanan Rawat Jalan RSUD AU
IKM : Persentase pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dan operasional pelayanan RS

[illegible]

Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (IK : Dokumen)

Tertarikannya Pengendalian dan Pengawasan serta Tidak Lanjut Pengawasan Partisipatif untuk Ketaatan, Di dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya (K : Dokumen)
Tertarikannya Pengontrolan Tata Kelola Rumah Sakti dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (K : Dokumen)
Tertarikannya Penitungsan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (K : Dokumen)
Tertarikannya Penyalangan Penemuan di Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Urutan (K : Dokumen)

[illegible]

terdapatnya Pemenuhan dan Distribusi serta Pemasaran Sumber Daya Manusia Kesehatan (K: Dokumen) terdapatnya Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Seksual Standar (K: Orang) terdapatnya Peningkatan dan Penguasaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (K: Dokumen)

Tertarikananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tesis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Dasar (Labupaten/Kota (K : Orang)

Tertarikatanya Pergenditan dan Pengawasan
sertaTerdidatLanjut Pengawasan Perisikan Apostak,
Taka Obat, Taka Aler Kesehatan, dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (K :
Dokumen)

Revisi secara berkala terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27/2013 tentang Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga (K-IRT) sebagai jaminan Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (K-IRUKM).

Penelitian yang menggunakan data pengamatan untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman dan sikap siswa terhadap materi, serta untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan.

Tertakutnya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penertiban Stiker Pembelian pada Makanan Jajanan dan Senter Makanan Jajanan (JK :

Hubungan Perilaku dan Pola Makan pada Produk Makanan-Minum Industri Rumah Tangga yang Bersifat Pengawetan serta Tindakan Lanjut Pengawetan (JK : 1982)

[illegible][illegible]

Terkaitannya bimbingan Teknis dan supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan (gaya Kesehatan Berumur Dapa Masyarakat (UKBM) (K : Dokumen)